



**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMANFAAT HASIL HUTAN NON KAYU (HHNK)
DI TAMAN NASIONAL BALURAN
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh:

**Dyah Ayu Permatasari
NIM 101510601053**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMANFAAT HASIL HUTAN NON KAYU (HHNK)
DI TAMAN NASIONAL BALURAN
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Menyelesaikan Program
Sarjana pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Jember

Oleh:

**Dyah Ayu Permatasari
NIM 101510601053**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya tulis ini ingin kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Haryadi, S.Pd. dan Ibu Siti Munawaroh, yang telah melimpahkan kasih sayang, dorongan, nasihat dan untaian doa yang tiada henti terucap mengiringi setiap langkah untuk keberhasilanku
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran
3. Almamater yang kubanggakan, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang pada diri mereka”
(QS Ar-Ra’d : 11)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat
(Winston Churchill)

Kau tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu,
tapi jika kau tidak melakukan apapun,
tentu tidak akan ada hasilnya
(Gandhi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dyah Ayu Permatasari

NIM : 101510601053

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Ilmiah Tertulis berjudul “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan dan data sekunder jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Pebruari 2015
yang menyatakan,

Dyah Ayu Permatasari
NIM 101510601053

SKRIPSI

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMANFAAT HASIL HUTAN NON KAYU (HHNK)
DI TAMAN NASIONAL BALURAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh:

**Dyah Ayu Permatasari
NIM. 101510601053**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Djoko Soejono, SP., MP.
NIP 197001151997021002

Dosen Pembimbing Anggota : Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D.
NIP 196812021994032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Pebruari 2015

Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Tim Penguji
Penguji 1,

Djoko Soejono, SP., MP.
NIP 197001151997021002

Penguji 2,

Penguji 3,

Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D.
NIP 196812021994032001

Dr. Triana Dewi Hapsari, SP., MP.
NIP 197104151997022001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ir. Jani Januar, MT.
NIP 195901021988031002

RINGKASAN

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo, Dyah Ayu Permatasari,101510601053, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Taman nasional adalah salah satu bentuk usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hutan. Salah satu taman nasional yang berada di Jawa Timur adalah Taman Nasional Baluran (TNB) yang berada di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan taman nasional akan mencapai keberhasilan jika terdapat partisipasi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional. Pihak TNB /mengikutsertakan masyarakat desa penyangga yang mayoritas sebagai pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di hutan TNB.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran, (2) Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran, (3) Mengetahui strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Penentuan daerah atau tempat penelitian yaitu menggunakan *purposive method*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analitis dan korelasional. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabulasi skor, analisis *Rank Spearman*, dan analisis medan kekuatan (FFA).

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah rendah, (2) Faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah pendapatan, sedangkan umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan dan lama tinggal tidak terdapat berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat

Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. (3) Strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah memberikan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya dengan hasil hutan serta adanya pendampingan pemerintah desa, Lembaga desa, dan pihak Taman Nasional Baluran.



SUMMARY

The Strategies For Increasing The Non Timber Forest Products (HHNK) utilizer's Participation in Baluran National Park in Situbondo, Dyah Ayu Permatasari,101510601053, Department Of Agriculture Social Economics, Faculty of Agriculture University of Jember.

The National Park is one of the efforts to preserve the sustainability of the forest resources. One of the National Park in East Java is Baluran National Park (TNB) which is located in Situbondo. The successful management of the national park is also influenced by the society living surrounding. The management of the Baluran National Park engages the society who are dominantly the non-timber forest products utilizer in The Baluran National Park.

This research aims to: (1) to know the level of participation of the non-timber forest products utilizer in managing the Baluran National Park, (2) to know the factors that correlated with of the non-timber forest products utilizer in managing the Baluran National Park, (3) to know the strategy for increasing of the non-timber forest products utilizer's participation in managing the Baluran National Park. The determination the research area of is by using the purposive method. The applicable research methods are descriptive methods, analytical methods and correlational. The sampling methods is by using the snowball sampling. The primary and secondary data are used in this research. Additionally, The data analysis used are score tabulation, Rank Spearman analysis, and the Field Force Analysis (FFA).

The results of the analysis show that: (1) the level of participation of the non-timber forest products utilizer in managing the Baluran National Park is still low, (2) the factor correlated with utilizer's participation is their income, while their age, the number of their family members, their education, length of stay period, and their knowledge of the area are not correlated with the utilizer's participation (3) the strategy for increasing the number of the utilizer's participant in managing the Baluran National Park are by holding the socialization program,

matching to the society's need and also asking for the guidance of the village government, civil organization. And also the government of Baluran National Park.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Karya Ilmiah Tertulis yang berjudul “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo” dapat diselesaikan. Karya ilmiah tertulis ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S-1), Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan karya ilmiah tertulis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Ir. Jani Januar, MT., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
2. Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M. Rur. M., selaku Ketua Program Studi Agribisnis Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.
3. Djoko Soejono, SP., MP., selaku Dosen Pembimbing Utama, Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Anggota, serta Dr. Triana Dewi Hapsari, SP., MP., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Djoko Soejono, SP., MP, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama masa studi.
5. Dr. Luh Putu Suciati, SP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Kedua orang tuaku tersayang, Ayah Haryadi, S.Pd. dan Ibu Siti Munawaroh, serta kakakku Ardhini Estu Wardana dan adikku Aulia Dhita Nur Alike atas segala motivasi, kepercayaan, doa, dan dukungan yang tanpa henti hingga terselesaikannya karya tulis ini.

7. Bapak Rusdianto selaku Kepala Resort SPTN Wilayah Karangtekok, Bapak Hendry selaku Kepala Resort SPTN Wilayah Perengan, dan Bapak Hardiyono selaku Ketua Kelompok SPKP yang berkenan memberikan informasi yang mendukung penyelesaian karya ilmiah ini.
8. Bapak Siyanto, Bapak Sophaan, dan Bapak Kahir selaku petugas Taman Nasional Baluran atas bantuan yang diberikan dalam pencarian informasi yang mendukung karya ilmiah ini, serta masyarakat desa penyangga yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah ini.
9. Sahabat terbaikku Yeni Anggraeni dan Binta Deniar, yang selalu menemani, memberi semangat, bantuan, dan doa hingga akhir masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, persaudaraan, dan perhatiannya. Beruntung mengenal kalian berdua, sahabatku.
10. Teman terbaikku Laksmianindya R.P, Rr. Kartika, Ela Fitria, Kholifatus Sa'adah, Anisa Zain, terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, semangat, doa, bantuan dan perhatiannya selama masa studi.
11. Keluarga FALLS ku, Ema, Imron, Yekti, Elfin, Titin, Firman, Gufron Hendrik, dan Erik, terimakasih atas kebersamaan dan doa yang telah diberikan selama ini.
12. Dulur-dulur Agribisnis angkatan 2010 (AGB '10 – Agrinian) Fakultas Pertanian Universitas Jember atas dukungan dan semangatnya.
13. Crew ADVIS (Audio Visual Sosek) Universitas Jember yang telah banyak memberikan pengalaman yang berharga.
14. Pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah tertulis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah tertulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga karya ilmiah tertulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, Pebruari 2015

Penulis

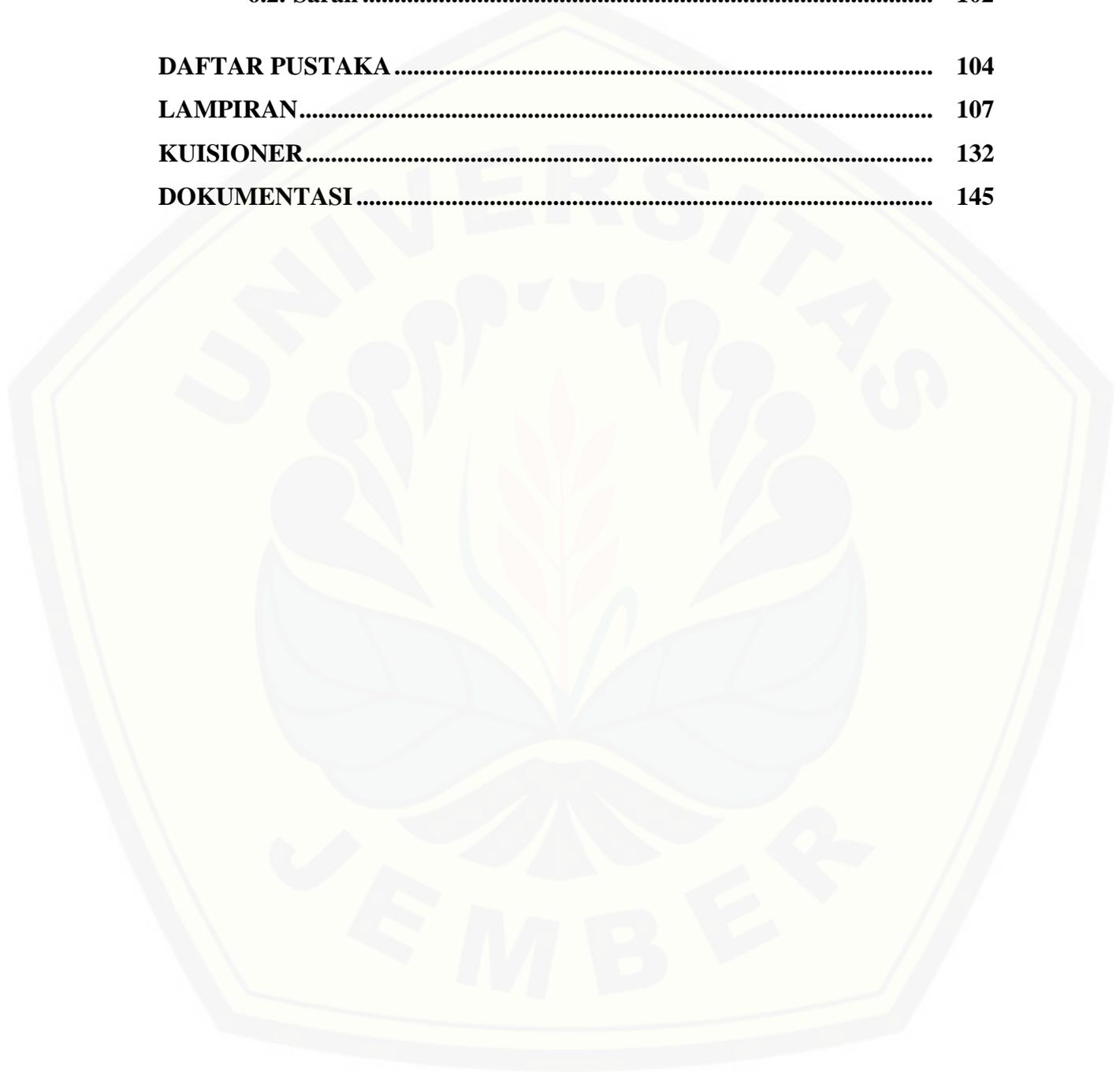
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1. Tujuan.....	7
1.3.2. Manfaat.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Taman Nasional	11
2.3. Teori Partisipasi	19
2.4. Analisis Korelasi	26
2.5. Analisis Medan Kekuatan (<i>Force Field Analysis</i>)	27
2.6. Kerangka Pemikiran	28

	Halaman
2.7. Hipotesis.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian.....	33
3.2. Metode Penelitian	33
3.3. Metode Pengambilan Contoh	33
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5. Metode Analisis Data.....	36
3.6. Definisi Operasional	44
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	47
4.1. Gambaran Umum Taman Nasional Baluran (TNB).....	47
4.2. Gambaran Umum Desa Penyangga	51
4.2.1. Letak Geografis	51
4.2.2. Luas Wilayah dan Penggunaannya.....	53
4.2.3. Topografi Desa	56
4.2.4. Keadaan Iklim	58
4.3. Sumber Daya Manusia	60
4.3.1. Potensi Sumber Daya Manusia.....	60
4.3.2. Keadaan Penduduk Menurut Usia.....	62
4.3.3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	64
4.3.4. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	66
4.4. Karakteristik Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu	68
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	72
5.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	72
5.1.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Perencanaan.....	75

	Halaman
5.1.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Pelaksanaan	75
5.1.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Pemanfaatan Hasil.....	77
5.1.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Evaluasi	79
5.2. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	79
5.2.1. Hubungan Umur dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	80
5.2.2. Hubungan Jumlah Tanggungan Keluarga dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	80
5.2.3. Hubungan Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	81
5.2.4. Hubungan Pendapatan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	82
5.2.5. Hubungan Lama Tinggal dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran	83
5.2.6. Hubungan Pengetahuan Kawasan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran	84
5.3. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	85

	Halaman
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	102
6.1. Kesimpulan	102
6.2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107
KUISIONER	132
DOKUMENTASI	145



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Responden Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.....	35
3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi.....	38
3.3 Tingkat Urgensi Antar Faktor.....	40
4.1 Batas-Batas Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	52
4.2 Batas-Batas Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012.....	52
4.3 Batas-Batas Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	53
4.4 Luas Wilayah Desa Sumberwaru Menurut Penggunaannya Tahun 2011.....	54
4.5 Luas Wilayah Desa Sumberanyar Menurut Penggunaannya Tahun 2012.....	54
4.6 Luas Wilayah Desa Wonorejo Menurut Penggunaannya Tahun 2011.....	55
4.7 Topografi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	56
4.8 Luas Hutan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	56
4.9 Topografi Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012.....	57
4.10 Luas Hutan Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012.....	57
4.11 Topografi Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	58
4.12 Luas Hutan Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	58
4.13 Keadaan Iklim Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	59

	Halaman
4.14 Keadaan Iklim Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012.....	59
4.15 Keadaan Iklim Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	60
4.16 Jumlah Penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	60
4.17 Jumlah Penduduk Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012.....	61
4.18 Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	61
4.19 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2011.....	62
4.20 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2012.....	63
4.21 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2011.....	63
4.22 Distribusi Penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Tahun 2011.....	64
4.23 Distribusi Penduduk Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Tahun 2012.....	65
4.24 Distribusi Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Tahun 2011.....	65
4.25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	66
4.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012.....	67
4.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011.....	67
4.28 Umur Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.....	68
4.29 Jumlah Tanggungan Keluarga Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.....	68

	Halaman
4.30 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.....	69
4.31 Tingkat Pendapatan Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.....	70
4.32 Lama Tinggal Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.....	70
4.33 Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Hutan TNB.....	71
5.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.....	73
5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahapan Partisipasi.....	73
5.3 Hasil Analisis Korelasi <i>Rank Spearman</i>	79
5.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	86
5.5 Evaluasi Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	93
5.6 Evaluasi Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Anak Tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)	26
2.2 Skema Kerangka Pemikiran	31
3.1 <i>Snowball Sampling</i>	34
3.2 Diagram Medan Kekuatan	43
5.1 Medan Kekuatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran	99

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Identitas Responden Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran.....	107
B. Skor Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran.....	108
C. Tingkat Partisipasi Responden Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran.....	113
D. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	115
E. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	116
F. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	117
G. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Evaluasi Pengelolaan Taman Nasional Baluran.....	118
H. Variabel Uji Korelasi Rank Spearman Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran.....	119
I. Variabel Uji Korelasi Rank Spearman Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran	121
J. Data Hasil Wawancara Responden FFA.....	122
K. Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (masing-masing responden).....	126
L. Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (Gabungan).....	130
M. Peta Taman Nasional Baluran.....	131

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Statistik Kehutanan Indonesia (2011), kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduan serasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Luas kawasan hutan dan perairan Indonesia adalah 134.275.567,98 hektar.

Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk ke dalam kategori kawasan ini adalah Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

Taman nasional adalah suatu kawasan konservasi yang seharusnya dipelihara dan dijaga serta dikembangkan untuk dikelola secara lestari, berdasarkan 3 elemen penting, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Tujuan pembangunan konservasi sumberdaya alam yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Hal ini dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Hidayat dkk, 2011).

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, pariwisata, dan rekreasi (Kementrian Kehutanan, 2012). Taman nasional tergolong dalam hutan konservasi, selain merupakan aset bangsa Indonesia, juga menjadi hutan yang diperuntukkan dengan tujuan ganda, yakni: (a) perlindungan dan pengawetan secara mutlak terhadap tipe-tipe ekosistem dan keanekaragaman jenis; (b) pemanfaatan secara terkendali dari ekosistem dan keanekaragaman jenis tersebut sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat luas secara lestari (Hidayat dkk, 2011).

Taman nasional sebagai kawasan konservasi memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Tiga fungsi Taman Nasional tersebut dapat terlaksana jika dalam pengelolaannya terdapat gangguan seminimal mungkin. Namun dalam kenyataannya, kawasan konservasi saat ini banyak mendapatkan tekanan gangguan keamanan hutan yang disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat

yang berinteraksi langsung di dalam kawasan. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena memang sebagian besar masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan berada dalam kategori kurang mampu. Tercatat saat ini ada lebih kurang 1.595.870 KK dari 2.857 desa yang memiliki interaksi langsung pada kawasan konservasi. Jumlah tersebut merupakan potensi besar yang apabila tidak dikelola secara baik dapat berdampak terdegradasinya sebuah kawasan konservasi. Oleh karena itu, masyarakat sekitar itulah yang memiliki pengaruh penting keberadaan sebuah taman nasional berhasil atau tidaknya dalam hal konservasi. Memang pada awalnya dalam konsep taman nasional masyarakat setempat dianggap sebagai tidak ada, atau hanya sebagai sebetuk gangguan saja yang harus dihapus. Padahal, jarang ada taman nasional dimana tidak ada masyarakat setempat. Kini banyak taman nasional yang sudah melaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat karena adanya kesadaran akan manfaatnya. Hal ini tercermin peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi telah masuk dalam 5 kebijakan pokok Departemen Kehutanan yang diantaranya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. (Iqbal, 2011).

Hasil kongres Taman Nasional se-Dunia pada tahun 2003, bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi. Masyarakat tersebut akan termotivasi dan berperan serta untuk kepentingan pengelolaan kawasan dalam jangka panjang. Hal ini akan berimplikasi terbukanya akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan potensi Hasil Hutan Non Kayu yang terdapat dalam kawasan secara berkesinambungan. Keberhasilan pengelolaan banyak bergantung pada kadar dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sekitar. Jika kawasan yang dilindungi dipandang sebagai penghalang, penduduk setempat dapat mengagalkan pelestarian. Namun bila pelestarian dianggap sebagai suatu yang positif manfaatnya, penduduk setempat sendiri yang akan bekerjasama dengan pengelola dalam melindungi kawasan tersebut.

Taman Nasional Baluran merupakan kawasan konservasi yang terletak di wilayah Jawa Timur. Taman Nasional Baluran terletak di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional Baluran sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam memiliki beberapa sistem pengelolaan taman nasional yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Yogiswari, 2009).

Setiap kawasan konservasi di Indonesia yang berbatasan dengan pemukiman hampir selalu mendapat tekanan dari masyarakat, baik berupa pemukiman di dalam kawasan maupun pemanfaatan potensinya. Seperti halnya Taman Nasional Baluran yang berdampingan dengan beberapa desa diantaranya Desa Wonorejo, Sumberanyar dan Sumberwaru di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dan Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, terdapat juga beberapa pemukiman di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Interaksi yang terjadi antara masyarakat desa sekitar Taman Nasional Baluran dengan sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan tersebut antara lain : pengambilan gadung, buah asam, buah kemiri, daun gebang (kobel) dan biji gebang (kelanting), biji akasia, rumput, madu dan ikan serta penggembalaan ternak secara liar.

Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran didominasi oleh pemanfaat yang berusia 28-55 tahun atau dari kelompok umur produktif. Hal ini akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan memadai, sehingga mencari HHNK di kawasan Taman Nasional Baluran menjadi suatu alternatif yang mampu memberikan tambahan pendapatan. Dengan mata pencaharian mayoritas pemanfaat HHNK sebagai buruh tani dan petani, memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan lebih menguntungkan untuk dilakukan di luar musim tanam dan musim panen. Mata pencaharian yang terbatas tersebut antara lain diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Sebagian besar pemanfaat HHNK berlatar pendidikan SD (baik tamat maupun tidak tamat) sebesar 72,8%. Pendidikan yang

rendah juga menyebabkan pendapatan yang rendah dikarenakan ketidakmampuan masyarakat berpendidikan rendah untuk menganalisa dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan peluang-peluang untuk memperoleh serta meningkatkan penghasilan keluarga (Pratiwi, 2009).

Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat yang rendah terutama pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan kelestarian hutan di Taman Nasional Baluran kurang. Hal ini disebabkan karena dengan pendapatan yang kurang memungkinkan masyarakat untuk selalu bergantung kepada hasil hutan. Hasil hutan tersebut digunakan untuk menambah pendapatan rumah tangga. Pendidikan yang kurang juga menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran karena kurang informasi dan pengetahuan yang diperoleh masyarakat untuk kelestarian hutan.

Masyarakat yang tinggal di wilayah penyanggah mempunyai interaksi yang kuat dengan Taman Nasional Baluran. Selain masyarakat memanfaatkan hasil hutan seperti gadung, asem, biji akasia, rumput, madu dan kayu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Peranan penting tersebut yaitu partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan di Taman Nasional Baluran yang tujuannya untuk pengelolaan Taman Nasional Baluran. Salah satu partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata dan ikut serta dalam pemadaman api.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata di Taman Nasional Baluran yaitu masyarakat banyak menjadi ojek sekaligus menjadi *guide*. Ojek di Baluran dikenal dengan OBAMA yaitu kepanjangan dari Ojek Baluran Mantap. Masyarakat diberi pelatihan agar selain mengantarkan pengunjung untuk berkeliling Taman Nasional Baluran, juga dapat memberikan informasi kepada pengunjung. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata adalah memberikan jasa penginapan kepada pengunjung yang hendak bermalam. Selain kegiatan wisata, masyarakat juga berpartisipasi dalam memadamkan api di kawasan hutan bila terjadi kebakaran. Kebakaran hutan di Taman Nasional

Baluran membutuhkan bantuan dan dukungan dari setiap lapisan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar Taman Nasional Baluran. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan tenaga maupun memberikan informasi terkait adanya kejadian kebakaran di dalam kawasan hutan. Sebagian masyarakat pun direkrut untuk turut serta dalam upaya pengamanan maupun pemadaman kebakaran hutan dalam wadah Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). MPA dan MMP merupakan suatu bentuk kerjasama antara pihak Taman Nasional Baluran dengan Masyarakat sekitar terutama yang menjadi pemanfaat HHNK. Tujuan dibentuknya MPA dan MMP ini adalah untuk menjaga keamanan hutan dari kebakaran hutan yang sering terjadi terutama di musim kemarau dan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap HHNK karena masyarakat telah memperoleh lapangan pekerjaan yang baru.

Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah banyak dilakukan. Akan tetapi hasil dari yang diharapkan masih jauh dari kata puas. Sebagian besar hasil yang didapatkan partisipasi dari masyarakat masih tergolong rendah, sehingga keberhasilan dari program dapat dikatakan kurang berhasil. Melihat kondisi seperti ini, peneliti tertarik untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan Taman Nasional Baluran, yaitu dengan cara melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat terutama para pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran?
2. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran?
3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.
3. Mengetahui strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

1.3.2 Manfaat

1. Sebagai referensi tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat taman nasional bagi peneliti selanjutnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan Taman nasional.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu Kadir dan Yusran (2008) yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan *Social Forestry* di KHDTK Borisallo” menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan *social forestry* di KHDTK masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil distribusi berdasarkan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pengembangan *social forestry* di KHDTK Borisallo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 78,57% masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang rendah dan 21,43% berada pada tingkat sedang. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena pada sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk pertemuan maupun dalam bentuk kegiatan fisik tidak semua masyarakat dilibatkan. Kegiatan pertemuan biasanya dilakukan dengan sistem perwakilan. Setiap KTH diwakili oleh 5 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota. Begitupun dalam kegiatan fisik, umumnya yang terlihat hanya sebatas mereka yang lahannya masuk dalam lingkup kegiatan tersebut. Sistem perwakilan dalam pertemuan seperti ini dikeluhkan oleh masyarakat karena masyarakat ingin terlibat tetapi tidak pernah diundang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan *social forestry* di KHDTK Borisallo dapat menyebabkan proses belajar masyarakat dari pengalaman tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga akan mempengaruhi hasil yang diharapkan dari program pengembangan *social forestry*.

Hasil penelitian Aprianto (2008) yang berjudul “Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berhubungan nyata atau signifikan dari tingkat partisipasi warga Kampung Rajawali dalam pengelolaan lingkungannya yaitu lama tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga lebih ditentukan oleh bagaimana warga berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam di sekitar tempat tinggal. Hasil laporan penelitian Demartoto (2009) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Alam Air Terjun Jumog, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah”

menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat adalah pendidikan formal responden, pengetahuan tentang sejarah Air Terjun Jumog, dan penghasilan.

Menurut Salampessy, dkk (2010) yang berjudul “Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kasus di Hutan Lindung Gunung Nona Kota Ambon Propinsi Maluku”, menjelaskan bahwa faktor karakteristik individu dan organisasi yang mempunyai hubungan erat terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Nona adalah pengetahuan tentang hutan lindung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2011) yang berjudul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan terhadap Sistem PHBM di Perum Perhutani” dijelaskan bahwa terdapat faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa sekitar hutan dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Faktor tersebut meliputi umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga dan pendapatan.

Menurut hasil penelitian Suprayitno, dkk (2011) yang berjudul “Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat”, dijelaskan bahwa petani agar tetap mempertahankan dan meningkatkan partisipasinya, maka dirancang langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis dirancang dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh suatu aspek terhadap aspek lainnya. Jalur pengaruh yang lebih besar diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Strategi peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dijabarkan ke dalam dua strategi yaitu :

- a. Strategi peningkatan motivasi petani sekitar hutan. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah:
 1. Meningkatkan produktivitas tanaman kemiri melalui peremajaan tanaman kemiri dan pemeliharaan lanjutan.
 2. Menyediakan peluang kepada petani untuk mengelola hutan dalam bentuk adanya kepastian kewenangan atau pemberian hak kelola kepada petani.
 3. Mendorong dan mengembangkan terciptanya industri rumah tangga. Perlu dilakukan upaya pengayaan atau diversifikasi produksi kemiri, sehingga

penjualan produk kemiri tidak hanya dalam bentuk biji kemiri, namun dalam bentuk lainnya sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi

- b. Strategi peningkatan kemampuan petani sekitar hutan dalam mengelola hutan kemiri. Upaya yang dilakukan adalah:
 1. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan teknis petani sekitar hutan meliputi teknik persemaian, teknik pemeliharaan, teknik pemanenan dan pengolahan pasca panen, kemampuan manajerial meliputi perencanaan, evaluasi dan monitoring, dan pemasaran; dan kemampuan sosial meliputi kemampuan komunikasi, mediasi dan negosiasi.
 2. Mengembangkan dan meningkatkan intensitas peran penyuluh kehutanan terutama peran fasilitator dan peran pendidik, sebagai faktor penting yang berpengaruh dalam peningkatan kemampuan petani langkah strategis yang dapat dilakukan adalah:
 - a) Perlu adanya kejelasan peran penyuluh dalam bentuk adanya kepastian tugas atau bidang yang disuluhkan.
 - b) Peningkatan kemampuan penyuluh kehutanan secara berkelanjutan agar kinerja penyuluh kehutanan semakin baik. Penyuluh yang ada memiliki keterbatasan pengetahuan di bidang kehutanan karena pada umumnya berlatar belakang ilmu teknis pertanian. Oleh karena itu peningkatan kemampuan penyuluh kehutanan diharapkan meliputi ilmu penyuluhan dan ilmu teknis kehutanan.
 - c) Menciptakan lingkungan kerja lembaga penyuluhan yang kondusif. Lingkungan fisik berupa kelengkapan sarana dan fasilitas penyuluhan kehutanan. Lingkungan organisasi berupa perbaikan sistem kerja, iklim komunikasi yang suportif, meyakinkan penyuluh kehutanan, akan kejelasan tugas dan karir penyuluh, kejelasan struktur organisasi dan keberlanjutan eksistensi lembaga penyuluhan.

2.2 Taman Nasional

1. Taman Nasional

Taman nasional dapat dipandang sebagai tatanan sistem-sistem kompleks yang saling berinteraksi dan saling-tergantungan, sehingga membentuk satu kesatuan yang terwujud dalam sub-sistem ekologi, sosio-ekonomi, sosio-budaya, dan sosiopolitik (Anshari, 2006). Kawasan taman nasional di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebagai negara kepulauan beriklim tropis, Indonesia dianugerahi dua wilayah biologis, yang satu mewakili persebaran satwa yang meliputi kawasan oriental dan Australia, yang lainnya mewakili persebaran flora dalam kelompok Malesia. Hutan di Indonesia menjadi habitat flora dan fauna yang meliputi 17 % spesies burung, 16 % reptil, 12 % mamalia, dan 10 % jenis tanaman yang ada di dunia, yang semuanya itu berada di kawasan hutan lindung dan taman nasional dengan luas terbesar kedua setelah Brazil. Taman nasional sebagai kawasan konservasi, merupakan ekosistem yang paling produktif, dengan tanpa membutuhkan investasi, kawasan ini terus menerus menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan manusia dan berfungsi sebagai penyangga, seperti oksigen, plasma nutfah, fungsi barier abrasi pulau, menyimpan dan mendistribusikan air tanah, memberikan nuansa keindahan, dan sebagainya (Suriani dan Razak, 2006).

2. Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran terletak di ujung Timur Pulau Jawa. Kawasan itu didominasi oleh gunung api setinggi 1.268 m, yang salah satu sisinya dikenal dengan Gunung Baluran. Selain savana yang terkenal, Taman Nasional Baluran juga mempunyai ekosistem mangrove dan terumbu karang. Taman ini merupakan bagian terkering di Pulau Jawa dengan rata-rata curah hujan kurang dari 1.000 mm/tahun. Kawasan ini sejak lebih dari 500 tahun yang lalu, telah dikenal sebagai kawasan perburuan di Pulau Jawa pada jaman kolonial Belanda (Hakim, 2004).

Taman Nasional Baluran merupakan kawasan Konservasi Sumberdaya Alam yang terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Luas Taman Nasional Baluran (TNB) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.279/Kpts-VI/1997 adalah 25.000 ha (Hidayat, 2011).

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Tiga fungsi Taman Nasional tersebut dapat terlaksana jika dalam pengelolaannya terdapat gangguan seminimal mungkin (Iqbal, 2011).

3. Konsep Pengelolaan Taman Nasional Baluran yang Melibatkan Masyarakat

Secara umum ada dua aktor yang dipandang mempunyai kompetensi untuk mengelola hutan yaitu negara dan rakyat. Menurut Awang (2001) dalam Rianse dan Abdi (2010), pengelolaan hutan berbasis masyarakat diartikan sebagai pendekatan dan strategi pengelolaan hutan yang memposisikan rakyat (masyarakat) menjadi pelaku utama didalamnya. Bentuk pengelolaan hutan ini lebih menekankan pada pelaksanaan semua prinsip yang mendorong pada pemerataan ekonomi kerakyatan. Rianse dan Abdi (2010) menyatakan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat terjemahan dari *community based forest management* yang disingkat CBFM. CBFM berkehendak menempatkan masyarakat sebagai pelaku penting. Pendekatan ini terus berkembang sesuai dengan proses demokratisasi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai imbas dari proses-proses politik yang terjadi.

Kekayaan alam Taman Nasional Baluran yang indah seperti keanekaragaman satwa liar yang menarik perhatian, pantai-pantai dan gugusan batu karang dengan satwa laut yang berwarna warni, serta keindahan alam daratan disekitarnya merupakan daya tarik yang kuat bagi para pencinta alam. Kawasan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik luar maupun dalam negeri, sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan yang tepat dengan memperhatikan kaidah-kaidah fungsi pokok kawasan konservasi. Maka dari itu, pengembangan pariwisata alam merupakan salah satu kebijakan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan masyarakat dengan kaidah-kaidah konservasi yang berdasarkan peraturan perundangan (Juwariah, 2011).

Pihak Taman Nasional Baluran juga mempunyai visi dari pengembangan pariwisata alam yaitu untuk terwujudnya pengembangan pariwisata alam secara optimal yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan pelestarian sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya yang adil, demokratis dan berbasiskan masyarakat. Misi pengembangan pariwisata alam yang diemban pihak Taman Nasional Baluran yaitu turut mewujudkan pengembangan pariwisata alam yang memperhatikan kaidah pokok fungsi kawasan konservasi yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari (3P) yang berwawasan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Selain misi, tujuan pengembangan pariwisata alam di kawasan Taman Nasional Baluran diarahkan untuk terwujudnya pengembangan pariwisata alam yang berazaskan manfaat dan lestari, terwujudnya pengembangan pariwisata alam yang optimal baik di darat maupun di perairan, serta meningkatnya pengembangan pariwisata alam secara terkendali untuk kepentingan pembangunan dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional baluran (Juwariah, 2011).

4. Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran berdekatan dengan lima desa dari dua kecamatan dan kabupaten yang berbeda antara lain Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru, Desa Sumberanyar yang terletak di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sedangkan dua desa lainnya yaitu Desa Bajulmati dan Desa Watukebo yang terletak di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Tingkat pendidikan masyarakat dari lima desa penyangga Taman Nasional Baluran umumnya masih tergolong rendah, sebagian besar tingkat pendidikan yang mereka miliki hanya mencapai SD. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mencerminkan tingkat kesadaran yang rendah terhadap kelestarian alam sehingga yang lebih diutamakan adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini dapat lebih memungkinkan timbulnya kecenderungan memilih alternatif untuk mengeksploitasi potensi kawasan hutan tanpa memikirkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan bila eksploitasi tersebut dilakukan secara berlebihan dan terus menerus.

Masyarakat di lima desa penyangga Taman Nasional Baluran sebagian besar bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan yaitu sebagai petani dan buruh tani, sedangkan yang lainnya adalah karyawan, pedagang, peternak, penggembala, tukang, nelayan dan pensiunan. Dalam sektor pertanian, jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan cukup tinggi. Di samping itu, pertanian juga

dilaksanakan pada lahan kering, dan bergantung pada musim serta kondisi pengairan. Hal ini menyebabkan tingkat perambahan oleh masyarakat desa ke dalam kawasan Taman Nasional Baluran pada musim kemarau cukup tinggi (Marliani, 2005).

5. Hasil Hutan Non kayu

Bentuk-bentuk sumberdaya hasil hutan di kawasan Taman Nasional Baluran yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat desa penyangga Taman Nasional Baluran adalah Hasil Hutan Non Kayu, seperti gadung, kroto, kemiri, rumput, rencek (kayu bakar), bilambe, merak hijau jawa, akasia duri, pohon gebang, dan tanaman-tanaman obat. Berikut penjelasan masing-masing Hasil Hutan Non Kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat:

a) Gadung

Gadung merupakan makanan alternatif orang-orang desa, tanaman gadung tersebar mulai dari lereng Glengseran hingga Kancip. Musim panen dimulai awal memasuki musim penghujan, yaitu bulan agustus dan september. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan mulai melirik untuk mengambilnya karena jika tanaman ini diolah dengan benar maka akan menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat itu sendiri apabila dijual. Masyarakat menjual gadung ada yang sudah dalam bentuk olahan dan ada juga yang langsung menjual umbinya. Harga di tingkat rumahan berupa umbi berkisar Rp 1.000 – Rp 1.500/kg, di tingkat pengepul harga jual kisaran Rp 2.500 – Rp 3.000/kg, sedangkan hasil olahan yang berupa kripik gadung mentah harga per kg ditingkat produsen Rp 15.000, dan untuk harga di toko Rp 20.000 (Mariyono, 2012).

b) Kroto

Kroto atau larva semut rang-rang merupakan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) yang sering diambil oleh masyarakat untuk dijual kepada pengepul atau pemelihara burung-burung jenis ocean. Keberadaan larva semut rang-rang memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup populasi burung-burung liar, karena merupakan sumber protein, kandungannya mencapai (40-70%).

Keberadaan semut rang-rang merupakan salah satu rantai makanan untuk mempertahankan populasi burung di Taman Nasional Baluran. Menurut keterangan para pencari larva semut rang-rang, dalam setiap sarang dapat diperoleh kroto 1-4 ons. Rata-rata pencari kroto dalam sehari bisa mengumpulkan larva semut rang-rang minimal 1 kg, dan dijual kepada pengepul atau pencinta jenis burung ochean dengan harga Rp 40.000/kg. Pengambilan kroto dari alam merupakan aktivitas yang merusak ekosistem alam dan menyebabkan dampak negatif terhadap keseimbangan alam, seperti beberapa jenis ulat yang populasinya tidak terkendali contohnya permasalahan ulat bulu karena semut rang-rang merupakan predator bagi beberapa jenis ulat bulu yang merupakan hama bagi dunia pertanian (Siswandi, 2012).

c) Kemiri

Kemiri merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Musim kemiri sekitar bulan september-november, masyarakat kawasan Taman Nasional Baluran khususnya Desa Sumberwaru, tepatnya Dusun Belangguan, Sidodadi dan Merak siap mencari kemiri. Terdapat 5 kelompok pencari dengan jumlah orang yang berbeda-beda, berkisar antara 2-5 orang. Dalam perolehan hasil, setiap kelompok berbeda-beda ada yang 1 kui, 2 kui, bahkan ada yang 5 kui, ini sesuai dengan jumlah orang dalam 1 kelompok. Dalam 1 musim buah kemiri yang dimanfaatkan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Baluran sebanyak 17 kui. Harga jual kemiri (ada tempurung) yang sudah kering dihitung per 1.000 biji seharga 40.000 (pengambil ke pengepul). Selanjutnya, pengepul menjual kemiri yang sudah dikupas di seputaran pasar lokal dengan harga Rp 15.000/kg bahkan bisa lebih (Hernawan, 2012).

d) Rumput

Kawasan Taman Nasional Baluran khususnya SPTN Wilayah II Karangtekok keberadaannya berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat, dimana aksesnya melalui darat maupun laut sangatlah mudah. Masyarakat di sekitar wilayah Karangtekok sebagian besar memiliki hewan ternak sapi maupun

kambing, sehingga sangat bergantung pada potensi kawasan hutan dengan mengambil rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan ternak. Pengambilan rumput di dalam kawasan hutan Taman Nasional Baluran dilakukan oleh masyarakat secara rutin setiap hari untuk kebutuhan pakan hewan ternak dan dijual untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil rumput yang diperoleh dijual ke peternak dengan harga Rp 35.000–Rp 40.000 (Saleh, 2012).

e) Rencek/kayu bakar

Terbukanya akses membuat Taman Nasional Baluran menjadi alternatif mudah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satunya bahan bakar dengan kayu. Pencari kayu bakar yang masuk ke dalam hutan baluran \pm 40 orang, ada yang setiap hari mengambil dan ada yang mencari kayu bakar sebagai pekerjaan sampingan, kayu bakar ada yang digunakan sendiri dan ada yang dijual. Dalam seminggu satu keluarga dapat menghabiskan $\pm 0,20 \text{ m}^3$ kayu untuk memasak. Satu sepeda kayu bakar (sekitar 15 ikat) biasanya dihargai Rp 40.000–Rp 45.000. Tekanan terhadap potensi kayu di hutan baluran menjadi lebih tinggi dengan adanya 2 pelabuhan kecil (dengan tempat pelelangan ikan) yang mempunyai usaha pemindangan ikan, *home industry* yang membutuhkan bahan bakar murah (pembuat krupuk, kripik, tempe dan tahu). Terdapat satu industri lagi yang banyak di sekitar kawasan hutan adalah pembuatan batu bata dan genteng, industri ini ada \pm 20 buah dan membutuhkan $\pm 5 \text{ m}^3$ setiap satu bulan melakukan pembakaran. Pencari kayu bakar melakukan pencarian di zona pemanfaatan khusus (hutan jati) dan di zona rimba (Arif, 2012).

f) Bilambe

Sargassum/Bilambe dapat dijadikan makanan untuk dikonsumsi oleh manusia, biasa juga digunakan sebagai umpan dalam perangkap ikan keranjang, pakan ternak, pupuk serta obat nyamuk. Beberapa spesies dapat pula digunakan sebagai obat untuk penyakit mulai dari demam anak, menurunkan kolesterol, membersihkan darah, serta penyakit kulit. SPTN Wilayah II Karangtekok merupakan daerah dimana bilambe diambil

kemudian dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat sekitar kawasan sebagai HHNK. Bilambe yang diambil oleh masyarakat kemudian dijual kepada para pengumpul-pengumpul lokal di Dusun Merak serta Sidodadi untuk selanjutnya dikeringkan dan dikirim keluar daerah sesuai dengan pesanan dengan harga jual Rp 850/kg kering. Rata-rata penghasilan masyarakat antara 10.000-15.000/hari. Dalam satu musim Taman Nasional Baluran berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dari bilambe sebagai salah satu komoditas HHNK dengan nilai ekonomis mencapai Rp 4.505.000 (Suwono, 2012).

g) Akasia Duri

Savana Baluran dengan luas 10.000 ha, (50%) dari luas savana telah terinvasi tanaman *acacia nilotica*. Tanaman tersebut menempati ruang-ruang di savana, sehingga terjadi perubahan tipe ekosistem dari ekosistem savana menjadi ekosistem *acacia nilotica* (hutan homogen). Pada saat musim panen (Agustus-Oktober), masyarakat berbondong-bondong masuk kawasan Baluran untuk memanennya. Dari tahun ke tahun harga per kg biji akasia fluktuatif, naik turun. Pada tahun 2011 harga per kg berkisar antara Rp 2.500-4.000. Pengepul mengatakan bahwa naik turunnya harga disebabkan oleh banyak sedikitnya biji akasia. Satu pohon akasia mampu menghasilkan biji kering siap jual sebanyak 2-5 kg tergantung besar kecilnya pohon, atau rata-rata per pohon bisa menghasilkan 3 kg. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan secara acak di lokasi savana yang terinvasi akasia, kerapatannya berkisar antara 564-700 batang per ha, rata-rata per ha sebanyak 632 batang. Jadi jumlah pohon akasia seluas 5.000 ha sebanyak 3.160.000 batang (Toha, 2012).

h) Pohon gebang

Pohon gebang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, daunnya bisa dimanfaatkan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti topi, tikar dan sebagainya, serta bijinya bisa digunakan untuk membuat tasbih dan bantalan tempat duduk di atas kursi/jok mobil sedangkan secara ekologi, pohon gebang berfungsi sebagai tempat habitat berbagai satwa terutama burung

Kangkareng Perutputih (*Anthracoseros albirostris*), Julang Emas (*Aceros undulatus*), dan Gagak Hutan (*Cervus encha*), serta berbagai jenis burung pemakan biji lainnya yang memanfaatkan bijinya untuk dimakan. Pada saat musim kemarau, Taman Nasional Baluran sering terjadi kebakaran hutan. Semua pegawai Taman Nasional Baluran terutama Polhut (Polisi Hutan) dan PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) secara bersama-sama ikut memadamkan kebakaran hutan. Selain *jet shooter*, pelepah daun gebang juga bisa dimanfaatkan sebagai alat pemadam kebakaran dengan membuatnya seperti gepyok (Toha, 2011).

i) *Azadiracha Indica Juss.*

Tumbuhan dengan nama latin *Azadirachta Indica Juss.* ini banyak dipergunakan sebagai obat-obatan tradisional sampai pestisida alami oleh kalangan tertentu, karena terbukti dapat mengurangi perkembangbiakan populasi hama. Penggunaan tanaman mimbo ini tidak saja dikenal dikalangan masyarakat Indonesia saja, di Negara India tumbuhan ini dilindungi undang-undang karena dipercaya oleh masyarakat suku India primitif sebagai pohon dewa karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Seperti penderita penyakit kulit kusta/lepra, India primitif mengasingkan penderita untuk tinggal dibawah pohom mimbo, minum dan mandinya selalu dicampur daun mimbo sampai penderita dinyatakan sembuh oleh kepala sukunya. Di Taman Nasional Baluran yang mempunyai keluasan wilayah \pm 25.000 ha, dapat dengan mudahnya menemukan tumbuhan mimbo, yang tersebar dari wilayah SPTN Wilayah I Bekol sampai SPTN Wilayah II Karangtekok, karena sebarannya yang begitu luas, yang juga termasuk tumbuhan *endemic* Taman Nasional Baluran (Siswandi, 2011).

2.3 Teori Partisipasi

Secara harfiah, untuk seseorang “berpartisipasi” berarti “ambil bagian dalam” atau “terlibat dalam”. Dalam hal ini, segala sesuatu yang orang lakukan merupakan “partisipasi”. Jadi definisi literal semacam ini tidak banyak membantu menginformasikan penyuluh tentang bagaimana “melibatkan” pemangku kepentingan dalam proses inovasi (Leeuwis, 2009). Menurut Sambroek dan Eger dalam Rianse (2010), partisipasi merupakan suatu proses dimana seluruh pihak terkait (*stakeholder*) secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Keterlibatan semua kelompok tidak selalu berarti secara fisik terlibat, tetapi yang penting adalah prosedur pelibatan menjamin seluruh pihak dapat terwakili kepentingannya. Partisipasi dalam pembangunan pedesaan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana caranya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan beberapa sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi/kegiatan tertentu, bagian manfaat dari program pembangunan, dan/atau keterlibatan masyarakat dalam upaya evaluasi program. Oleh karena itu, pengukuran partisipasi dilakukan dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemeliharaan/pemanfaatan hasil kegiatan.

Banyak prinsip normatif yang harus dilekatkan selama proses partisipatif Chambers (1994) dalam Leeuwis (2009) yaitu:

1. Semua pemangku kepentingan yang relevan harus dilibatkan dalam proses partisipatif
2. Partisipan harus memiliki kesempatan sama untuk berbicara
3. Partisipan perlu mampu berbicara dengan bebas
4. Perspektif *multiple* (termasuk nilai, kepentingan, pengetahuan lokal dan kebutuhan) pemangku kepentingan harus dijelajahi dan dipertimbangkan
5. Kepemilikan membutuhkan istirahat dengan partisipan sebanyak mungkin
6. Partisipasi harus menuju pada “pemberdayaan” partisipan

7. Kekuatan yang menyeimbangkan di antara pemangku kepentingan perlu diralat sejauh mungkin
8. Proses partisipatif harus fleksibel dan khusus konteksnya
9. Proses partisipatif harus maju berdasarkan persetujuan gabungan dan saling menghormati.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) terhadap keseluruhan proses kegiatan pembangunan, mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi dan pengawal pembangunan sampai pemanfaatan hasil (Cohen dan Uphoff 1977 dalam Rianse, 2010).

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi seluruh.

- c. Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat pembangunan.

Banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara *material benefit* dan *social benefits*. *Material benefits* dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan *social benefits* seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan, fasilitas transportasi.

d. Partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff, membedakan tiga jenis evaluasi yaitu *Project Contered Evaluation*, bila evaluasi ini dipandang sebagai proses evaluasi formal, sedangkan dalam *Political Activities* berkaitan dengan pemilihan anggota-anggota parlemen rakyat setempat atau pemimpin setempat. *Public Opinion Efforts*, opini publik dalam mengevaluasi suatu program tidak secara langsung, melainkan mempengaruhi melalui media massa/surat kabar. Misal : melalui surat pembaca dalam mengungkapkan beberapa gagasan (Cohen dan Uphoff (1977) dalam Prayitno, dkk (2009)).

Dalam penelitian ini, teori partisipasi yang digunakan adalah menurut Cohen dan Uphoff (1977). Hal ini dikarenakan pendapat Cohen dan Uphoff (1977) dalam partisipasi berdasarkan pada tahapan pembangunan dimulai dari perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut akan dapat menilai partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan, dan dapat diketahui bahwa masyarakat terlibat dalam semua tahapan pembangunan atau tidak. Jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di berbagai tahapan , maka akan menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial; (2) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional; (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak lepas dari hubungan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting artinya proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat.

Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Suhendar (2011) mengatakan bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, yaitu yang diberikan partisipan dalam anjangsono, pendapat, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yaitu yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yaitu yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yaitu yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri,
- e. Partisipasi sosial, yaitu yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat, dan kondangan.

Menurut Nanang (2004) dalam Rianse (2010), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan sedikitnya 6 (enam) tolok ukur yang menjadi prasyarat agar suatu partisipasi dapat disebut “partisipasi yang sesungguhnya” atau partisipasi tertinggi. Keenam tolok ukur tersebut diantaranya adalah: (1) adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumber daya hutan oleh warga; (2) adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan; (3) adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) anatar pihak yang berkepentingan terhadap hutan; (4) adanya keputusan kampung yang dibuat oleh warga kampung tanpa tekanan pihak manapun; (5) adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumber daya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadinya perselisihan dan pengadaan penyelesaian perselisihan secara adil; dan (6) adanya kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola hutan.

Arnstein (1969) dalam Im (2002) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat tipologinya yang dikenal dengan “Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat” (*Eight rungs on the ladder of citizen participation*), yaitu:

1. *Manipulation*

Dengan mengatasnamakan partisipasi masyarakat diikutkan sebagai “stempel karet” dalam badan penasehat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.

2. *Therapy*

Pada tingkat *therapy* atau pengobatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Pemegang kekuasaan menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukannya menemukan penyebab lukanya.

3. *Informing*

Dengan memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi. Namun, pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitaan, pamflet dan poster.

4. *Consultation*

Meminta pendapat masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jajak pendapat, pertemuan warga, dan dengar pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah merupakan suatu partisipasi palsu. Masyarakat pada dasarnya hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasinya hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian perlibatan masyarakat.

5. *Placation*

Masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan memberikan masukan atau mengusulkan rencana tetapi pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan. Salah satu strateginya adalah dengan memilih masyarakat miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggung jawab dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka mereka akan dengan mudah dikalahkan dan diakali.

6. *Partnership*

Pada tingkat *Partnership*, kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan ditentukan dengan melalui mekanisme *take and give*, sehingga diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. *Partnership* dapat berjalan efektif apabila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisasi, pemimpinnya bertanggungjawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya serta adanya sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. Dengan demikian, pada tingkatan

Partnership, masyarakat benar-benar telah memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat akan mempengaruhi suatu perencanaan.

7. *Delegated Power*

Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat menduduki mayoritas kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya tetapi dengan mengadakan proses tawar-menawar.

8. *Citizen Control*

Pada tingkat ini masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program-program atau kelembagaan diberikan kepada mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga akan mengadakan perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

Berdasarkan delapan tangga partisipasi tersebut, Arnstein mengelompokkannya lagi menjadi tiga tingkat, yaitu:

- a. *Nonparticipation*
- b. *Degree of tokenism*, dan
- c. *Degree of citizen power*

Tingkatan terendah adalah *manipulation* dan *therapy* yang dideskripsikan sebagai *non-participation* atau tiadanya partisipasi. Pada tingkatan ini tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam merencanakan maupun melaksanakan program. Pemegang kekuasaan mendikte masyarakat dimana tidak ada dialog diantara mereka. Tingkatan tiga, empat dan lima merupakan peningkatan pada level tokenism atau partisipasi semu yang memungkinkan masyarakat yang semula tidak didengarkan menjadi didengarkan dan memiliki suara. Ada tindakan dari

masyarakat untuk mulai terlibat dalam partisipasi. Namun pada tingkatan ini, tidak ada jaminan bahwa suara mereka akan didengarkan oleh pemegang kekuasaan. Pada tingkatan *citizen power* atau terdapat partisipasi aktif, masyarakat dapat bermitra dengan pemegang kekuasaan yang memungkinkan mereka bernegosiasi. Jika tingkat partisipasi diperdalam hingga level tertinggi yaitu *citizen control*, masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan. Tingkatan partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi dengan mengkaji darimana asal partisipasi apakah dari pemerintah, masyarakat ataukah bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

8	Citizen control	}	Degrees of Citizen Power
7	Delegation power		
6	Partnership		
5	Placation	}	Degrees of Tokenism
4	Consulting		
3	Informing		
2	Therapy	}	Non-Participation
1	Manipulation		

Gambar 2.1 Anak Tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)

2.4 Analisis Korelasi

Menurut Yusri (2009), teknik statistik tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih dinamakan teknik korelasi. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat atau kadar hubungan yang berkaitan dengan data kuantitatif dinamakan koefisien korelasi. Analisis korelasi ini akan menjelaskan derajat atau kadar hubungan satu variabel dihubungkan dengan variabel lain. Hubungan tersebut merupakan derajat atau kadar hubungan yang akan diketahui tingkat keterikatan atau keterikatan nilai dari satu variabel yang dihubungkan dengan nilai variabel lain.

Korelasi Rank Spearman adalah salah satu metode untuk menganalisis suatu hubungan. Korelasi Rank Spearman dipergunakan untuk mengorelasikan kedua variabel yang datanya berskala ordinal atau data jenjang. Apabila data yang dimiliki peneliti berupa skala interval atau rasio maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam peringkat atau urutan rangking (Widiyanto, 2013). Metode ini untuk mengukur asosiasi antara dua variabel di mana kedua variabel tersebut paling tidak diukur dengan skala ordinal sehingga obyek yang diteliti dapat dirangking dalam dua seri urutan ranking (Imam, 2002).

2.5 Analisis Medan Kekuatan (*Force Field Analysis*)

Sckhain (1988) dalam Sianipar dan Entang (2003) menjelaskan analisis medan kekuatan adalah suatu alat yang tepat digunakan dalam merencanakan perubahan. Hanya organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tetap eksis, maju dan berkembang. Organisasi harus terus menerus melakukan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Individu berintegrasi melakukan perubahan-perubahan atau membuat diversifikasi agar selalu sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dalam menciptakan perubahan ada dua kondisi yang harus diperhatikan pimpinan, yakni yang mendorong dan menghambat perubahan.

Force Field Analysis (FFA) digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong dan faktor-faktor dilapangan yang dapat menopang terhadap solusi permasalahan, sehingga hal-hal yang positif dapat diaplikasikan dan yang negatif dapat dihilangkan atau dikurangi. Cara melakukan FFA adalah:

1. Mengemukakan semua hal yang “positif” dan yang “negatif” dari suatu situasi sehingga keduanya dapat dibandingkan dengan mudah.
2. Memaksa orang untuk memikirkan bersama tentang semua aspek dari satu perubahan yang diinginkan.
3. Memberanikan orang untuk menyetujui faktor-faktor prioritas yang terkait dengan perubahan pada kedua sisi neraca (positif dan negatif).
4. Memberi semangat yang refleksi yang tulus dari hal-hal yang nyata yang menopang permasalahan dan solusinya (Suparta, 2007).

2.6 Kerangka Pemikiran

Taman nasional adalah suatu kawasan konservasi sumberdaya alam atau kawasan pelestarian alam yang pengelolaannya menggunakan sistem zonasi. Pengelolaan tersebut untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Taman Nasional Baluran merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Selain savana yang terkenal, Taman Nasional Baluran juga mempunyai ekosistem mangrove dan terumbu karang. Taman ini merupakan bagian terkering di pulau jawa dengan rata-rata curah hujan kurang dari 1.000 mm/tahun. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Taman Nasional Baluran ini mendatangkan banyak turis lokal maupun turis asing karena tertarik dengan kekayaan alam yang ada di Taman Nasional Baluran. Selain mendatangkan dampak positif dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Taman Nasional Baluran dengan, dampak negatifnya adalah ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam di taman nasional. Oleh karena itu, pengelolaan taman nasional harus dilakukan dengan baik agar kawasan tetap lestari.

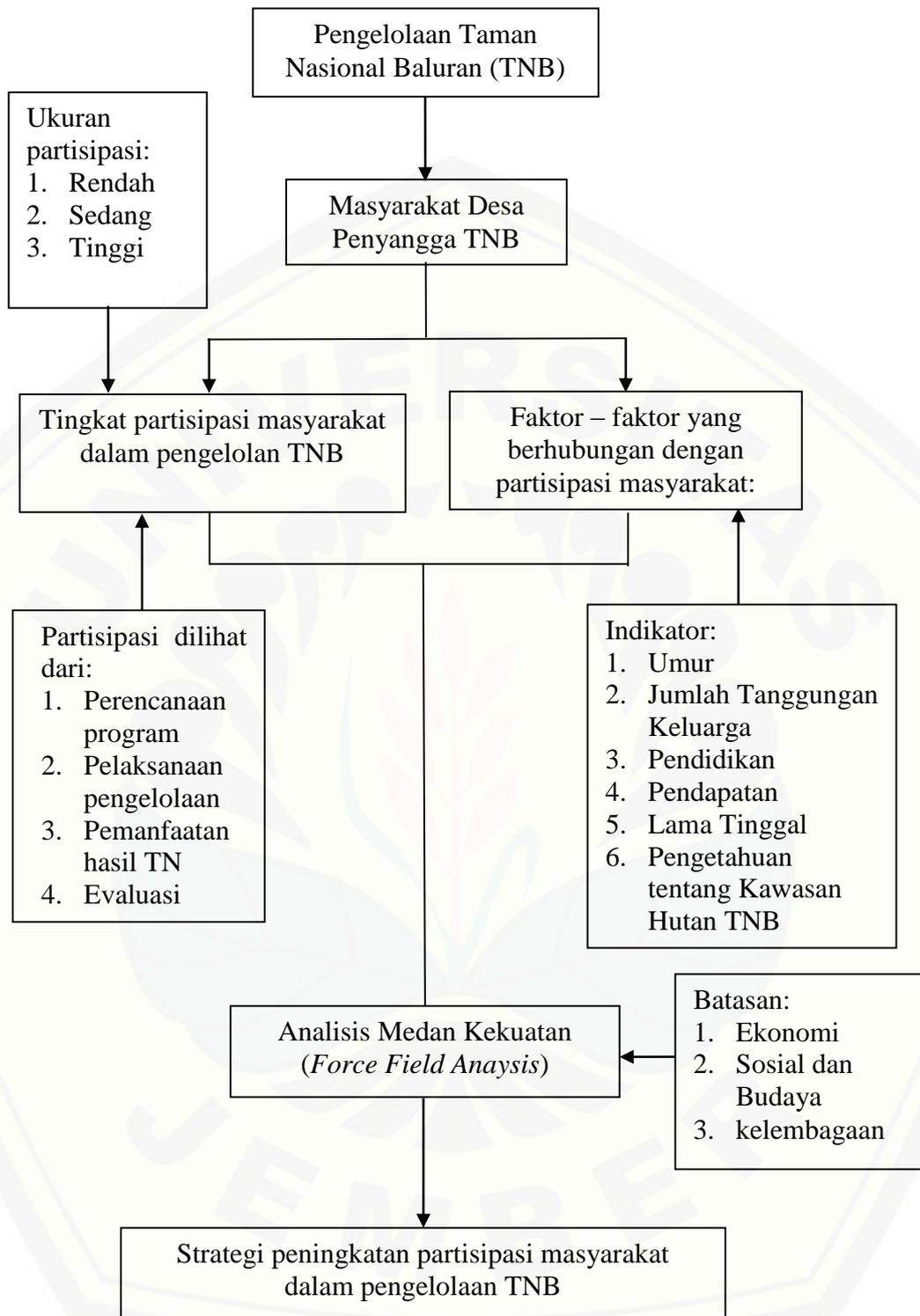
Pengelolaan Taman Nasional Baluran bukan hanya merupakan tanggung jawab pihak Balai Taman Nasional Baluran tetapi pihak-pihak lain yang terkait seperti masyarakat desa penyangga yang merupakan masyarakat yang tinggal disekitar taman nasional. Desa penyangga di Taman Nasional Baluran yaitu Desa Wonorejo, Sumberanyar, dan Sumberwaru. Ketiga desa tersebut merupakan desa terdekat dengan Taman Nasional Baluran yang berada di kabupaten Situbondo. Masyarakat desa penyangga yaitu masyarakat yang hidup di sekitar Taman Nasional Baluran yang mayoritas kehidupan ekonomi masyarakat bergantung kepada sumber daya alam di Taman Nasional Baluran. Sebagian besar masyarakat desa penyangga selain bekerja menjadi petani atau buruh tani, masyarakat juga menjadi pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu. Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) adalah sumberdaya alam di taman nasional yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, tetapi dalam pengambilannya tidak boleh merusak hutan. HHNK yang dimiliki oleh Taman Nasional Baluran seperti kroto, asem, biji akasia, ikan, gebang madu, kayu bakar, rumput, rambanan dan gadung.

Cohen dan Uphhoff (1977) dalam Rianse (2010) menjelaskan partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) terhadap keseluruhan proses kegiatan pembangunan, mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi dan pengawal pembangunan sampai pemanfaatan hasil. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah banyak dilakukan. Akan tetapi hasil dari yang diharapkan masih jauh dari kata puas. Sebagian besar hasil yang didapatkan partisipasi dari masyarakat masih tergolong rendah, sehingga keberhasilan dari program dapat dikatakan kurang berhasil. Melihat kondisi seperti ini, peneliti tertarik untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan Taman Nasional Baluran, yaitu dengan cara melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat terutama para pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan taman nasional. Hal ini dikarenakan peran aktif masyarakat akan sangat membantu untuk melestarikan kawasan hutan di Taman Nasional Baluran. Partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan ide, tenaga, kehadiran atau harta benda. Bentuk partisipasi masyarakat desa penyangga seperti ikut dalam kegiatan ekowisata dan ikut mengamankan hutan di Taman Nasional Baluran dalam kegiatan pencurian dan kebakaran hutan. Namun demikian, masyarakat yang ikut berpartisipasi masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat. Selain itu hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena masyarakat tidak dilibatkan dalam keseluruhan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Taman Nasional Baluran. Tahapan partisipasi yang dapat diikuti oleh masyarakat diantaranya adalah dalam perencanaan program, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut akan menjelaskan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran termasuk dalam kategori tinggi, sedang atau rendah pada setiap tahapan partisipasi.

Partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian Aprianto (2008) yang berjudul “Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi warga Kampung Rajawali dalam pengelolaan lingkungannya yaitu lama tinggal. Hasil laporan penelitian Demartoto (2009) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Alam Air Terjun Jumog, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah” menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah pendidikan formal responden, pengetahuan tentang sejarah Air Terjun Jumog, dan penghasilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2011) yang berjudul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan terhadap Sistem PHBM di Perum Perhutani” dijelaskan bahwa terdapat faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa sekitar hutan dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Faktor tersebut meliputi umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga dan pendapatan.

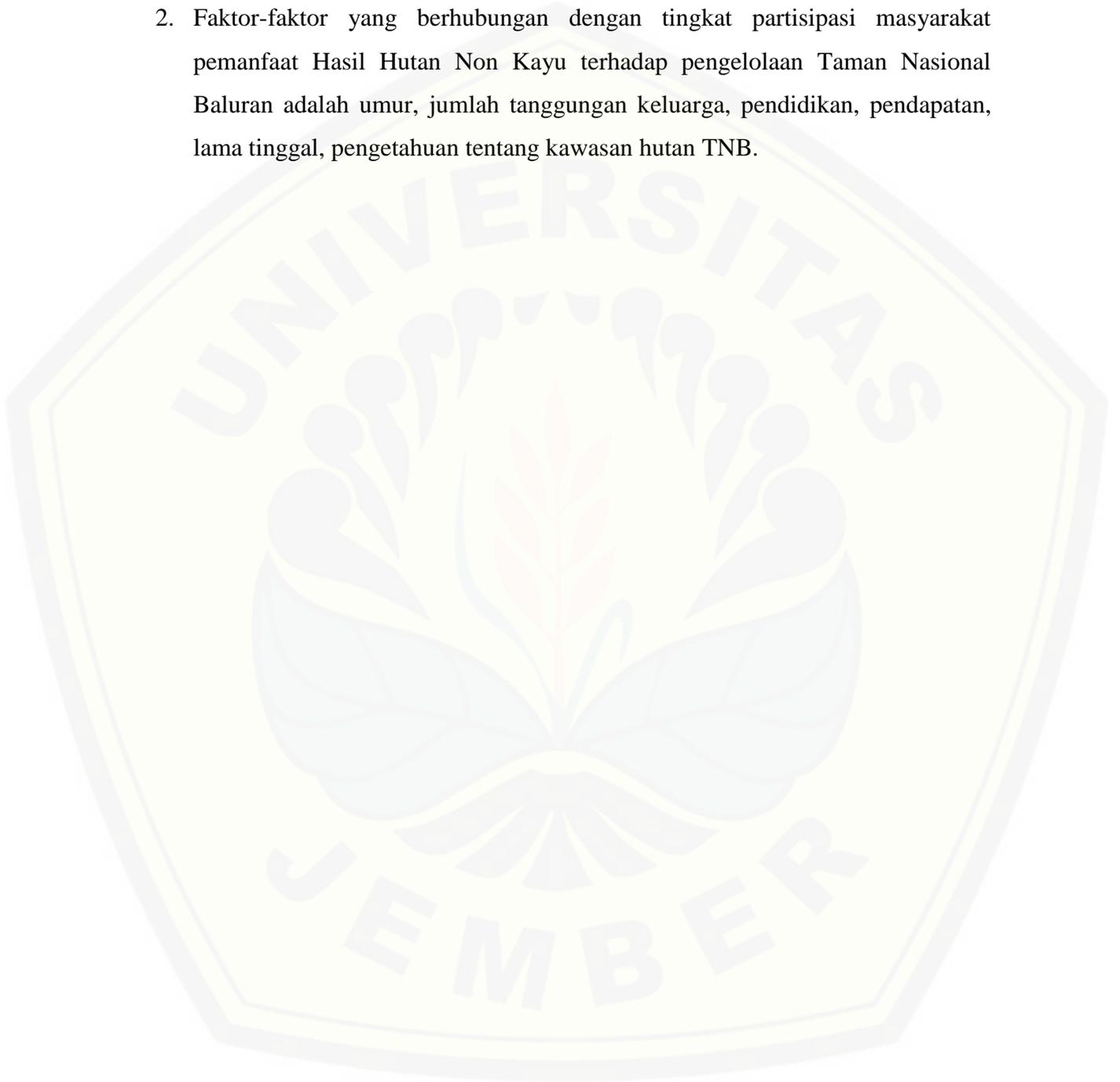
Setelah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran akan dirumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Perumusan strategi tersebut menggunakan analisis FFA (*Force Field Analysis*) atau analisis medan kekuatan. Analisis FFA (*Force Field Analysis*) ini menggunakan faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor pendukung masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 3 aspek yaitu Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kelembagaan. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini adalah adanya strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran agar tetap terjaga kelestariannya. Hubungan variabel-variabel diatas dapat digambarkan dengan skema kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

2.7. Hipotesis

1. Tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah rendah.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang kawasan hutan TNB.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Nasional Baluran yang terletak di tiga desa di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Tiga desa tersebut adalah Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru dan Desa Sumberanyar. Daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive Method*). Pemilihan daerah penelitian ini karena (1) Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru dan Desa Sumberanyar merupakan desa penyangga di Taman Nasional Baluran dan; (2) Desa yang mempunyai jarak terdekat dengan Taman Nasional Baluran.

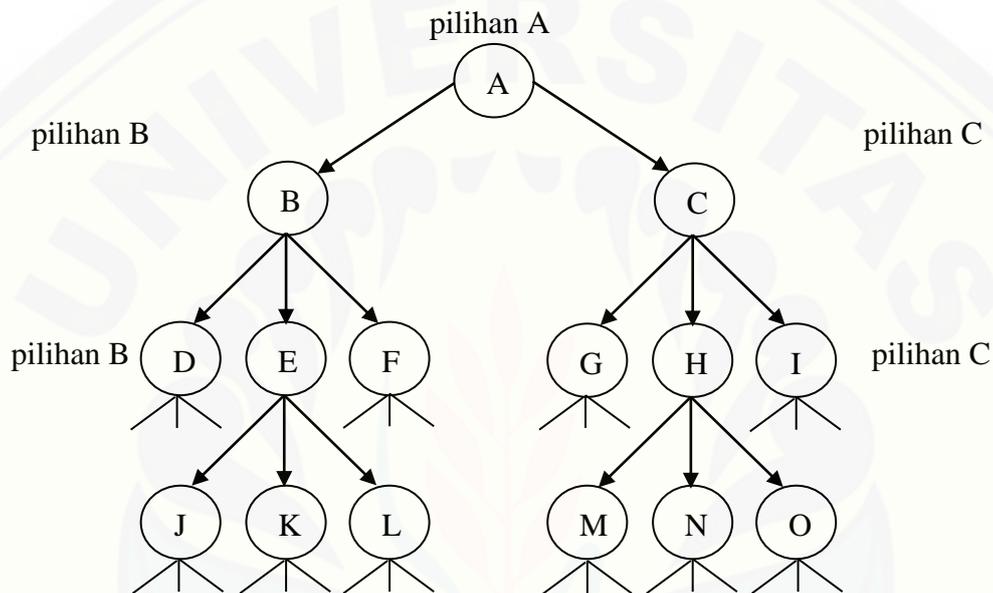
3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, analitis dan korelasi. Metode deskriptif bertujuan untuk pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki, untuk mendapatkan kebenaran menerangkan hubungan dan menguji hipotesis sehingga memperoleh makna dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode analitis berfungsi menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi lebih dalam terhadap suatu masalah (Nazir, 2005). Analisis korelasi akan menjelaskan derajat atau kadar hubungan satu variabel dihubungkan dengan variabel lain. Hubungan tersebut merupakan derajat atau kadar hubungan yang akan diketahui tingkat keterkaitan atau keterkaitan nilai dari satu variabel yang dihubungkan dengan variabel lain (Yusri, 2009).

3.3 Metode Pengambilan Contoh

Pengambilan sampel untuk tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dilakukan kepada masyarakat desa penyangga hutan yang memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu di Taman Nasional Baluran adalah menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil,

kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Teknik pengambilan sampel ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 *Snowball Sampling*

Subjek penelitian ini adalah masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu di desa penyangga yang terdiri dari 3 desa yaitu Desa Wonorejo, Sumberwaru dan Sumberanyar. Subjek dalam penelitian ini disebut informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Awalnya peneliti akan mendapatkan informasi dari informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak balai yang mengetahui informasi pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dan yang terlibat dalam lembaga disekitar penyangga. Kemudian mengarah kepada nama-nama masyarakat di masing-masing desa di desa penyangga. Bila informasi yang diperoleh masih kurang, maka peneliti akan mencari informan lagi yang merupakan pilihan atau petunjuk dari informan sebelumnya. Sedangkan

pengambilan sampel yang digunakan untuk strategi peningkatan partisipasi masyarakat yaitu dengan mengambil informasi dari *key informan* yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional. *Key informan* tersebut diantaranya adalah kepala resort di Taman Nasional Baluran dan tokoh masyarakat di desa penyangga Taman Nasional Baluran. Kepala Resort yang dipilih diantaranya Kepala Resort Karangtekok dan Kepala Resort Perengan. Pemilihan kepala resort sebagai *key informan* adalah untuk merumuskan strategi berdasarkan sudut pandang pihak Taman Nasional Baluran. Tokoh masyarakat yang dipilih diantaranya ketua SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) di Desa Wonorejo dan Desa sumberwaru-Sumberanyar. SPKP di Desa Sumberwaru dan Sumberanyar menjadi satu. Pemilihan tokoh masyarakat sebagai *key informan* adalah untuk merumuskan strategi berdasarkan sudut pandang masyarakat.

Tabel 3.1 Responden Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

No	<i>Key Informan</i>	Jumlah
1	Kepala Resort di Taman Nasional Baluran	2
2	Tokoh masyarakat di desa penyangga Taman Nasional Baluran	2

Sumber: Data Primer diolah, 2014

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada jenis data yang diperlukan (Anandya dkk, 2004) yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapat oleh seorang peneliti untuk kepentingan serta tujuan penelitiannya. Jadi, disebut juga data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara menggunakan kuisioner, observasi dan foto hasil pengamatan (dokumenter).
2. Data sekunder, adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan maupun laporan lembaga atau instansi yang terkait seperti data dari Kementerian Kehutanan, dan arsip Taman Nasional Baluran, profil Desa Wonorejo, Sumberwaru, dan Sumberanyar.

3.5 Metode Analitis Data

Pengujian hipotesis pertama, yaitu tentang tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran, dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan perhitungan skor dari jawaban responden hasil menggunakan teknik skala likert. Menurut Nazir (2009), skala likert adalah suatu skala yang hanya menggunakan *item* yang secara pasti baik dan secara pasti buruk, tidak dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, espons yang netral, dan ranking lain diantara dua sikap yang pasti diatas. *Item* yang pasti disenangi, disukai, yang baik, diberi tanda negatif (-). Skor responden dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor, dan total skor inilah ditafsirkan sebagai posisi responden dalam skala Likert.

Menurut Sugiyono (2009), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Analisa dilakukan terhadap indikator tingkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Indikator-indikator partisipasi tersebut kemudian dibagi menjadi sub indikator dengan rentang skor 1-3, dengan kategori skor 1 menunjukkan kurang, skor 2 apabila menunjukkan kadang-kadang, dan skor 3 menunjukkan sering. Dibawah ini adalah indikator-indikator tingkat partisipasi dari berbagai tahapan yaitu:

1. Perencanaan
 - a) Kegiatan survei lapangan (skor 1-3).
 - b) Kegiatan pemberian informasi (skor 1-3).
 - c) Pengajuan usul, saran dan pendapat (skor 1-3)
 - d) Pembuatan rencana kegiatan program (skor 1-3)
 - e) Penentuan aktifitas program (skor 1-3)

2. Pelaksanaan

- a) Terlibat pelaksanaan program (skor 1-3)
- b) Pemberian sumbangan pikiran (skor 1-3)
- c) Pemberian sumbangan tenaga (skor 1-3)
- d) Pemberian sumbangan materi (skor 1-3)
- e) Pemberian sumbangan kehadiran (skor 1-3)
- f) Melindungi kawasan dari kebakaran (skor 1-3)
- g) Melindungi kawasan dari perburuan (skor 1-3)
- h) Melindungi kawasan dari pencurian SDA (skor 1-3)
- i) Mengatasi bencana alam (skor 1-3)

3. Pemanfaatan Hasil

- a) Peningkatan pendapatan keluarga (skor 1-3).
- b) Manfaat hutan terhadap lingkungan (skor 1-3).
- c) Pemanfaatan hasil hutan (skor 1-3)
- d) Ketergantungan terhadap taman nasional (skor 1-3).

4. Evaluasi

- a) Monitoring dan evaluasi program (1-3)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dalam bentuk ordinal yang akan dibagi menjadi 3 kriteria yaitu tinggi, sedang dan rendah. Perhitungan tingkat partisipasi dilakukan melalui tabulasi skor partisipasi. Hasil tabulasi yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menentukan kriteria pengambilan keputusan dengan menentukan batasan skor pada masing-masing kriteria. Penentuan batasan skor pada masing-masing kriteria digunakan rumus sebagai berikut (Nazir, 2009).

$$i = \frac{R}{k}$$

Keterangan:

i : interval

R : range (nilai tertinggi – nilai terendah)

k : jumlah kelas

Dari rumus tersebut dapat diperoleh:

$$\begin{aligned} i &= \frac{(19 \times 3) - (19 \times 1)}{3} \\ &= 12,67 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Kriteria pengambilan keputusan tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (hhnk) di desa penyangga Taman Nasional Baluran yaitu:

1. Tingkat partisipasi petani rendah (skor 19-31)
2. Tingkat partisipasi petani sedang (skor 32-44)
3. Tingkat partisipasi petani tinggi (skor 45-57)

Pengujian hipotesis kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dapat dianalisis menggunakan analisis korelasi *Rank Spearman* yang didukung dengan program SPSS dengan rumus sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

r_s = koefisien korelasi *Rank Spearman*

d = perbedaan antara pasangan jenjang (selisih)

n = banyaknya pasangan rank

Besarnya koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, besarnya koefisien korelasi berkisar diantara -1 sampai dengan +1. Bentuk atau arah hubungan diantara variabel dinyatakan dalam positif (+) dan negatif (-). Jika koefisien korelasi bernilai nol (0) memiliki arti bahwa variabel-variabel tidak menunjukkan hubungan. Berikut ini Tabel 3.2 untuk menentukan kekuatan hubungan di antara variabel.

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Nilai	Kekuatan Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah atau lemah sekali
0,200-0,399	Rendah atau lemah
0,400-0,599	Sedang atau cukup
0,600-0,799	Tinggi atau kuat
0,800-1,000	Sangat tinggi atau kuat sekali

Sumber: Widiyanto, 2013

Hasil perhitungan r_s perlu diuji untuk mengetahui tingkat signifikannya. Pengujian r_s bergantung pada jumlah n dan taraf nyatanya. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Penentuan formulasi hipotesis

$H_0 : r_s=0 \rightarrow$ Tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dengan variabel umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang kawasan hutan TNB.

$H_1 : r_s \neq 0 \rightarrow$ Terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dengan variabel umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang kawasan hutan TNB.

2. Penentuan kriteria pengujian

- a. Probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara variabel umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang kawasan hutan TNB dengan partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.
- b. Probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang kawasan hutan Taman Nasional Baluran dengan partisipasi masyarakat pemanfaat HHNK dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Pengujian permasalahan pertama, yaitu tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dapat dianalisis menggunakan analisis medan kekuatan. Sckhain (1988) dalam Sianipar dan Entang (2003) menjelaskan analisis medan kekuatan adalah suatu alat yang tepat digunakan dalam merencanakan perubahan. Hanya organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan

perubahan lingkungan yang tetap eksis, maju dan berkembang. Organisasi harus terus menerus melakukan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Individu berintegrasi melakukan perubahan-perubahan atau membuat diversifikasi agar selalu sesuai dengan tuntutan lingkungan. Merubah tingkah laku dan memanfaatkan energi individu dalam memenuhi tuntutan lingkungan. Dalam menciptakan perubahan ada dua kondisi yang harus diperhatikan pimpinan, yakni yang mendorong dan menghambat perubahan. Berikut ini adalah tahapan-taapan menggunakan analisis medan kekuatan (FFA):

1. Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dan penghambat bersumber dari internal dan eksternal. Faktor pendorong merupakan perpaduan dari *strengths* dan *opportunities*, sedangkan faktor penghambat merupakan perpaduan *weaknesses* dan *threats*.

2. Penilaian Faktor Pendorong dan Penghambat

Aspek yang dinilai, yaitu menentukan faktor keberhasilan kinerja, maka perlu dilakukan penilaian terhadap setiap faktor yang teridentifikasi. Aspek yang dinilai dari tiap faktor, yaitu:

- a) Urgensi atau bobot faktor dalam mencapai tujuan
- b) Dukungan atau kontribusi tiap faktor dalam mencapai tujuan
- c) Keterkaitan antara faktor dalam mencapai tujuan

Tabel 3.3 Tingkat Urgensi Antar Faktor

No	Faktor-faktor	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					Nilai Urgensi (NU)
		D1	D2	D3	D4	D%	
1	D1						
2	D2						
3	D3						
4	D4						
5	D5						
Total Nilai Urgensi (TNU)							

Penelitian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan secara kualitatif yang dikuantitatifkan melalui metode skala *Likert* yaitu, suatu penilaian dengan model *rating scale* yang selanjutnya disebut model skala nilai kemudian dikonversikan dalam angka, yaitu:

Sangat baik	= 5, artinya sangat tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
Baik	= 4, artinya tinggi nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
Cukup	= 3, artinya cukup nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
Kurang	= 2, artinya kurang nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan
Sangat kurang	= 1, artinya sangat kurang nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan.

Langkah selanjutnya untuk penilaian faktor pendorong dan penghambat, yaitu:

a. NU (Nilai Urgensi)

Penilaian NU (Nilai Urgensi) dilakukan dengan memakai model *rating scale* dari 1-5 atau melalui teknik komparasi, yaitu membandingkan faktor yang paling urgen atau satu faktor dengan faktor lainnya.

b. BF (Bobot Faktor)

Penilaian BF (Bobot Faktor) dapat dinyatakan dalam bilangan desimal atau presentase. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan nilai BF:

$$BF = \frac{NU}{B \sum NU} \times 100\%$$

c. ND (Nilai Dukungan)

ND (Nilai Dukungan) ditentukan dengan *brainstorming* melalui wawancara dengan responden.

d. NBD (Nilai Bobot Dukungan)

NBD (Nilai Bobot Dukungan) dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$NBD = ND \times BF$$

e. NK (Nilai Keterkaitan)

Nilai keterkaitan ditentukan berdasarkan keterkaitan antara faktor pendorong dan penghambat. Nilai keterkaitan tiap faktor menggunakan rentang nilai antara 1-5, apabila tidak memiliki keterkaitan diberi nilai 0, sedangkan faktor-faktor yang memiliki keterkaitan diberi nilai antara 1-5.

f. TNK (Total Nilai Keterkaitan)

TNK diperoleh dari jumlah total nilai keterkaitan antara faktor pendorong dan penghambat dalam satu baris.

g. NRK (Nilai Rata-rata Keterkaitan)

Nilai rata-rata keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus:

$$NRK = \frac{TNK}{\sum N-1}$$

Keterangan:

TNK : Total nilai keterkaitan

$\sum N$: Jumlah faktor pendorong dan penghambat yang dinilai

h. NBK (Nilai Bobot Keterkaitan)

Nilai bobot keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus:

$$NBK = NRK \times BF$$

i. TNB (Total Nilai Bobot)

Total nilai bobot tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus:

$$TNB = NBD \times NBK$$

3. Faktor Kunci dan Keberhasilan dan Diagram Medan Kekuatan

a. Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Berdasarkan besarnya TNB pada tiap-tiap faktor maka dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai faktor kunci keberhasilan (FKK) yang dapat dijadikan sebagai penentuan strategi atau solusi adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Cara menentukan FKK adalah sebagai berikut:

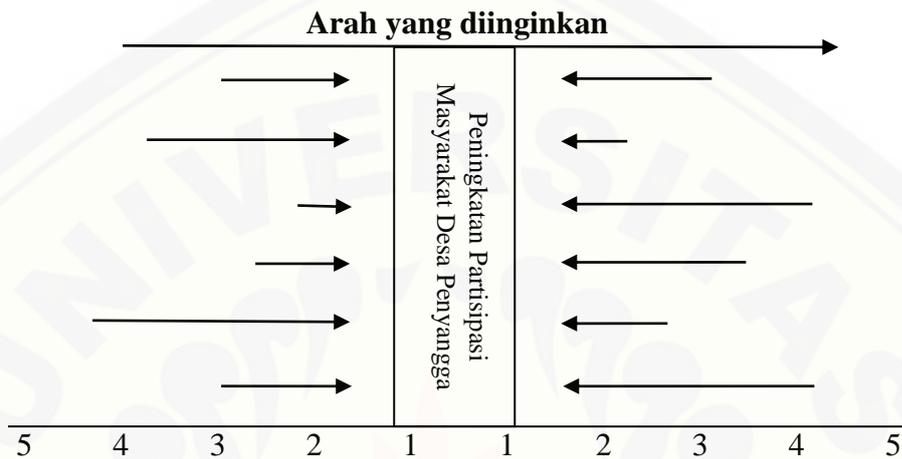
- 1) Dipilih berdasarkan TNB yang terbesar
- 2) Jika TNB sama maka dipilih NBD terbesar
- 3) Jika BF sama maka dipilih NBD terbesar
- 4) Jika NBD sama maka dipilih NBK terbesar
- 5) Jika NBK sama maka dipilih berdasarkan pengalaman dan rasionalitas.

Terdapat batasan-batasan dalam menentukan faktor pendorong dan penghambat. Batasan-batasan ini dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Ekonomi
- 2) Sosial dan Budaya
- 3) Kelembagaan.

b. Diagram Medan Kekuatan

Berdasarkan besarnya nilai TNB tiap faktor pendorong dan penghambat dapat ditunjukkan dalam suatu diagram yang bernama diagram medan kekuatan dengan kondisi yang dicapai adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.



Gambar 3.2 Diagram Medan Kekuatan

4. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Baluran dapat diwujudkan apabila tahapan penilaian sudah terlaksana dan dari nilai tersebut dapat diketahui strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Penyusunan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari nilai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) yang paling tinggi untuk faktor pendorong dan faktor penghambat. Penyusunan strategi peningkatan dapat diketahui dengan fakta yang terjadi di lapang selama proses pengelolaan berlangsung seperti yang tergambar dalam diagram medan kekuatan. Apabila telah diketahui faktor kunci pendorong tentu akan lebih mudah memproyeksikan tujuan rasional dan logis untuk dicapai. Pencegahan resiko kegagalan dapat disusun strategi meminimalisir atau menghilangkan faktor kunci penghambat.

3.6 Definisi Operasional

1. Taman nasional merupakan bagian dari hutan yang termasuk dalam kawasan konservasi atau pelestarian alam.
2. Taman nasional baluran (TNB) adalah kawasan konservasi yang ada di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
3. Desa penyangga adalah desa yang berdampingan dengan Taman Nasional dan berkaitan erat dengan Taman Nasional Baluran yaitu Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru, dan Desa Sumberanyar.
4. Masyarakat desa penyangga adalah masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional dan biasanya sangat bergantung kehidupannya terhadap taman nasional.
5. HHNK adalah Hasil Hutan Non Kayu yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar taman nasional, seperti rencek, gadung, kemiri, madu, rumput, rambanan dan kroto.
6. Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) adalah seseorang yang memanfaatkan atau mengambil HHNK di taman nasional baluran yang dijadikan responden dalam penelitian ini.
7. Responden adalah yang diminta untuk memberikan keterangan tentang sesuatu fakta atau pendapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.
8. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam seluruh proses kegiatan yang bersangkutan.
9. Tingkat partisipasi adalah besarnya waktu yang dikorbankan oleh masyarakat dalam keterlibatan pada suatu kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi kegiatan.
10. Ukuran partisipasi adalah jika jumlah skor = 19-31 dikategorikan rendah, jumlah skor = 32-44 dikategorikan sedang, dan jumlah skor = 45-57 dikategorikan tinggi.
11. Pendidikan yaitu lama responden bersekolah yang dinyatakan dalam tahun.

12. Umur adalah lama hidup responden yang dinyatakan dalam tahun.
13. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan responden.
14. Pendapatan adalah jumlah penerimaan keluarga yang dinyatakan dalam Rupiah per tahun (Rp/tahun).
15. Lama tinggal adalah jumlah tahun responden dalam menetap di tempat tinggalnya sekarang yang dinyatakan dalam tahun.
16. Pengetahuan tentang kawasan hutan adalah wawasan atau pengetahuan yang dimiliki oleh responden mengenai kawasan hutan di TNB.
17. Analisis medan kekuatan adalah suatu alat yang digunakan untuk merumuskan strategi untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan dalam suatu kegiatan.
18. NU (Nilai Urgensi) adalah nilai perbandingan faktor yang paling urgen antara satu faktor dengan faktor lainnya.
19. BF (bobot Faktor) adalah nilai yang dapat dinyatakan dalam bilangan desimal atau presentase.
20. ND (Nilai Dukungan) adalah nilai yang ditentukan melalui wawancara dengan responden yakni pelaku yang terkait dengan partisipasi.
21. NBD adalah (Nilai Bobot Dukungan) adalah nilai yang didapat dari hasil perkalian nilai dukungan dengan bobot faktor.
22. NK (Nilai Keterkaitan) adalah nilai yang ditentukan berdasarkan keterkaitan antara faktor pendorong dan penghambat. Nilai keterkaitan tiap faktor menggunakan rentang nilai antara 1-5. Apabila tidak memiliki keterkaitan diberi nilai 0, sedangkan faktor-faktor yang memiliki keterkaitan diberi nilai antara 1-5.
23. TNK (Total Nilai Keterkaitan) adalah nilai yang ditentukan dari jumlah total nilai keterkaitan antara faktor pendorong dan faktor penghambat dalam satu baris.
24. NRK (Nilai Rata-rata Keterkaitan) adalah nilai yang didapat dari hasil pembagian nilai keterkaitan dengan jumlah faktor pendorong dan penghambat yang dinilai dikurangi dengan satu faktor yang tidak dapat dikaitkan dengan faktor yang sama.

25. TNB (Total Nilai Bobot) adalah nilai yang didapat dari hasil penjumlahan nilai bobot dukungan dengan nilai bobot keterkaitan.
26. FKK (Faktor Kunci Keberhasilan) adalah nilai prioritas dari faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap solusi dari pengelolaan taman nasional.



BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Taman Nasional Baluran (TNB)

Taman Nasional Baluran merupakan kawasan Konservasi Sumberdaya Alam, yang berarti di dalam kawasan Taman Nasional Baluran terdapat pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana, untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan pembangunan konservasi sumberdaya alam yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Taman Nasional Baluran memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora, fauna maupun ekosistemnya, termasuk keindahan panorama alamnya. Ditinjau dari status kawasan, Taman Nasional Baluran memiliki 3 fungsi utama yaitu (1) fungsi Perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) fungsi Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta (3) Pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) beserta ekosistemnya, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, rekreasi dan pariwisata. Maka dari itu tujuan pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran adalah melestarikan SDAH dan ekosistemnya agar dapat memenuhi fungsinya (3P) secara optimal. Sasaran utama pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah SDAH, ekosistem dan kawasannya. Tingginya potensi keanekaragaman hayati dan indahnya panorama alam Baluran, merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk mengunjungi dan menikmatinya.

Taman Nasional Baluran sebagai salah satu kawasan konservasi yang didalamnya memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem memiliki beragam manfaat baik manfaat bersifat *tangible* (dalam pemanfaatan skala terbatas) maupun manfaat yang bersifat *intangibile*, berupa produk jasa

lingkungan, seperti udara bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu yang sama, sehingga diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian sumberdaya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Taman Nasional Baluran memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam, terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Beberapa daerah di Taman Nasional Baluran yang sering dikunjungi wisatawan dan masyarakat untuk berbagai keperluan terutama yang dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata antara lain: Gua Jepang, Curah Tangis, Sumur Tua, *Evergreen Forest*, Bekol, Bama, Manting, Dermaga, Kramat, Kajang, Balanan, Lempuyang, Talpat, Kacip, Bilik, Sejileh, Teluk Air Tawar, Batu Numpuk, Pandean, dan Candi Bang. Adapun wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Baluran meliputi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Dari berbagai obyek wisata yang ada di Taman Nasional Baluran sebagian telah dikembangkan menjadi produk wisata, antara lain Gua Jepang, Curah Tangis, *Visitor Centre*, Candi Bang, Savana Semiang, Savana Bekol, *Evergreen Forest* Bekol, dan Pantai Bama.

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran dibagi menjadi tiga Seksi Konservasi Wilayah, yaitu:

- a. Seksi Konservasi Wilayah I Pandean, meliputi Resort Bitakol dan Perengan
- b. Seksi Konservasi Wilayah II Bekol, meliputi Resort Bama dan Lempuyang
- c. Seksi Konservasi Wilayah III Karangtekok, meliputi Resort Pondok Jaran dan Labuhan Merak

1. Iklim

Taman Nasional Baluran memiliki iklim monsoon dengan musim kemarau yang panjang. Musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan November. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson kawasan Taman Nasional Baluran beriklim kering tipe F dengan temperatur berkisar antara 27,2°C-30,9° C,

kelembaban udara 77 %, kecepatan angin 7 knots dan arah angin sangat dipengaruhi oleh arus angin tenggara yang kuat. Musim hujan pada bulan November-April, sedangkan musim kemarau pada bulan April-Oktober dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari. Namun secara faktual, perkiraan tersebut sering berubah sesuai dengan kondisi global yang mempengaruhi.

2. Geologi dan Tanah

Secara geologi Taman Nasional Baluran memiliki dua jenis golongan tanah, yaitu tanah pegunungan yang terdiri dari jenis tanah aluvial dan tanah vulkanik, serta tanah dasar laut yang terbatas hanya pada dataran pasir sepanjang pantai daerah-daerah hutan mangrove. Tanah vulkanik berasal dari pelapukan basalt, debu vulkanik, batuan vulkanik intermedia yang berbentuk suatu urutan bertingkat dari kondisi tanah yang berbatu-batu di lereng gunung yang tinggi dan curam sampai tanah aluvial yang dalam di dataran rendah. Keadaan tanahnya terdiri dari jenis yang kaya akan mineral tetapi miskin akan bahan-bahan organik, dan mempunyai kesuburan kimia yang tinggi tetapi kondisi fisiknya kurang baik karena sebagian besar berpori-pori dan tidak dapat menyimpan air dengan baik.

Tanah yang berwarna hitam yang meliputi luas kira-kira setengah dari luas dataran rendah, ditumbuhi rumput savana. Daerah ini merupakan daerah yang sangat subur, serta membantu keanekaragaman kekayaan makanan bagi jenis satwa pemakan rumput. Tanah-tanah ini lebih mudah longsor dan sangat berlumpur pada musim penghujan. Sebaliknya pada saat musim kemarau keadaan permukaannya menjadi pecah-pecah dengan patahan sampai mencapai kedalaman 80 cm. Keadaan jenis tanah ini sangat menyulitkan untuk konstruksi jalan, karena selalu terjadi pemuaian dan penyusutan sesuai dengan musim.

3. Hidrologi

Taman Nasional Baluran mempunyai tata air radial, terdapat sungai-sungai besar termasuk sungai Kacip yang mengalir dari kawah menuju Pantai Labuhan Merak, Sungai Klokoran dan Sungai Bajulmati yang menjadi batas Taman Nasional Baluran di bagian Barat dan Selatan. Banyak dasar sungai yang berisi air selama musim penghujan yang pendek, akan tetapi banyak air yang meresap

melalui abu vulkanik yang berpori-pori sampai mencapai lapisan lava yang keras di bawah tanah dan keluar lagi pada permukaan tanah sebagai mata air -mata air pada sumber air di daerah pantai (Popongan, Kelor, Bama, Mesigit, Bilik, Gatal, Semiang dan Kepuh), daerah kaki bukit (sumber air Talpat), pada daerah ujung pantai (teluk Air Tawar) dan air laut (dekat Tanjung Sedano). Pada musim hujan, tanah yang hitam sedikit sekali dapat ditembus air dan air mengalir di permukaan tanah, membentuk banyak kubangan (terutama di sebelah selatan daerah yang menghubungkan Talpat dengan Bama). Pada musim kemarau air tanah di permukaan tanah menjadi sangat terbatas dan persediaan air pada beberapa mata air tersebut menjadi berkurang.

4. Kondisi Flora dan Fauna

Di dalam kawasan ini terdapat sekitar 444 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam 87 familia meliputi 24 jenis tumbuhan eksotik, 265 jenis tumbuhan penghasil obat dan 37 jenis merupakan tumbuhan yang hidup pada ekosistem mangrove. Jenis-jenis yang penting antara lain: Pilang (*Acacia leucophloea* Wild), Mimbo (*Azadiracta indica* A. Juss), Gebang (*Corypha utan* Lamk.), Asam (*Tamara indica* Linn.), Kepuh (*Sterculia foetida* Wall.), Widoro bukol (*Zyziphus jujuba* Lamk.), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Ketapang (*Terminalia catappa* Linn.), Manting (*Syzygium polyanthum*). Secara garis besar keanekaragaman fauna dalam kawasan Taman Nasional Baluran dapat dikelompokkan kedalam ordo mamalia (28 jenis), aves (155 jenis), pisces dan reptilia. Dari jenis-jenis yang diketahui tersebut 47 jenis merupakan satwa yang dilindungi undang-undang yaitu insektivora 5 jenis, karnivora 5 jenis, herbivora 4 jenis, burung 32 jenis dan reptilia 1 jenis.

Mamalia besar yang khas di Taman Nasional Baluran adalah banteng (*Bos javanicus*), kerbau liar (*Bubalus bubalis*), rusa (*Cervus timorensis*), kijang (*Mutiacus muntjak*), babi hutan (*Sus scrova*), macan tutul (*Panthera pardus*), kucing batu (*Felis bengalensis*), kucing bakau (*Felis viverrina*) dan ajag (*Cuon alpinus*). Sedangkan untuk jenis primata adalah kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan lutung / budeng (*Trachypithecus auratus cristatus*). Dari ± 155 jenis burung di Taman Nasional Baluran jenis-jenis yang mudah untuk dijumpai

antara lain adalah merak hijau (*Pavo muticus*), ayam hutan merah (*Gallus gallus*), ayam hutan hijau (*Gallus varius*), kangkareng (*Anthracosceros convexus*) dan rangkong (*Bucherus rhinoceros*).

5. Aksesibilitas

Aksesibilitas ke dan dari Taman Nasional Baluran dapat dikatakan sangat lancar, ini disebabkan adanya jalan raya lintas propinsi yang menghubungkan Pulau Bali dan Banyuwangi dengan Surabaya yang melintasi kawasan Taman Nasional Baluran. Dengan demikian Taman Nasional Baluran dapat dijangkau dengan kendaraan darat dari berbagai kota-kota penting disekitarnya.

6. Desa Penyangga Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran memiliki desa penyangga yang berbatasan langsung dengan taman nasional. Desa penyangga tersebut diantaranya adalah Desa wonorejo, Sumberanyar, dan Sumberwaru. Desa Wonorejo berada di sebelah selatan Taman Nasional Baluran sedangkan Desa Sumberwaru dan Sumberanyar berada di sebelah barat Taman Nasional Baluran (Lampiran M). Desa Sumberwaru dan Sumberanyar awalnya merupakan satu desa, tetapi karena mengalami pemekaran wilayah akhirnya dipecah menjadi dua desa. Sehingga menyebabkan kedua desa ini saling berdekatan. Jarak Desa Wonorejo dengan Desa Sumberanyar dan Desa Sumberwaru sangat jauh yaitu ± 10 km yang dipisahkan dengan hutan jati milik perhutani.

4.2. Gambaran Umum Desa Penyangga

4.2.1. Letak Geografis

1. Desa Sumberwaru

Desa Sumberwaru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang menjadi salah satu desa penyangga dari tiga Desa Penyangga di Taman Nasional Baluran. Desa Sumberwaru terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Krajan, Sidomulyo, Belangguan, Cotek dan Merak. Jarak desa Sumberwaru ke pemerintahan Kecamatan Banyuputih $\pm 3,5$ km dan Jarak desa Sumberwaru ke pemerintahan Kabupaten Situbondo ± 36 km.

Tabel 4.1 Batas-Batas Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

No.	Batas	Desa/Kel	Kecamatan
1	Sebelah utara	Selat Madura	-
2	Sebelah selatan	Desa Wonorejo	Banyuputih
3	Sebelah timur	Selat Madura	-
4	Sebelah barat	Desa Sumberanyar	Banyuputih

Sumber : Profil Desa Sumberwaru, 2012

Desa Sumberwaru memiliki batas-batas wilayah seperti pada Tabel 4.1. pada tabel 4.1 dapat dilihat Desa Sumberwaru berbatasan dengan 2 selat dan 2 desa. Sebelah utara Desa Sumberwaru berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah selatan Desa Sumberwaru berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih. Sebelah timur Desa Sumberwaru berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah barat Desa Sumberwaru berbatasan dengan Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih.

2. Desa Sumberanyar

Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih merupakan salah satu dari tiga desa penyangga Taman Nasional di Kabupaten Situbondo. Desa Sumberanyar memiliki enam dusun, yaitu Dusun Sekarputih, Dusun Curah Temu, Dusun Bindung, Dusun Nyamplung, Dusun Ranurejo, dan Dusun Mimbo. Jarak Desa Sumberanyar sampai ke pusat pemerintahan Kecamatan Banyuputih adalah $\pm 0,2$ Km. Adapun batas-batas administratif dari Desa Sumberanyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Batas-Batas Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012

No.	Batas	Desa/Kel	Kecamatan
1	Sebelah utara	Selat Madura	-
2	Sebelah selatan	Pegunungan Kawah Ijen	-
3	Sebelah timur	Desa Sumberwaru	Banyuputih
4	Sebelah barat	Desa Sumberejo	Banyuputih

Sumber : Profil Desa Sumberanyar, 2013

Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih tidak memiliki wilayah yang langsung berhimpitan dengan Taman Nasional Baluran, namun termasuk daerah penyangga Taman Nasional karena aktivitas ekonomi masyarakat terkait dengan pemanfaatan di kawasan Taman Nasional Baluran. Memiliki luas wilayah menurut penggunaan ± 1.450 Ha/m². Wilayah desa terbagi oleh jalan provinsi,

Dusun Mimbo, Ranurejo dan Nyamplung di sebelah utara jalan provinsi sedangkan Dusun Sekarputih, Curah Temu dan Bindung terletak di sebelah selatan jalan provinsi.

3. Desa Wonorejo

Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih merupakan salah satu dari tiga desa penyangga Taman Nasional di Kabupaten Situbondo. Desa Sumberanyar memiliki empat dusun, yaitu Dusun Randu Agung, Dusun Kendal, Dusun Jelun, Dusun Pandean. Jarak Desa Wonorejo sampai ke pusat pemerintahan Kecamatan Banyuputih adalah \pm 25 Km. Adapun batas-batas administratif dari Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Batas-Batas Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

No.	Batas	Desa/Kel	Kecamatan
1	Sebelah utara	Taman Nasional Baluran	Banyuputih
2	Sebelah selatan	Bajulmati	Wongsorejo-Banyuwangi
3	Sebelah timur	Selat Bali	-
4	Sebelah barat	Sumberwaru	Banyuputih

Sumber : Profil Desa Wonorejo, 2012

Desa Wonorejo memiliki batas-batas wilayah seperti pada Tabel 4.3. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat Desa wonorejo berbatasan dengan Taman Nasional Baluran, 1 selat dan 2 desa. Sebelah utara Desa Wonorejo berbatasan Taman Nasional Baluran. Sebelah selatan Desa Sumberwaru berbatasan dengan Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Sebelah timur Desa Wonorejo berbatasan dengan Selat Bali. Sebelah barat Desa Sumberwaru berbatasan dengan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih.

4.2.2 Luas Wilayah dan Penggunaannya

1. Desa Sumberwaru

Luas wilayah di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih adalah 988,25 Ha/m². Wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa lahan, yaitu pemukiman, persawahan, kuburan, perkantoran, dan prasaranan umum lainnya. Adapun klasifikasi luas wilayah di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo disajikan pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4 Luas Wilayah Desa Sumberwaru Menurut Penggunaannya Tahun 2011

No	Penggunaan	Luas (Ha/m ²)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	304,50	30,81
2.	Persawahan	667,25	67,52
3.	Kuburan	2,75	0,28
4.	Perkantoran	3,00	0,30
5.	Prasarana umum lainnya	10,75	1,09
Jumlah		988,25	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa wilayah Desa Sumberwaru banyak digunakan sebagai persawahan sebesar 67,52% atau seluas 667,25 Ha/m². Wilayah selanjutnya merupakan wilayah yang digunakan untuk pemukiman sebesar 30,81% atau seluas 304,50 Ha/m². Areal persawahan yang luas di Desa Sumberwaru menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumberwaru banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Luas perkantoran adalah 2,75 Ha/m² atau sebesar 0,28%, kuburan merupakan wilayah terkecil hanya sebesar 0,30% atau seluas 3 Ha/m² dan prasarana umum lainnya sebesar 1,09% atau seluas 10,75 Ha/m².

2. Desa Sumberanyar

Luas wilayah di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih adalah 1.450 Ha/m². Wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa lahan, yaitu pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, perkantoran, dan prasarana umum lainnya. Adapun klasifikasi luas wilayah di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo disajikan pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5 Luas Wilayah Desa Sumberanyar Menurut Penggunaannya Tahun 2012

No	Penggunaan	Luas (Ha/m ²)	Presentase (%)
1.	Pemukiman	477	32,89
2.	Persawahan	511	35,24
3.	Perkebunan	347	23,93
4.	Kuburan	4	0,28
5.	Pekarangan	43	2,97
6.	Perkantoran	1	0,07
7.	Prasarana umum lainnya	67	4,62
Jumlah		1.450	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa wilayah Desa Sumberanyar banyak digunakan sebagai persawahan yaitu sebesar 35,24% atau seluas 511 Ha/m². Wilayah selanjutnya merupakan wilayah yang digunakan untuk

pemukiman yaitu sebesar 32,89% atau seluas 477 Ha/m². Areal persawahan yang luas di Desa Sumberanyar menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumberanyar banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Perkebunan merupakan wilayah ketiga terbesar yaitu sebesar 23,93% atau seluas 347 Ha/m², kemudian pekarangan sebesar 2,97% atau 43 Ha/ m², kuburan sebesar 0,28% atau 4 Ha/m², perkantoran merupakan wilayah terkecil hanyasebesar 0,07% atau seluas 1 Ha/m² dan prasarana umum lainnya sebesar 4,62% atau seluas 67 Ha/ m².

3. Desa Wonorejo

Luas wilayah di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih adalah 414,01 Ha/m². Wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa lahan, yaitu pemukiman, persawahan, kuburan, pekarangan, dan perkantoran. Adapun klasifikasi luas wilayah di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo disajikan pada Tabel 4.6:

Tabel 4.6 Luas Wilayah Desa Wonorejo Menurut Penggunaannya Tahun 2011

No	Penggunaan	Luas (Ha/m ²)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	139,09	33,60
2.	Persawahan	242,00	58,45
3.	Kuburan	3,73	0,90
4.	Pekarangan	28,69	6,93
5.	Perkantoran	0,50	0,12
Jumlah		414,01	100,00

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa wilayah Desa Sumberanyar banyak digunakan sebagai persawahan yaitu sebesar 58,45% atau seluas 242 Ha/m². Wilayah selanjutnya merupakan wilayah yang digunakan untuk pemukiman yaitu sebesar 33,60% atau seluas 139,093 Ha/m². Areal persawahan yang luas di Desa Wonorejo menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wonorejo banyak yang bermatapencaharian sebagai petani. Pekarangan merupakan wilayah ketiga terluas yaitu sebesar 6,93% atau 28,696 Ha/ m², kuburan sebesar 0,90% atau seluas 3,730 Ha/m², dan perkantoran merupakan wilayah terkecil hanya sebesar 0,12% atau seluas 0,5 Ha/m².

4.2.3 Topografi Desa

1. Desa Sumberwaru

Desa Sumberwaru merupakan desa penyangga hutan di taman nasional Baluran. Desa Sumberwaru mempunyai topografi yang akan menjelaskan daerah di sekitar desa terdiri dari beberapa bentangan wilayah. Secara umum, keadaan topografi Desa Sumberwaru adalah dataran rendah, lereng gunung, hutan konservasi, dan aliran sungai. Dibawah ini merupakan tabel 4.7 topografi Desa Sumberwaru.

Tabel 4.7 Topografi Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Bentangan Wilayah	Satuan (Ha/m²)	Persentase (%)
Desa/kelurahan dataran rendah	3.150	27,05
Desa/kelurahan lereng gunung	6.050	51,95
Hutan konservasi	1.970	16,92
Desa/kelurahan aliran sungai	475	4,08
Jumlah	11.645	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Desa Sumberwaru terbentang antara dataran rendah, lereng gunung, hutan konservasi, dan aliran sungai. Lereng gunung sebesar 51,95% atau seluas 6.050 Ha yang merupakan bentangan wilayah terbesar di Desa Sumberwaru. Dataran rendah yaitu sebesar 27,05% atau seluas 3.150 Ha, hutan konservasi sebesar 16,92% atau seluas 1.970 Ha, dan bentangan wilayah terkecil adalah aliran sungai yaitu sebesar 4,085 atau seluas 475 Ha. Dibawah ini merupakan tabel 4.8 luas hutan Desa Sumberwaru.

Tabel 4.8 Luas Hutan Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Tanah Hutan	Luas (ha/m²)
Hutan lindung	-
Hutan produksi	7.883
Hutan konservasi	-
Total Luas	7.883

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Desa Sumberwaru merupakan desa penyangga Taman Nasional Baluran, artinya Desa Sumberwaru merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Taman Nasional Baluran. Hal ini dapat dilihat dari wilayah Desa Sumberwaru yang terdapat kawasan hutan produksi seluas 7.883 Ha.

2. Desa Sumberanyar

Desa Sumberanyar merupakan desa penyangga hutan di taman nasional Baluran. Desa Sumberanyar mempunyai topografi yang akan menjelaskan daerah di sekitar desa terdiri dari beberapa bentangan wilayah. Secara umum, keadaan topografi Desa Sumberanyar adalah tepi atau pesisir pantai. Dibawah ini merupakan Tabel 4.9 topografi Desa Sumberanyar.

Tabel 4.9 Topografi Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012

Bentangan Wilayah	Satuan	Persentase (%)
Desa/kelurahan dataran rendah	- Ha/m ²	0,00
Desa/kelurahan lereng gunung	- Ha/m ²	0,00
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	10 Ha/m ²	100,00
Desa/kelurahan aliran sungai	- Ha/m ²	0,00
Jumlah	10 Ha/m²	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Desa Sumberanyar adalah desa yang dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan Desa Sumberanyar terbentang di antara tepi pantai/pesisir yaitu seluas 10 Ha. Berikut ini Tabel 4.10 akan menjelaskan luas hutan yang terdapat disekitar Desa Sumberanyar.

Tabel 4.10 Luas Hutan Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012

Tanah Hutan	Luas (ha/m²)
Hutan lindung	7.873 Ha/m ²
Hutan produksi	-Ha/m ²
Hutan konservasi	-Ha/m ²
Total Luas	7.873 Ha/m²

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Desa Sumberanyar yang merupakan desa penyangga Taman Nasional Baluran, artinya Desa Sumberanyar merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Taman Nasional Baluran. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 mengenai luas hutan di Desa Sumberanyar. Wilayah Desa Sumberanyar yang terdapat kawasan hutan lindung adalah seluas 7.873 Ha.

3. Desa Wonorejo

Desa Wonorejo merupakan desa penyangga hutan di taman nasional Baluran. Desa Wonorejo mempunyai topografi yang akan menjelaskan daerah di sekitar desa terdiri dari beberapa bentangan wilayah. Secara umum, keadaan topografi Desa Wonorejo adalah tepi atau pesisir pantai. Dibawah ini merupakan Tabel 4.11 topografi Desa Wonorejo.

Tabel 4.11 Topografi Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Bentangan Wilayah	Satuan	Persentase (%)
Desa/kelurahan dataran rendah	- Ha/m ²	0,00
Desa/kelurahan lereng gunung	- Ha/m ²	0,00
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	414,093 Ha/m ²	100,00
Desa/kelurahan aliran sungai	- Ha/m ²	0,00
Jumlah	414,093 Ha/m²	100,00

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Desa Wonorejo adalah desa yang dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan Desa Wonorejo terbentang di antara tepi pantai/pesisir seluas 414,093 Ha. Berikut ini Tabel 4.12 akan menjelaskan luas hutan yang terdapat disekitar Desa Wonorejo.

Tabel 4.12 Luas Hutan Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Tanah Hutan	Luas (ha/m²)
Hutan lindung	8.873 Ha/m ²
Hutan produksi	-Ha/m ²
Hutan konservasi	-Ha/m ²
Total Luas	8.873 Ha/m²

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Desa Wonorejo merupakan desa penyangga Taman Nasional Baluran, artinya Desa Wonorejo merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di Taman Nasional Baluran. Hal ini dapat dilihat dari tabel luas hutan di Desa Wonorejo. Wilayah Desa Wonorejo yang terdapat kawasan hutan lindung seluas 8.873 Ha.

4.2.4 Keadaan Iklim

1. Desa Sumberwaru

Iklim akan mempengaruhi kondisi fisik di suatu wilayah. Keadaan iklim di Desa Sumberwaru terdiri dari curah hujan (mm), jumlah bulan hujan, suhu rata-rata harian (°C), dan tinggi tempat dari permukaan laut (mdl). Berikut ini adalah Tabel 4.13 akan menjelaskan keadaan iklim di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih tahun 2011.

Tabel 4.13 Keadaan Iklim Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Uraian	Satuan
Curah hujan	1.000 mm
Jumlah bulan hujan	5 bulan
Suhu rata-rata harian	37 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut	21,5 mdl

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Desa Sumberwaru berada pada ketinggian 21,5 mdl dengan intensitas curah hujan 1.000 mm sepanjang tahun. Suhu rata-rata harian Desa Sumberwaru 37⁰C yang dapat dikatakan cukup panas. Jumlah bulan hujan di Desa Sumberwaru adalah 5 bulan sepanjang tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan di Desa Sumberwaru.

2. Desa Sumberanyar

Iklim akan mempengaruhi kondisi di suatu wilayah. Keadaan iklim suatu wilayah terdiri dari curah hujan, jumlah bulan hujan, suhu rata-rata harian, dan tinggi tempat dari permukaan laut. Dibawah ini adalah Tabel 4.14 akan menjelaskan keadaan iklim Desa Sumberanyar.

Tabel 4.14 Keadaan Iklim Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012

Uraian	Satuan
Curah hujan	125 mm
Jumlah bulan hujan	6 bulan
Suhu rata-rata harian	34 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut	21,6 mdl

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Desa Sumberanyar berada pada ketinggian 21,6 mdl dengan intensitas curah hujan 125 mm sepanjang tahun. Suhu rata-rata harian Desa Sumberanyar 34⁰C yang dapat dikatakan cukup panas. Jumlah bulan hujan di Desa Sumberanyar adalah 6 bulan sepanjang tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa musim kemarau mempunyai panjang yang dengan musim penghujan di Desa Sumberanyar.

3. Desa Wonorejo

Iklim akan mempengaruhi kondisi di suatu wilayah. Keadaan iklim suatu wilayah terdiri dari curah hujan, jumlah bulan hujan, suhu rata-rata harian, dan tinggi tempat dari permukaan laut. Dibawah ini adalah Tabel 4.15 akan menjelaskan keadaan iklim Desa Wonorejo.

Tabel 4.15 Keadaan Iklim Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Uraian	Satuan
Curah hujan	2.000 mm
Jumlah bulan hujan	6 bulan
Suhu rata-rata harian	38 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut	25 mdl

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Desa Wonorejo berada pada ketinggian 25 mdl dengan intensitas curah hujan 2.000 mm sepanjang tahun. Suhu rata-rata harian Desa Wonorejo 38⁰C yang dapat dikatakan cukup panas. Jumlah bulan hujan di Desa Wonorejo adalah 6 bulan sepanjang tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa musim kemarau mempunyai panjang yang dengan musim penghujan di Desa Wonorejo.

4.3 Sumber Daya Manusia

4.3.1. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Desa Sumberwaru

Sumber daya manusia merupakan potensi paling penting dalam upaya peningkatan mutu kualitas hidup manusia itu sendiri. Sumber daya manusia terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan yang tinggal di suatu wilayah. Berikut ini adalah Tabel 4.16 akan menjelaskan jumlah penduduk Desa Sumberwaru.

Tabel 4.16 Jumlah Penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Jenis	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Jumlah laki-laki	4.056	48,59
Jumlah perempuan	4.291	51,41
Jumlah Total	8.347	100
Jumlah kepala keluarga	3.515	-

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Potensi sumber daya manusia di Desa Sumberwaru dapat dikategorikan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama jumlahnya. Jumlah penduduk laki-laki dengan persentase 48,59% yaitu sebesar 4.056 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan dengan persentase 51,41% yaitu sebesar 4.291 jiwa. Total penduduk Desa Sumberwaru adalah sebesar 8.347 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 3.515 jiwa.

2. Desa Sumberanyar

Sumber daya manusia merupakan potensi paling penting dalam upaya peningkatan mutu kualitas hidup manusia itu sendiri. Sumber daya manusia terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan yang tinggal di suatu wilayah. Berikut ini adalah Tabel 4.17 akan menjelaskan jumlah penduduk Desa Sumberanyar.

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012

Jenis	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Jumlah laki-laki	8.996	49,25
Jumlah perempuan	9.271	50,75
Jumlah Total	18.267	100
Jumlah kepala keluarga	6.869	-

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Potensi sumber daya manusia di Desa Sumberanyar dapat dikategorikan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama jumlahnya. Jumlah penduduk laki-laki dengan persentase 49,25% yaitu sebesar 8.996 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan dengan persentase 50,75% yaitu sebesar 9.271 jiwa. Total penduduk Desa Sumberanyar adalah sebesar 18.267 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 6.869 jiwa.

3. Desa Wonorejo

Sumber daya manusia merupakan potensi paling penting dalam upaya peningkatan mutu kualitas hidup manusia itu sendiri. Sumber daya manusia terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan yang tinggal di suatu wilayah. Berikut ini adalah Tabel 4.18 akan menjelaskan jumlah penduduk Desa Wonorejo.

Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Jenis	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Jumlah laki-laki	3.857	49,13
Jumlah perempuan	3.993	50,87
Jumlah Total	7.850	100
Jumlah kepala keluarga	2.948	-

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Potensi sumber daya manusia di Desa Wonorejo dapat dikategorikan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama jumlahnya. Jumlah penduduk laki-laki dengan presentase 49,13% yaitu sebesar 3.857 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan

persentase 50,87% perempuan yaitu sebesar 3.993 jiwa. Total penduduk Desa Wonorejo adalah sebesar 7.850 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 2.948 jiwa.

4.3.2. Keadaan Penduduk Menurut Usia

1. Desa Sumberwaru

Jumlah penduduk di Desa Sumberwaru 8.347 jiwa. Penduduk Desa Sumberwaru memiliki beragam sebaran penduduk. Sebaran penduduk berdasarkan spesifikasi kelompok usia tenaga kerja adalah seperti dalam Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2011

Kelompok Usia Tenaga Kerja (Th)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0-6	656	7,86
7-18	1.422	17,04
18-56	4.285	51,34
≥ 56	1.984	23,77
Jumlah	8.347	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Berdasarkan Tabel 4.19, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang memiliki usia produktif 18-56 tahun memiliki persentase terbesar yaitu 51,34%. Penduduk yang memiliki usia di atas 56 tahun memiliki persentase cukup tinggi kedua yaitu 23,77%. Penduduk yang memiliki usia 7-18 tahun memiliki persentase 17,04% dan penduduk dengan usia 0-6 tahun memiliki persentase 7,86%. Tingginya jumlah penduduk pada usia produktif menyebabkan penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih memiliki potensi bekerja cukup tinggi.

2. Desa Sumberanyar

Jumlah penduduk di Desa Sumberanyar sejumlah 18.267 jiwa. Penduduk Desa Sumberanyar memiliki beragam sebaran penduduk. Sebaran penduduk berdasarkan spesifikasi kelompok usia tenaga kerja adalah seperti dalam Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2012

Kelompok Usia Tenaga Kerja (Th)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0-6	1.460	7,99
7-18	3.004	16,44
18-56	0.252	56,12
≥ 56	3.551	19,44
Jumlah	18.267	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Berdasarkan Tabel 4.20, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang memiliki usia produktif 18-56 tahun memiliki persentase terbesar yaitu 56,12%. Penduduk yang memiliki usia di atas 56 tahun memiliki persentase cukup tinggi kedua yaitu 19,44%. Penduduk dengan usia 7-18 tahun memiliki persentase 16,44% dan penduduk dengan usia 0-6 tahun memiliki persentase 7,99%. Tingginya jumlah penduduk pada usia produktif menyebabkan penduduk Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih memiliki potensi bekerja cukup tinggi.

3. Desa Wonorejo

Jumlah penduduk di Desa Wonorejo sejumlah 7.850 jiwa. Penduduk Desa Wonorejo memiliki beragam sebaran penduduk. Sebaran penduduk berdasarkan spesifikasi kelompok usia tenaga kerja adalah seperti dalam Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2011

Kelompok Usia Tenaga Kerja (Th)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0-6	540	7,11
7-18	1.421	18,32
18-56	5.295	67,71
≥ 56	521	6,87
Jumlah	7.850	100,00

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Berdasarkan Tabel 4.21, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang memiliki usia produktif 18-56 tahun memiliki persentase terbesar yaitu 67,71%. Penduduk yang memiliki usia 7-18 tahun memiliki persentase cukup tinggi kedua yaitu 18,32%. Penduduk dengan usia 0-6 tahun memiliki persentase sebesar 7,11%. Penduduk yang memiliki usia di atas 56 tahun memiliki persentase paling kecil yaitu 6,87%. Tingginya jumlah penduduk pada usia produktif menyebabkan penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih memiliki potensi bekerja cukup tinggi.

4.3.3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

1. Desa Sumberwaru

Mata pencaharian adalah tempat bekerja seseorang untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk di Desa Sumberwaru memiliki beragam mata pencaharian yang bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor penyumbang lapangan kerja diklasifikasikan pada Tabel 4.22:

Tabel 4.22 Distribusi Penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Tahun 2011

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	1.212	41,41
Buruh tani	347	11,86
Peternak	577	19,71
Nelayan	173	5,91
Lain-lain	618	21,11
Jumlah	2.309	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Berdasarkan Tabel 4.22, menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk dengan jumlah terkecil adalah sebagai nelayan sejumlah 173 jiwa dengan persentase 5,91%. Mayoritas penduduk di Desa Sumberwaru bermatapencaharian sebagai petani yaitu sejumlah 1.212 jiwa dengan persentase 41,41%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor pertanian yang memiliki lahan mempunyai jumlah cukup tinggi. Mata pencaharian penduduk dengan jumlah terkecil adalah sebagai nelayan sejumlah 173 jiwa dengan persentase 5,91%.

2. Desa Sumberanyar

Mata pencaharian adalah tempat bekerja seseorang untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk di Desa Sumberanyar memiliki beragam mata pencaharian yang bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor penyumbang lapangan kerja diklasifikasikan pada Tabel 4.23:

Tabel 4.23 Distribusi Penduduk Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Tahun 2012

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	526	8,34
Buruh tani	3.213	50,94
Peternak	12	0,19
Nelayan	1.728	27,40
Lain-lain	828	13,13
Jumlah	6.307	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberanyar 2013

Berdasarkan Tabel 4.23, menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk dengan jumlah terkecil adalah sebagai peternak dengan persentase 0,19% yaitu sejumlah 12 jiwa. Mayoritas penduduk di Desa Sumberanyar bermatapencaharian sebagai buruh tani yaitu sejumlah 3.213 jiwa dengan persentase 50,94%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumberanyar yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki lahan mempunyai jumlah cukup tinggi.

3. Desa Wonorejo

Mata pencaharian adalah tempat bekerja seseorang untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk di Desa Wonorejo memiliki beragam mata pencaharian yang bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor penyumbang lapangan kerja di Desa Wonorejo diklasifikasikan pada Tabel 4.24:

Tabel 4.24 Distribusi Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Tahun 2011

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	679	13,67
Buruh tani	2.726	54,88
Peternak	439	8,84
Nelayan	754	15,18
Lain-lain	369	7,43
Jumlah	4.967	100,00

Sumber: Profil Desa Wonorejo 2012

Berdasarkan Tabel 4.24, menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk dengan jumlah terkecil mata pencaharian lainnya seperti PNS, pedagang, dan karyawan perusahaan swasta sejumlah 369 jiwa dengan persentase 7,43%. Mayoritas penduduk di Desa Wonorejo bermatapencaharian sebagai buruh tani yaitu sejumlah 2.726 jiwa dengan persentase 54,88%. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki lahan mempunyai jumlah yang cukup tinggi.

4.3.4. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

1. Desa Sumberwaru

Berikut sebaran jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih. Desa Sumberwaru masih memiliki penduduk yang buta aksara. Berikut daftar tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih tahun 2011.

Tabel 4.25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	700	27,71
Usia 18-56 tahun tamat SD	901	35,67
Usia 18-56 tahun tamat SLTP	401	15,87
Usia 18-56 tahun tamat SLTA	329	13,02
Usia 18-56 tahun tamat PT	195	7,72
Jumlah	2.526	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberwaru, 2012

Berdasarkan Tabel 4.25, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Sumberwaru masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari jumlah penduduk di Desa Sumberwaru sebagian besar tamatan SD yaitu sejumlah 901 jiwa dengan persentase 35,67%. dan dengan jumlah terkecil yaitu penduduk tamat perguruan tinggi sejumlah 195 jiwa dengan persentase 7,72%. Dengan demikian, kualitas Sumber daya manusia masyarakat Desa Sumberwaru dari segi tingkat pendidikan masih kurang.

2. Desa Sumberanyar

Berikut sebaran jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih. Desa Sumberanyar masih memiliki penduduk yang buta aksara. Berikut daftar tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih tahun 2012.

Tabel 4.26 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Tahun 2012

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Usia 18-56 tahun buta aksara	1.613	18,46
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	524	6,00
Usia 18-56 tahun tamat SD	4.213	48,20
Usia 18-56 tahun tamat SLTP	1.620	18,54
Usia 18-56 tahun tamat SLTA	544	6,22
Usia 18-56 tahun tamat PT	226	2,59
Jumlah	8.740	100,00

Sumber: Profil Desa Sumberanyar, 2013

Berdasarkan Tabel 4.26, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Sumberanyar masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari jumlah penduduk di Desa Sumberanyar sebagian besar tamatan SD yaitu sejumlah 4.213 jiwa dengan persentase 48,20% dan penduduk tamat perguruan tinggi sejumlah 226 jiwa dengan persentase 2,59%. Dengan demikian, kualitas Sumber daya manusia masyarakat Desa Sumberanyar dari segi tingkat pendidikan masih kurang.

3. Desa Wonorejo

Berikut sebaran jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih. Desa Wonorejo masih memiliki penduduk yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Berikut daftar tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih tahun 2013.

Tabel 4.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Tahun 2011

Tingkatan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	89	2,16
Usia 18-56 tahun tamat SD	1.554	37,65
Usia 18-56 tahun tamat SLTP	1.263	30,60
Usia 18-56 tahun tamat SLTA	1.101	26,68
Usia 18-56 tahun tamat PT	120	2,91
Jumlah	4.127	100,00

Sumber: Profil Desa Wonorejo, 2012

Berdasarkan Tabel 4.27 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Wonorejo masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari jumlah penduduk di Desa Wonorejo sebagian besar tamatan SD yaitu sejumlah 1.554 jiwa dengan persentase 37,68% dan dengan jumlah terkecil yaitu penduduk yang

tidak tamat SD sejumlah 89 jiwa dengan persentase 2,16%. Dengan demikian, kualitas Sumber daya manusia masyarakat Desa Wonorejo dari segi tingkat pendidikan masih kurang.

4.4 Karakteristik Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Karakteristik merupakan sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Karakteristik masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah dilihat dari beberapa aspek yaitu umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal dan pengetahuan kawasan.

Tabel 4.28 Umur Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Umur (tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-36	9	30,00
37-53	16	53,33
54-70	5	16,67
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran A)

Tabel 4.28 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah pada usia 37-53 tahun dengan persentase 53,33% yaitu sejumlah 16 orang. Responden dengan jumlah terkecil yaitu pada usia 54-70 tahun dengan persentase 16,67% yaitu sejumlah 5 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemanfaat hasil hutan non kayu adalah pada usia 37-53 tahun. Pada usia ini, masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu tergolong dalam usia produktif, sehingga dapat semakin lebih aktif mengikuti kegiatan dari Taman Nasional Baluran.

Tabel 4.29 Jumlah Tanggungan Keluarga Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Jumlah Tanggungan Keluarga (orang)	Jumlah Responden	Persentase (%)
2-3	16	53,33
4-5	13	43,33
6-7	1	3,33
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran A)

Tabel 4.29 menunjukkan bahwa masyarakat dengan jumlah terbanyak yaitu 16 orang dengan persentase 53,33% yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang. Responden dengan jumlah terkecil yaitu 1 orang dengan persentase 3,33% yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 6-7 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemanfaat hasil hutan non kayu memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang. Tanggungan keluarga ini terdiri dari istri/suami, anak, cucu, menantu bahkan orang tua/mertua responden. Jumlah tanggungan keluarga ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga maka semakin rendah pula partisipasinya karena masyarakat terlaui sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak.

Tabel 4.30 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Pendidikan	Jumlah Reponden	Persentase (%)
< SD	11	36,67
SD	17	56,67
SMP	2	6,67
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran A)

Tabel 4.30 menunjukkan bahwa masyarakat dengan jumlah terbanyak yaitu sebesar 56,67% atau 17 orang berpendidikan tamat SD atau Sekolah Dasar, sedangkan masyarakat dengan jumlah terkecil yaitu sebesar 6,67% atau 2 orang berpendidikan sampai SMP atau Sekolah Menengah Pertama. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemanfaat hasil hutan non kayu tingkat pendidikannya masih tergolong rendah yaitu tamat SD. Untuk melakukan partisipasi terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Namun, dengan memiliki pendidikan yang tinggi, maka kesadaran masyarakat juga tinggi karena pengetahuan dan wawasan yang dimiliki jauh lebih banyak, serta masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi yang diberikan oleh pihak Taman Nasional Baluran.

Tabel 4.31 Tingkat Pendapatan Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Pendapatan rata-rata (Rp/bulan)	Jumlah Responden	Persentase (%)
<1000000	15	50,00
1000000-2000000	8	26,67
>2000000	7	23,33
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran A)

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa masyarakat dengan jumlah terbanyak yaitu sebesar 50% atau 15 orang memiliki pendapatan < Rp1.000.000/bulan dari hasil memanfaatkan hasil hutan non kayu yang ada di Taman Nasional Baluran. Sedangkan jumlah masyarakat terkecil yaitu sebesar 23,33% atau 7 orang memiliki pendapatan berkisar antara Rp1.000.000- Rp2.000.000. Besarnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat tergantung dari jenis dan Jumlah hasil hutan non kayu yang diambil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki penghasilan dari hasil hutan non kayu masih terbilang kurang yaitu > Rp 1.000.000.

Tabel 4.32 Lama Tinggal Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Lama Tinggal (tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
2-24	7	23,33
25-47	14	46,67
48-70	9	30,00
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran A)

Tabel 4.32 menunjukkan bahwa masyarakat dengan jumlah terbanyak dalam lama tinggal di desa penyangga adalah selama 25-47 tahun sejumlah 14 orang dengan persentase 46,67%. Sedangkan jumlah masyarakat terkecil yaitu dengan persentase 23,33% atau sejumlah 7 orang mempunyai lama tinggal di desa penyangga selama 2-24 tahun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat tinggal di desa penyangga berkisar antara 25-47 tahun. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan non kayu adalah penduduk asli, sedangkan sebagian lainnya merupakan pendatang.

Tabel 4.33 Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Hutan TNB

Pengetahuan kawasan (Skor)	Indikator	Jumlah Responden	Persentase (%)
8- 10	Rendah	0	0,00
11-13	Sedang	24	80,00
14-16	Tinggi	6	20,00
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran A)

Tabel 4.33 menunjukkan bahwa terdapat 80% atau 24 masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kawasan hutan TNB dikategorikan sedang, dan sebesar 20% atau 6 masyarakat memiliki pengetahuan tentang kawasan hutan TNB dikategorikan tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat [pemanfaat hasil hutan non kayu sudah memiliki pengetahuan tentang kawasan hutan yang cukup. Pengetahuan tentang kawasan hutan TNB diantaranya pengetahuan masyarakat tentang peraturan dalam memasuki hutan dan memanfaatkan hasil hutan.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Tingkat Partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dinilai dari beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut berasal dari pemikiran Cohen dan Uphoff (1977). Terdapat 4 indikator yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Setiap tahap partisipasi kemudian akan dijabarkan menjadi beberapa sub indikator berupa pertanyaan yang dijadikan dasar pembuatan kuisisioner dan berfungsi sebagai perhitungan skor partisipasi pada masing-masing tahapan.

Tahap partisipasi pada pengelolaan Taman Nasional Baluran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi yang mempunyai arti dan tujuan yang berbeda pada setiap tahapan. Pada tahap perencanaan merupakan tahap paling awal dalam suatu program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, semua hal yang dirancang dan direncanakan dalam tahap perencanaan akan diaplikasikan dan dilaksanakan, baik program maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemanfaatan hasil, merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat dari program maupun dari hasil hutan. Tahap evaluasi adalah tahap terakhir dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran, pada tahap ini akan mengevaluasi berjalannya program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran.

Berdasarkan hasil jawaban kuisisioner didapatkan hasil tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran sebesar 86,67% berada pada tingkat partisipasi rendah. Pada tingkat partisipasi sedang didapatkan sebesar 13,33% masyarakat dan tidak terdapat masyarakat berada pada tingkat partisipasi tinggi. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu

Skor	Indikator Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Presentase (%)
19-31	Rendah	26	86.67
32-44	Sedang	4	13.33
45-57	Tinggi	0	0.00

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran C)

Dapat dijelaskan dari Tabel 5.1, bahwa 86,67% masyarakat mempunyai tingkat partisipasi rendah. Pada tingkat partisipasi sedang diperoleh hasil sebesar 13,33%. Akan tetapi, tidak terdapat masyarakat yang berpartisipasi tinggi dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Hasil tabulasi kuisioner pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang pertama adalah terbukti. Hipotesis pertama yaitu tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah rendah, hal ini sama dengan hasil penelitian yang didapatkan yaitu tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah rendah.

Tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu sebagian besar berada pada posisi rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu yang tinggal di sekitar hutan kurang memahami konsep pengelolaan dan pelestarian hutan di Taman Nasional Baluran. Masyarakat juga tidak sepenuhnya diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan di Taman Nasional Baluran. Pada tahapan partisipasi yang dijadikan indikator partisipasi juga didapatkan hasil sebagian besar responden pada tingkat partisipasi rendah. Penjelasan tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada setiap tahapan partisipasi dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahapan Partisipasi

Indikator Tahapan Partisipasi	Tingkat Partisipasi (%)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Perencanaan	100,00	0,00	0,00
Pelaksanaan	86,67	13.33	0,00
Pemanfaatan Hasil	0,00	16.67	83.33
Evaluasi	100,00	0,00	0,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran C)

Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa presentase tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan partisipasi. Tahapan partisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Semua tahapan dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran sangat penting untuk menunjang keberhasilan pengelolaan hutan di Taman Nasional Baluran. Tercapainya tujuan pengelolaan tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak Taman Nasional Baluran dan masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu yang tinggal di desa penyangga Taman Nasional Baluran.

Presentase tingkat partisipasi rendah dari masyarakat pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan didapatkan sebesar 100% masyarakat berpartisipasi rendah. Pada tahap pelaksanaan, presentase tingkat partisipasi masyarakat juga sangat berbeda pada setiap tingkatan partisipasi. Sebagian besar masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu berpartisipasi rendah dengan presentase 86,67%, sedangkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi sedang sebesar 13,33%. Sebagian besar masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada tahap pemanfaatan hasil berpartisipasi tinggi yaitu dengan presentase sebesar 83,33%, sedangkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi sedang sebesar 16,67%. Pada tahapan evaluasi sama halnya dengan tahapan perencanaan yaitu terdapat 100% masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu yang berpartisipasi rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran disebabkan karena masyarakat tidak ikut serta dalam tahap perencanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Sehingga menyebabkan persentase partisipasi masyarakat dari keseluruhan tahapan partisipasi menjadi rendah. Berikut ini adalah penjelasan tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada setiap tahapan pengelolaan Taman Nasional Baluran.

5.1.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Hal yang mendasar dalam tahap perencanaan ini adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam kegiatan survei lapang, sumbangan masyarakat berupa pendapat, terlibat dalam pembuatan rencana kerja dan penentuan aktivitas program, serta keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu berpartisipasi rendah, bahkan dapat dikatakan tidak berpartisipasi. Hal ini dikarenakan masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu tidak ada yang ikut serta dalam tahap perencanaan pada pengelolaan Taman Nasional Baluran. Ketidakikutsertaan masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu ini disebabkan masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Masyarakat langsung dilibatkan pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran.

5.1.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang paling menentukan dan mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Hal ini dikarenakan pencapaian dari tujuan pengelolaan Taman Nasional Baluran sangat ditentukan pada tahap ini, yaitu keberhasilan menjaga kelestarian hutan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan taman Nasional Baluran. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran akan meningkatkan kelestarian hutan Taman Nasional Baluran. Pada Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu masih rendah. Pada partisipasi rendah didapatkan hasil sebesar 86,67% masyarakat dan pada tingkat

partisipasi sedang didapatkan hasil sebesar 13,33% masyarakat dan tidak terdapat masyarakat yang berada pada tingkat partisipasi tinggi. Rendahnya partisipasi masyarakat ini dikarenakan masyarakat hanya mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran. Masyarakat hanya mengikuti satu sampai dua program pengelolaan Taman Nasional Baluran. Masyarakat juga tidak sering mengikuti kegiatan dari Taman Nasional Baluran. Hanya 1-2 kali dalam 1 program yang diikuti oleh masyarakat. Sub indikator pada partisipasi tahap pelaksanaan diantaranya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan, sumbangan pikiran, sumbangan tenaga, sumbangan materi, sumbangan kehadiran, pengawasan terhadap kebakaran hutan, pengawasan terhadap perburuan satwa, pengawasan terhadap pencurian/pengambilan SDA, dan keikutsertaan dalam mengatasi bencana alam.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaat hasil hutan non kayu pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran diantaranya adalah tebang pohon akasia, membuat jalan setapak ke hutan, menjadi anggota MPA (Masyarakat Peduli Api), menjadi tukang ojek wisata Baluran. Kegiatan tebang pohon akasia ini rutin dilaksanakan karena Savana Baluran dengan luas 10.000 ha, (50%) dari luas savana telah terinvansi tanaman *acacia nilotica*. Tanaman tersebut menempati ruang-ruang di savana, sehingga terjadi perubahan tipe ekosistem dari ekosistem savana menjadi ekosistem *acacia nilotica* (hutan homogen). Tanaman akasia ini menginvasi tanaman lain, sehingga tanaman lain seperti rumput savanna yang menjadi pakan Banteng menjadi mati. Oleh karena itu, pihak Taman Nasional Baluran mengajak masyarakat untuk ikut serta tebang pohon akasia secara rutin agar pertumbuhan akasia tidak semakin meluas. Pembuatan jalan setapak ke hutan bertujuan agar memudahkan petugas melakukan patroli ke dalam hutan dan memudahkan dalam kegiatan ekowisata. Kegiatan MPA (masyarakat peduli api) adalah suatu upaya untuk memadamkan api dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Masyarakat juga menjadi tukang ojek wisata untuk mengantarkan wisatawan yang ingin berwisata ke Baluran. Selain mengantarkan, masyarakat juga berperan sebagai pemandu wisata.

Sumbangan-sumbangan partisipasi diantaranya adalah sumbangan tenaga, pikiran, materi, dan kehadiran. Masyarakat mayoritas memberikan sumbangan tenaga dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Masyarakat memberikan sumbangan tenaga pada kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran seperti pembuatan jalan setapak ke hutan dan menjadi anggota MPA. Terdapat masyarakat yang memberikan sumbangan kehadiran juga dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran seperti mengikuti pertemuan di balai TNB untuk membicarakan mengenai waspada api, memperoleh informasi waktu musim panen asam dan akasia.

Pengawasan terhadap hutan di Taman Nasional Baluran diantaranya adalah pengawasan terhadap adanya kebakaran, perburuan satwa yang dilindungi, pencurian SDA yang dilindungi, dan pengawasan terhadap bencana alam. Masyarakat mayoritas berpartisipasi dalam mengatasi kebakaran hutan, terutama di musim kemarau. Pada musim kemarau, hutan di Taman Nasional Baluran rawan kebakaran. Kebakaran tersebut dapat diakibatkan oleh manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan dan akibat musim kemarau yang panjang. Masyarakat biasanya ikut serta memadamkan api pada saat masyarakat masuk ke hutan untuk mengambil HHNK. Jika pada saat masuk ke hutan masyarakat menemukan hutan dalam keadaan kebakaran, masyarakat langsung memadamkan apinya.

5.1.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Pemanfaatan Hasil

Tahap pemanfaatan hasil adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dalam mengikuti kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Manfaat yang diperoleh berasal dari kegiatan program yang diikuti oleh masyarakat dan berasal dari hasil hutan yang dimanfaatkan. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pada tahap pemanfaat hasil terdapat 16,67% masyarakat berpartisipasi sedang dan 83,33% berpartisipasi tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil ini disebabkan karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan non kayu. Masyarakat sudah bergantung pada Hasil Hutan Non Kayu untuk

mencukupi kebutuhan keluarga. Sub indikator pada tahap partisipasi diantaranya adalah peningkatan pendapatan masyarakat, manfaat hutan terhadap lingkungan masyarakat, penggunaan HHNK, ketergantungan terhadap HHNK di Taman Nasional Baluran.

Pengelolaan Taman Nasional Baluran menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi dengan adanya kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran dapat menambah penghasilan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan yang diperoleh dari program pengelolaan Taman Nasional Baluran yang diikuti oleh masyarakat seperti upah dari kegiatan menjadi anggota MPA, pemberantasan akasia dan menjadi ojek wisata. Selain itu, hasil penjualan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi penyumbang pendapatan keluarga yang terbesar.

Manfaat hutan yang diperoleh masyarakat selain dari segi ekonomi juga dari segi lingkungan. Dengan adanya hutan yang tetap terjaga kelestariannya akan menjadikan lingkungan menjadi sehat. Udara sekitar yang dihirup oleh masyarakat menjadi tidak polusi karena adanya pohon-pohon di hutan. Selain itu, jarang sekali terjadi bencana alam di desa penyangga jika hutan tetap terjaga kelestariannya. Hasil Hutan Non Kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya kayu bakar, rumput, rumput rambanan, biji akasia, asam, madu, kroto, kemiri, gadung, kelanting dan ikan. Masyarakat paling banyak memanfaatkan kayu bakar untuk keperluan sehari-hari dan rumput untuk pakan ternak. Selain digunakan langsung untuk keperluan sehari-hari, masyarakat juga menjual Hasil Hutan Non Kayu untuk menambah penghasilan keluarga. Biasanya masyarakat menjual Hasil Hutan Non Kayu kepada tengkulak. Ketergantungan masyarakat terhadap Hasil Hutan Non Kayu yang terdapat di hutan Taman Nasional termasuk tinggi. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari masyarakat mengambil Hasil Hutan Non Kayu. Frekuensi pengambilan Hasil Hutan Non Kayu rutin seperti kayu bakar, rumput, kroto, ikan dan kelanting bisa dilakukan seminggu 3 sampai 7 kali. Frekuensi pengambilan Hasil Hutan Non Kayu musiman seperti asam, biji akasia, madu dan gadung 2 sampai 7 kali per minggu pada setiap musimnya.

5.1.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu pada Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap terakhir dari kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Meskipun tahap ini adalah paling akhir dari pengelolaan Taman Nasional Baluran tidak berarti tahap evaluasi adalah tahapan pengelolaan yang tidak penting. Pada tahap ini, hal utama yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi program yang telah dilaksanakan.

Hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi adalah keseluruhan responden yang merupakan masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu tidak berpartisipasi dalam tahapan evaluasi program. Masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu hanya terlibat dalam tahapan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Ketidakikutsertaan masyarakat dalam tahap evaluasi ini menyebabkan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran menjadi rendah.

5.2 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Hubungan antara partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dengan faktor-faktor yang diduga dapat diketahui dengan analisis korelasi *Rank Spearman*. Faktor-faktor yang diduga tersebut yaitu umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang kawasan hutan TNB (Taman Nasional Baluran). Hasil analisis korelasi *Rank Spearman* tersebut dapat di lihat pada Tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3 Hasil Analisis Korelasi *Rank Spearman*

Faktor-faktor	Koefisien Korelasi rs	Sig. (2-tailed)
Umur	0,239	0,204
Jumlah Tanggungan Keluarga	-0,309	0,097
Pendidikan	0,015	0,937
Pendapatan	0,413*	0,023
Lama Tinggal	0,292	0,118
Pengetahuan Kawasan	0,387	0,035

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran D)

Keterangan: *) signifikan pada taraf nyata 0,05

5.2.1 Hubungan Umur dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Umur dapat juga diartikan sebagai lama hidup didunia yang dinyatakan dalam tahun. Berdasarkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* pada Tabel 5.3 antara umur dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima ($0,204 > 0,05$), artinya secara statistik tidak menunjukkan hubungan antara faktor umur masyarakat dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Umur masyarakat tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi. Hasil temuan di lapang menunjukkan bahwa masyarakat dalam berpartisipasi tidak memandang umur. Terdapat berbagai tingkatan umur masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam berpartisipasi, yaitu mayoritas masyarakat berumur produktif antara 15 sampai 64 tahun dengan persentase 53,33% yaitu sejumlah 16 orang berumur 37-53 tahun. Sebesar 16,67% atau sejumlah 5 orang berumur 54-70 tahun dan 30% atau 9 orang berumur 20-36 tahun. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu adalah pada usia 37-53 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berapapun tingkat umur yang dimiliki oleh masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran. Hal ini disebabkan tidak terdapat perbedaan tingkatan umur dari pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu. Umur dari keseluruhan pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu berada pada umur produktif yaitu antara 15-64 tahun.

5.2.2 Hubungan Jumlah Tanggungan Keluarga dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Jumlah tanggungan keluarga dapat diartikan sejumlah orang yang menjadi bagian keluarga responden dan biaya hidupnya ditanggung oleh responden (kepala keluarga). Berdasarkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* pada Tabel 5.3 jumlah tanggungan keluarga dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil

Hutan Non Kayu dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima ($0,097 > 0,05$), artinya secara statistik tidak menunjukkan adanya hubungan antara jumlah tanggungan keluarga dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Jumlah anggota keluarga yang dimiliki Hasil Hutan Non Kayu paling sedikit 2 orang dan paling banyak 7 orang. Tanggungan keluarga responden diantaranya istri atau suami, anak, cucu dan orang tua/mertua, akan tetapi terkadang juga saudara yang kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian di lapang yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berapapun jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki oleh para masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu di Taman Nasional Baluran yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di Taman Nasional Baluran. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai macam pemanfaat hasil hutan non kayu dengan jumlah tanggungan keluarga yang variatif, mulai dari 2 tanggungan keluarga bahkan ada yang mempunyai 7 tanggungan keluarga dengan tingkat partisipasi yang berbeda. Terdapat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu yang berpartisipasi rendah dengan jumlah tanggungan keluarga yang sedikit, terdapat pula Hasil Hutan Non Kayu yang berpartisipasi rendah dengan jumlah tanggungan keluarga yang banyak.

5.2.3 Hubungan Pendidikan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Pendidikan adalah lama pendidikan formal yang ditempuh responden yang dinyatakan dalam tahun. Berdasarkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* pada Tabel 5.3 antara pendidikan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima ($0,937 > 0,05$), artinya secara statistik tidak menunjukkan hubungan antara pendidikan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Faktor pendidikan yang ditempuh responden adalah faktor yang berhubungan tidak nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Artinya tinggi atau rendahnya partisipasi tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Hasil penelitian di lapang didapatkan mayoritas pendidikan masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu hanya tamat sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 56,67%, bahkan banyak yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 36,67%. Tingkat pendidikan tertinggi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak selalu berpartisipasi tinggi, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk berfikir lebih luas dan memiliki pilihan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga partisipasinya dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran cenderung rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari terdapatnya masyarakat yang menempuh pendidikan formal yang kurang dengan partisipasinya yang tinggi, dan terdapat masyarakat yang menempuh pendidikan formal yang kurang dengan partisipasinya yang rendah.

5.2.4 Hubungan Pendapatan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan masyarakat selama memanfaatkan Hasil Hutan Non Kayu yang dikonversikan dalam bentuk Rupiah/Bulan. Berdasarkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* pada Tabel 5.3 antara pendapatan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak ($0,023 < 0,05$), artinya secara statistik menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran. Nilai koefisien korelasi r_s hitung sebesar positif 0,413 artinya pendapatan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan partisipasi masyarakat. Nilai koefisien korelasi r_s juga bertanda positif, menunjukkan bahwa variabel pendapatan dengan tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu mempunyai hubungan yang searah, sehingga

semakin tinggi pendapatan mempunyai kecenderungan berpartisipasi tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan mempunyai kecenderungan berpartisipasi rendah.

Jumlah pendapatan masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu sangat beragam tergantung Hasil Hutan Non Kayu yang diperoleh. Pendapatan adalah faktor yang berhubungan nyata dengan partisipasi, artinya semakin besar pendapatan yang diperoleh dari hasil, maka akan semakin meningkat pula partisipasinya. Begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan semakin sedikit yang diperoleh maka akan menurunkan partisipasi dari masyarakat tersebut dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan adalah salah satu tolak ukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Semua masyarakat yang tinggal di desa penyangga mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasil dari hutan terutama Hasil Hutan Non Kayu. Dari penjualan Hasil Hutan Non Kayu tersebut masyarakat akan mendapatkan tambahan penghasilan/pendapatan.

5.2.5 Hubungan Lama Tinggal dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Lama tinggal adalah lama responden dalam menetap di tempat tinggalnya sekarang yaitu di desa penyangga yang dinyatakan dalam tahun. Berdasarkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* pada Tabel 5.3 antara faktor lama tinggal dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima ($0,118 > 0,05$), artinya secara statistik tidak menunjukkan adanya hubungan antara lama tinggal dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Faktor lama tinggal responden di desa penyangga adalah faktor berhubungan tidak nyata dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran, artinya tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu tidak berhubungan dengan lama tinggal masyarakat di desa penyangga. Dari hasil penelitian di lapang didapatkan mayoritas pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu adalah penduduk asli yaitu sebesar

66,67% yang artinya semenjak lahir sudah bertempat tinggal di sekitar Taman Nasional Baluran. Masyarakat yang merupakan penduduk asli tidak selalu berpartisipasi tinggi. Begitu juga dengan penduduk yang merupakan bukan penduduk asli/pendatang tidak selalu berpartisipasi rendah. Hal ini disebabkan terdapat masyarakat yang merupakan pendatang, namun partisipasi terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran termasuk tinggi dan terdapat juga masyarakat yang merupakan pendatang berpartisipasi rendah.

5.2.6 Hubungan Pengetahuan Kawasan dengan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Pengetahuan kawasan merupakan wawasan atau pengetahuan yang dimiliki oleh responden mengenai kawasan hutan di Taman Nasional Baluran. Berdasarkan hasil analisis korelasi *Rank Spearman* pada Tabel 5.3 antara faktor pengetahuan kawasan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di Taman Nasional Baluran menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak ($0,035 < 0,05$), artinya secara statistik menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan kawasan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu terhadap pengelolaan Taman Nasional Baluran. Nilai koefisien korelasi r_s hitung sebesar positif 0,387 artinya pengetahuan kawasan memiliki hubungan yang lemah dengan partisipasi masyarakat. Nilai koefisien korelasi r_s juga bertanda positif, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan kawasan dengan tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu mempunyai hubungan yang searah, sehingga semakin tinggi pengetahuan kawasan mempunyai kecenderungan berpartisipasi tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan kawasan mempunyai kecenderungan berpartisipasi rendah.

Pengetahuan tentang kawasan hutan yang dimiliki oleh masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu sangat beragam tergantung informasi dan pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat. Pengetahuan kawasan tidak berhubungan dengan partisipasi, artinya tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat tidak berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kawasan hutan. Pengetahuan kawasan yang dimiliki oleh masyarakat

pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu yang tinggal di desa penyangga sebesar 80% termasuk dalam kategori sedang. Pengetahuan tentang kawasan hutan diantaranya adalah mengenai hasil hutan yang diperbolehkan dan dilarang untuk diambil, batas-batas wilayah hutan yang masyarakat boleh dimasuki dan dimanfaatkan hasil hutan oleh masyarakat, serta adanya sanksi apabila terjadi pencurian hasil hutan yang dilarang dimanfaatkan oleh masyarakat.

5.3 Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dengan memadukan beberapa faktor yang terdiri dari faktor pendorong dan penghambat. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di masa mendatang. Setiap tahapan partisipasi pada pengelolaan Taman Nasional Baluran harus diketahui faktor pendorong dan penghambatnya agar masyarakat dapat mengoptimalkan faktor pendorong dan meminimalkan faktor penghambatnya.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dapat diketahui dengan menganalisis faktor pendorong dan penghambat menggunakan alat analisis yang bernama analisis medan kekuatan atau FFA (*Force Field Analysis*). FFA (*Force Field Analysis*) merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam merencanakan perubahan berdasarkan adanya faktor pendorong dan penghambat. Hasil dari analisis FFA akan memunculkan sebuah strategi yang meminimalisasi faktor penghambat dan mengoptimalkan faktor pendorong kearah tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan para *expert* (ahli), terdapat 5 faktor pendorong dan 5 faktor penghambat yang terdapat pada partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran (TNB). Penjelasan terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat pada Tabel 5.4

Tabel 5.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No	Faktor Pendorong	No	Faktor Penghambat
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal
D3	Adanya penyuluhan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga TNB	H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah
D5	Adanya konservasi/lingkungan masyarakat dan pemuda pendidikan untuk	H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran E)

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang tergolong faktor pendorong dan penghambat partisipasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dapat diartikan sebagai hal-hal yang menjadi kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*opportunities*). Faktor-faktor tersebut nantinya akan ditentukan menjadi kekuatan kunci keberhasilan dalam peningkatan partisipasi dari masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Faktor-faktor pendorong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dari TNB (Taman Nasional Baluran)

Pihak Balai Taman Nasional Baluran memberikan bantuan ekonomi terhadap masyarakat desa penyangga terutama para pemanfaat hasil hutan non kayu. Faktor pendorong ini termasuk batasan ekonomi. Pemberian bantuan peningkatan perekonomian masyarakat untuk 3 Desa yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Baluran yaitu Desa Wonorejo, Sumberwaru, dan Sumberanyar. Jenis bantuan yang diberikan diantaranya pembuatan energi alternatif Biogas bagi masyarakat Desa Wonorejo. Biogas ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sehari-harinya menggunakan kayu bakar sebagai bahan

untuk memasak dan biasa mengembalikan ternaknya di dalam kawasan. Dengan adanya bantuan Biogas ini, kebiasaan masyarakat yang dulunya berketergantungan pada kawasan dapat dikurangi. Pada Desa Sumberanyar dan Desa Sumberwaru, bantuan pengelolaan dan pembuatan pupuk bokhasi. Dengan adanya pengelolaan dan pembuatan bokhasi yang dapat menyerap tenaga kerja baru, merupakan upaya pengalihan profesi bagi masyarakat yang dulunya bekerja dan mengandalkan hidup dari mengambil hasil hutan. Sehingga dengan adanya lapangan kerja yang baru ini jumlah masyarakat yang masuk ke dalam kawasan dapat ditekan.

2. Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata
Pihak Taman Nasional Baluran mengajak masyarakat sekitar kawasan untuk menyediakan jasa penginapan dalam bentuk *homestay* dan membentuk armada OBAMA (Ojek Baluran Mantab) yang berfungsi sebagai penyedia sarana transportasi wisata di Baluran. Faktor pendorong ini termasuk batasan kelembagaan. Selain masyarakat memberikan sarana tempat tinggal dan transportasi, masyarakat juga diberikan pelatihan dan wawasan tentang Taman Nasional Baluran, agar bisa menjadi pemandu wisata dan memberikan informasi kepada wisatawan yang berkunjung ke Baluran. Inisiatif dari Taman Nasional Baluran untuk mengajak masyarakat dalam kegiatan ekowisata ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian Taman Nasional Baluran.
3. Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga
Adanya pendampingan dari pihak Balai Taman Nasioanl Baluran yaitu berupa pemberian informasi tentang yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di dalam hutan dalam memanfaatkan hasil hutan. Faktor pendorong ini termasuk batasan kelembagaan. Sekarang ini masyarakat dalam mengambil hasil hutan non kayu dikoordininasi agar dalam pencarian tersebut tidak merusak hutan. Koordinasi tersebut berupa membentuk kelompok yang dipimpin oleh 1 orang selaku ketua/koordinator kelompok dengan beberapa anggota. Contoh di Dusun Randuagung terdapat kelompok pencari asam dan kelompok pencari biji akasia. Pengelompokkan ini bertujuan untuk memudahkan pihak Balai

dalam mengkoordinasi para pemanfaat hasil hutan non kayu dan dapat memberikan himbauan agar tidak merusak hutan. Para pemanfaat HHNK yang tergabung dalam kelompok, dikumpulkan di kantor Taman Nasional Baluran untuk membuat suatu persetujuan apa yang boleh dan tidak boleh, batasan-batasan wilayah yang diambil, membawa kendaraan dan diparkir dimana atau lebih tepatnya aturan-aturan dalam mengambil hasil hutan. Sedangkan masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu yang tidak tergabung dalam kelompok, biasanya diberikan penyuluhan mengenai peraturan dalam pengambilan HHNK pada saat masuk kawasan hutan dan mengambil HHNK.

4. Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB

Lembaga desa yang berperan aktif dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Baluran seperti kelompok SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan). Faktor pendorong ini termasuk batasan kelembagaan. SPKP merupakan lembaga/kelompok yang dibentuk oleh Taman Nasional Baluran dibawah naungan Kementerian Kehutanan. SPKP dibentuk karena desa di sekitar Taman Nasional Baluran merupakan desa penyangga hutan. SPKP ini tugasnya adalah membimbing masyarakat yang biasanya mata pencahariannya di hutan sedikit demi sedikit diarahkan agar tidak terlalu bergantung dengan hasil hutan. Untuk merealisasikan hal tersebut membutuhkan wadah yaitu berupa lembaga yang cocok untuk masyarakat. Karena beberapa masyarakat merasa lebih nyaman mencari penghasilan di hutan daripada budidaya karena pengalaman pertanian yang mereka miliki relatif kecil. Oleh karena itu, SPKP melatih masyarakat Desa Wonorejo dengan memberikan pelatihan pembuatan energi alternatif dan teknik budidaya lebah madu, sedangkan untuk SPKP Desa Sumberanyar dan Sumberwaru dilaksanakan pelatihan pembuatan pupuk bokhasi. Dengan pelatihan yang diberikan diharapkan masyarakat dapat memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat.

5. Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda

Baluran mengadakan pendidikan konservasi/lingkungan untuk tingkat pendidikan formal yaitu SMP. Faktor pendorong ini termasuk batasan sosial

dan budaya. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2009 sampai dengan sekarang, dan untuk saat ini masih terbatas untuk sekolah yang berada di sekitar Taman Nasional Baluran. Kegiatan ini sangat memberi arti bagi para siswa yang mengikutinya, karena bagi para siswa pengetahuan tentang konservasi masih sangat awam. Padahal secara nyata mereka tinggal berdekatan dengan kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Baluran. Kegiatan pendidikan konservasi ini diharapkan bisa menjadi muatan lokal bagi siswa, karena misi dan tujuan konservasi dapat diperkenalkan sejak dini yang diharapkan akan tertanam jiwa konservasi dalam diri para siswa. Materi-materi yang disampaikan merupakan materi konservasi yang memberikan wawasan serta menggugah rasa ingin tahu dan kesadaran para siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Perubahan cara pandang mereka tentang konservasi diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap kelestarian Taman Nasional Baluran, karena mereka baik secara langsung maupun tidak langsung menyebarkan informasi tentang Taman Nasional Baluran yang harapannya akan menggandeng keluarga maupun orang lain.

Selain kekuatan, tingkat kelemahan juga harus diminimalisasi agar kekuatan tersebut bisa maksimal. Faktor penghambat partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran dapat diartikan sebagai kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treaths*). Faktor penghambat ini, nantinya akan ditentukan sebagai penghambat kunci yang harus diminimalisasi demi tercapainya tujuan peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah

Faktor penghambat partisipasi yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah. Faktor penghambat ini termasuk batasan ekonomi. Masyarakat yang tinggal disekitar Taman Nasional atau disebut juga desa penyangga merupakan masyarakat dengan perkeekonomian menengah kebawah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mempunyai pekerjaan

utama sebagai petani penggarap dan buruh tani. Penghasilan yang tergantung pada musim tanam dan musim panen tersebut menyebabkan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional kurang karena masyarakat terlalu sibuk untuk mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Nasional Baluran.

2. Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal

Faktor penghambat yang kedua adalah tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal. Faktor penghambat ini termasuk batasan sosial budaya. Adanya kelompok adat pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional. Dengan adanya kelompok adat, maka akan menghasilkan suatu hukum adat yang akan menjaga kearifan lokal di sekitar tempat tinggal yang masyarakat. Namun, hal ini tidak berlaku di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran tidak memiliki kelompok adat seperti pada suku Baduy, dan Suku Tengger. Sehingga masyarakat kurang memiliki rasa takut jika melanggar peraturan untuk menjaga kelestarian hutan karena tidak adanya sanksi dari hukum adat.

3. Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB

Faktor penghambat yang ketiga adalah kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB. Faktor penghambat ini termasuk batasan sosial budaya. Adanya program pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Baluran bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar tidak terlalu bergantung terhadap hasil hutan. Namun, program pemberdayaan ekonomi tersebut tidak ada keberlanjutan karena kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan hal tersebut. Masyarakat hanya antusias

pada awal program saja, karena masyarakat beranggapan lebih baik mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga daripada melanjutkan program tersebut. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam program tersebut kurang, dan ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan masih tetap tinggi.

4. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah

Faktor penghambat yang keempat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Faktor penghambat ini termasuk batasan sosial budaya. Tingkat pendidikan adalah lama masyarakat dalam menempuh pendidikan formal. Mayoritas masyarakat di desa penyangga Taman Nasional Baluran berpendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan karena kurangnya biaya yang dimiliki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat juga kurang, terutama dalam hal kelestarian hutan.

5. Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam

Faktor penghambat yang kelima adalah pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil. Faktor penghambat ini termasuk batasan sosial budaya Masyarakat yang tinggal di Desa Penyangga hutan Taman Nasional Baluran adalah masyarakat yang sudah lama dan turun temurun tinggal di daerah desa penyangga. Masyarakat sudah terbiasa untuk mengambil hasil hutan daripada mengusahakan suatu kegiatan seperti budidaya pertanian. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Baluran terkenal dengan sebutan masyarakat pesisir yaitu memiliki budaya panen daripada budaya tanam artinya lebih terbiasa mengambil daripada menanamnya terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat karena faktor perekonomian yang masih rendah.

Identifikasi dilanjutkan pada penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran, identifikasi tersebut akan menghasilkan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam merumuskan strategi. Penilaian yang

dilakukan pada proses analisis FFA ini merupakan penilaian kualitatif yang dikuantifikasikan dengan skala nilai 1-5. Penilaian tersebut melalui proses jajak pendapat (*brainstorming*) dari para responden yang merupakan ahli dalam bidangnya. Hasil penilaian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel evaluasi faktor pendorong dan penghambat.

Berdasarkan hasil analisis FFA mengenai penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat seperti pada tabel evaluasi faktor pendorong dan penghambat, maka dapat diketahui nilai dari Total Nilai Bobot (TNB) masing-masing faktor. Berdasarkan nilai TNB tersebut maka dapat ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pada pengelolaan Taman Nasional Baluran yaitu dengan cara melihat nilai TNB yang terbesar. Faktor kunci keberhasilan (FKK) terbagi menjadi dua, yaitu FKK pendorong dan FKK penghambat.

Tabel 5.5 Evaluasi Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No	Faktor Pendorong	NU	BF	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	4	0.36	4	1.45	4.03	1.46	2.92	*1
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata	2.25	0.20	3.5	0.72	3.56	0.73	1.44	
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	2.25	0.20	3.5	0.72	3.56	0.73	1.44	
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	1	0.09	2.5	0.23	3.28	0.30	0.53	
D5	Adanya pendidikan konservasi/ lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	1.5	0.14	2.5	0.34	3.44	0.47	0.81	

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran G)

*): prioritas (FKK)

Keterangan:

NU : Nilai Urgensi

BF : Bobot Faktor

ND : Nilai Dukungan

NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan

NBD : Nilai Bobot Dukungan

NBK : Nilai Bobot Keterkaitan

TNB : Total Nilai Bobot

FKK : Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui beberapa poin nilai, mulai dari nilai NU, BF, ND, NRK, NBD, NBK, TNB dan FKK. Dari beberapa poin nilai diatas, nilai dari FKK adalah yang utama. Nilai TNB merupakan nilai akhir yang menentukan satu faktor kunci keberhasilan atau FKK dari beberapa faktor-faktor yang ada.

Nilai TNB dari masing-masing faktor pendorong berbeda satu sama lainnya. Nilai TNB terkecil adalah berasal dari peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Baluran yaitu sebesar 0,53. Nilai TNB terkecil peran aktif kelembagaan tidak begitu mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan Taman nasional Baluran. Melihat dari kondisi di lapangan, lembaga yang ada di sekitar Desa Penyangga seperti SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) meskipun memberikan beberapa program pemberdayaan untuk masyarakat, akan tetapi tidak terlalu intensif sehingga masyarakat tidak terlalu berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Nilai TNB selanjutnya adalah 0,81 yang berasal dari adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda. Faktor tersebut memiliki nilai TNB yang kecil, artinya faktor tersebut tidak begitu dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil temuan dilapangan pendidikan konservasi yang ditujukan untuk masyarakat dan pemuda tersebut masih hanya dilakukan di SMP saja sehingga kurang efektif untuk mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat karena kurang meratanya program pendidikan konservasi tersebut. Jika pemberian pendidikan konservasi ini lebih merata ke seluruh sekolah yang ada di desa penyangga pasti akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Faktor pendorong selanjutnya dengan nilai TNB sebesar 1,44 adalah Inisiatif Balai Taman Nasional Baluran untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata dan adanya pendampingan dari Balai Taman Nasional Baluran bagi masyarakat penyangga. Kedua faktor tersebut memiliki nilai TNB yang cukup besar, artinya kedua faktor tersebut akan berdampak positif dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil temuan dilapangan,

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat menambah wawasan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Begitu juga dengan adanya pendampingan dari pihak Taman Nasional Baluran, dapat memberikan informasi tentang peraturan memasuki kawasan hutan Taman Nasional Baluran. Sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang hasil hutan yang boleh dimanfaatkan dan dapat mengetahui akibatnya jika tidak ikut serta menjaga kelestarian hutan di Taman Nasional Baluran.

Bantuan dari Taman Nasional Baluran untuk peningkatan perekonomian masyarakat merupakan faktor pendorong terakhir yang memiliki nilai TNB terbesar yaitu sebesar 2,92. Nilai TNB terbesar berarti bantuan dari Taman Nasional Baluran untuk peningkatan perekonomian masyarakat adalah faktor kunci keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu. Dengan adanya bantuan dari Taman Nasional Baluran untuk peningkatan perekonomian masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat karena bantuan ekonomi tersebut dapat menambah ketrampilan masyarakat sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah tidak terlalu bergantung dengan hasil hutan dan kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan dapat meningkat. Penjelasan terkait evaluasi faktor penghambat, dapat dilihat pada Tabel 5.6

Tabel 5.6 Evaluasi Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No.	Faktor Penghambat	NU	BF	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	2.5	0.23	3.5	0.80	3.75	0.85	1.65	
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	1	0.09	2.25	0.20	2.72	0.25	0.45	
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi	2	0.18	3.25	0.59	3.56	0.65	1.24	
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	2.75	0.25	3.75	0.94	3.75	0.94	1.88	
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil	2.75	0.25	3.5	0.88	4.08	1.02	1.90	*1

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran G)

*) : prioritas (FKK)

Keterangan:

NU : Nilai Urgensi

BF : Bobot Faktor

ND : Nilai Dukungan

NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan

NBD : Nilai Bobot Dukungan

NBK : Nilai Bobot Keterkaitan

TNB : Total Nilai Bobot

FKK : Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat nilai TNB pada masing-masing faktor penghambat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Nilai TNB terkecil terdapat pada faktor tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal yaitu sebesar 0,45. Faktor tersebut dapat menghambat partisipasi meskipun hambatan yang ditimbulkan adalah kecil. Untuk membentuk kelompok adat membutuhkan waktu

yang relatif panjang. Apalagi masyarakat sudah terbiasa dengan dengan tidak adanya kelompok adat di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, ada tidaknya kelompok adat tidak terlalu berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.

Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan Taman Nasional Baluran adalah faktor selanjutnya yang menghambat partisipasi masyarakat dengan nilai TNB sebesar 1,24. Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan Taman Nasional Baluran tidak menjadi kendala yang berarti dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Hal ini dikarenakan tidak semua program yang diberikan oleh pihak Taman Nasional Baluran dilanjutkan oleh masyarakat. Program ekonomi yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat biasanya akan tetap berlanjut. Program yang tetap dilanjutkan oleh masyarakat seperti pembuatan biogas. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat selain menjadi buruh tani, juga memelihara hewan ternak seperti sapi sehingga kotoran ternak dapat digunakan untuk pembuatan biogas yang dijadikan bahan bakar pengganti kayu bakar.

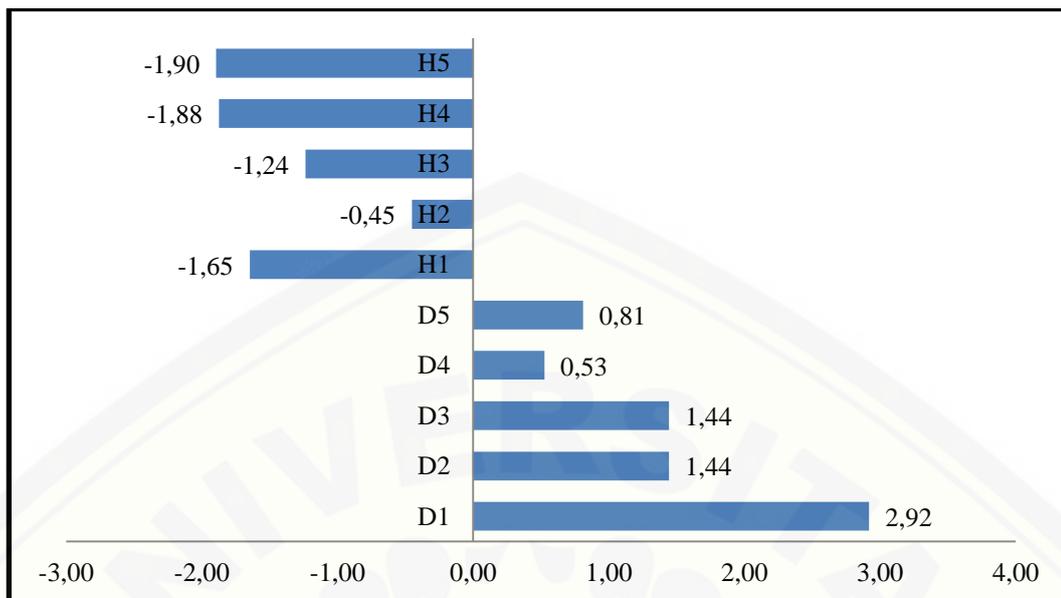
Faktor penghambat selanjutnya adalah tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah yaitu dengan nilai TNB sebesar 1,65. Tingkat pendapatan yang relatif rendah menjadi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan, petani terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang masih belum bisa tercukupi. Sehingga masyarakat tidak mempunyai waktu untuk mengikuti kegiatan di Taman Nasional Baluran. Selain itu, dengan tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat sangat bergantung kepada hasil hutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang belum terpenuhi.

Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah adalah faktor yang paling menghambat setelah faktor tingkat pendapatan masyarakat, yaitu dengan nilai TNB sebesar 1,88. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan wawasan masyarakat tentang

pentingnya menjaga kelestarian hutan di Taman Nasional Baluran. Sehingga tak dapat dipungkiri kesadaran masyarakat juga akan menjadi kurang.

Faktor penghambat dengan nilai TNB terbesar (1,90) adalah pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam. Nilai TNB terbesar berarti FKK penghambat partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan non kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah H5 (pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam). Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil ini sangat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Masyarakat terbiasa mengambil Hasil Hutan Non Kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat bahkan sudah sangat bergantung dan merasa lebih nyaman bekerja dengan mengambil hasil hutan daripada pekerjaan lainnya yang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh keuntungan.

Masyarakat yang tinggal di desa penyangga hutan adalah pelaku utama dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran, sehingga keberhasilan kelestarian hutan tidak hanya bergantung pada pihak Taman Nasional Baluran tetapi juga masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang paling sering berinteraksi dengan hutan. Oleh karena itu dibutuhkannya perhatian lebih kepada masyarakat. Perhatian tersebut dapat berupa penyuluhan dan pendampingan dari pihak terkait seperti pihak Taman Nasional Baluran, lembaga desa, dan pemerintah desa di daerah penyangga seperti Desa Wonorejo, Sumberwaru dan Sumberanyar. Agar masyarakat dapat mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan. Akan tetapi, hal ini harus sejalan dengan manfaat ekonomi dari hasil hutan yang diperoleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sebuah partisipasi masyarakat akan meningkat jika terdapat manfaat yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Berikut adalah gambar medan kekuatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.



Gambar 5.1 Medan Kekuatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Berdasarkan Gambar 5.1 maka dapat diketahui arah dan nilai masing-masing faktor pendorong maupun faktor penghambat pada partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Panjang anak panah menyatakan besarnya TNB dari masing-masing faktor sedangkan arah anak panah merupakan tarik menarik antara faktor penghambat dan faktor pendorong. Jumlah seluruh nilai TNB pendorong sebesar 7,14 sedangkan jumlah seluruh TNB penghambat sebesar 7,11. TNB pendorong lebih besar daripada TNB penghambat. Berdasarkan nilai medan kekuatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan Taman Nasional Baluran berpeluang untuk dapat tercapai.

Setelah diketahui arah faktor pendorong dan penghambat pada pengelolaan Taman Nasional Baluran dapat dirumuskan strategi yang tepat sesuai hasil FKK. Strategi ini merupakan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui peningkatan partisipasi pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Melalui strategi yang tepat dan sesuai maka tujuan dari pengelolaan Taman Nasional Baluran akan cepat tercapai. Berdasarkan hasil analisis FFA (*Force Field Strategy*) akan menghasilkan sebuah strategi yang paling efektif yaitu dengan cara menghilangkan atau meminimalisasi

faktor penghambat kunci dan optimalisasi faktor pendorong kunci kearah tujuan utama yang akan tercapai. Pendekatan yang demikian ini merupakan pendekatan strategi fokus.

Strategi fokus pada hasil analisis FFA sesuai pada Gambar 5.1 dapat dirumuskan bahwa kekuatan atau pendorong kunci yang telah dipilih difokuskan kearah tujuan yang telah ditetapkan pada program pengelolaan Taman Nasional Baluran. FKK pendorong yang terpilih adalah bantuan dari Taman Nasional Baluran untuk peningkatan perekonomian masyarakat, fokusnya yaitu kegiatan pemberian bantuan ekonomi ini harus lebih ditingkatkan lagi dan harus berupa bantuan ekonomi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu kegiatan ini haruslah selalu dilakukan kegiatan pendampingan dan evaluasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan untuk FKK penghambat yaitu pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam, fokusnya yaitu selain memberikan bantuan ekonomi agar masyarakat tidak terlalu bergantung kepada hasil hutan juga dilakukannya pendampingan dari semua pihak yang yang terkait seperti pemerintah desa, lembaga desa, dan pihak Taman Nasional Baluran agar tujuan pengelolaan Baluran bisa tercapai.

Penyusunan strategi ini harus memperhatikan kesesuaian arah optimalisasi pendorong kunci ke arah perbaikan penghambat kunci. Artinya jika pendorong kunci dan penghambat kunci yang dipilih lebih dari satu, maka penyusunan strategi harus memperhatikan kesesuaian perpaduan masing-masing faktor untuk menuju tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan evaluasi hasil perhitungan faktor pendorong dan faktor penghambat, diperoleh masing-masing satu pendorong kunci dan penghambat kunci. Strategi fokus yang diperoleh berdasarkan hasil FKK pendorong dan FKK penghambat yang telah dipilih adalah:

- 1) Mencegah perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil hasil hutan dengan memberikan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya dengan hasil hutan, seperti pelatihan pembuatan biogas. Hal ini dikarenakan mayoritas

masyarakat memelihara sapi sehingga kotoran dari sapi tersebut bisa dimanfaatkan untuk dijadikan biogas. Pelatihan pembuatan pupuk bokhasi, dengan adanya pengelolaan dan pembuatan bokhasi yang dapat menyerap tenaga kerja baru, merupakan upaya pengalihan profesi bagi masyarakat yang dulunya bekerja dan mengandalkan hidup dari mengambil hasil hutan. Sehingga dengan adanya lapangan kerja yang baru ini jumlah masyarakat yang masuk ke dalam kawasan dapat berkurang.

- 2) Adanya pendampingan pemerintah desa, lembaga desa, dan pihak Taman Nasional Baluran agar tujuan pengelolaan Baluran bisa tercapai. Pendampingan ini akan memberikan pengaruh kepada masyarakat agar lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan di Taman Nasional Baluran. Pendampingan tersebut dapat berupa pendampingan dan penyuluhan dalam program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat agar program yang diberikan berkelanjutan dan pendampingan kepada masyarakat yang hendak memasuki hutan Taman Nasional Baluran agar tidak merusak hutan.

BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Tingkat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah rendah.
2. Faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah pendapatan dan pengetahuan kawasan, sedangkan umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, dan lama tinggal tidak berhubungan dengan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran.
3. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran adalah mencegah perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil hasil hutan dengan memberikan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya dengan hasil hutan serta adanya pendampingan pemerintah desa, Lembaga Desa, dan pihak Taman Nasional Baluran.

6.2 Saran

1. Masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran dengan berpartisipasi dalam berbagai tahapan program pengelolaan Taman Nasional Baluran sehingga kelestarian hutan dapat tercapai.
2. Pihak Balai Taman Nasional Baluran hendaknya mengintensifkan program-program pemberdayaan kepada masyarakat terutama pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu agar tidak bergantung sepenuhnya dari hasil hutan, seperti program pelatihan pembuatan biogas dan bokhasi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap HHNK.

3. Pihak Taman Nasional Baluran, pemerintah desa penyangga dan Lembaga Desa lebih mengintensifkan pendampingan melalui penyuluhan terhadap masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu.
4. Sebaiknya Pihak Taman Nasional Baluran sebaiknya mensosialisasikan batasan-batasan wilayah hutan konservasi kepada masyarakat desa penyangga dan dibentuk forum komunitas penyelamat hutan yang melibatkan pemuda desa penyangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Gusti Z. 2006. *Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum*. Bogor: Center for International Research.
- Aprianto, Yudie. 2008. *Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Kasus: Kampung Hijau Rajawati, RW 03, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Arif, Sophaan. 2012. *Dari Hutan untuk Bahan Bakar Masyarakat*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Anandya, Dudi dkk. 2004. *Riset Pemasaran (Prospektif dan Terapan)*. Malang: Banyumedia Publishing
- Demartoto, Argyo. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Alam Air Terjun Jumog, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*. Laporan Penelitian. Universitas Sebelas Maret.
- Hernawan, Yusuf. 2012. *Buah Kemiri Mendatangkan Rupiah*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Hidayat H., Haba J., dan Siburian R. 2011. *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Im, Rusmilawati. 2012. *Peran Perempuan dalam Konservasi Hutan (Catatan dari Tahura Bukit Soharo)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Imam, Ghozali. 2002. *Statistik Non-Parametrik (Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS)*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Iqbal, M. 2011. *Menuju Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersama Masyarakat*. Savana Baluran Edisi Mei 2011. www.Balurannationalpark.web.id.
- Juwariah, Siti. 2011. *Pengembangan Pariwisata Alam di TN Baluran dan Peran Serta Masyarakat Sekitar Kawasan*. Savana Baluran Edisi Mei 2011. www.Balurannationalpark.web.id.
- Kadir, Abdul dan Yusran Yusuf. 2008. Tingkat Partisipasi dalam Kegiatan *Social Agroforestry* di KHDTK Borisallo. *Jurnal Info Sosial Ekonomi*. 8 (3): 189-200.

- Kementrian Kehutanan. 2012. *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*. [http://www.dephut.go.id/uploads/files/Statistik kehutanan 2011.pdf](http://www.dephut.go.id/uploads/files/Statistik_kehutanan_2011.pdf). (Diakses pada tanggal 19 Mei 2014).
- Leeuwis, Cees. 2009. *Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mariyono, Andy. 2012. *Gadung*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Marliani, Rini Novi. 2005. *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Baluran*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, Arif. 2009. *Ekologi Vs Ekonomi*. Savana Baluran Edisi Januari-Maret 2009. www.Balurannationalpark.web.id.
- Prayitno, didi dkk. 2009. Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Studi Kasus di Distrik Semangga Kabupaten Merauke). "DIALOGUE" JIAKP 6 (1) : 13-36.
- Rianse, Usman dan Abdi. (2010). *Agroforestry: Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bandung: Alfabeta.
- Salampessy, Messalina L dkk. 2010. Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan hutan lindung , Kasus di Hutan Lindung Gunung Nona Kota ambon Propinsi Maluku. *Jurnal Perennial*. 6 (2): 99-107.
- Saleh, A. 2012. *Pemanfaatan Rumput oleh Masyarakat di SPTN Wil II Karangtekok*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Sianipar dan Entang. 2003. *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siswandi, Hendro. 2011. *Mimba Azadirachta Indica Juss*. Savana Baluran Edisi Mei 2011. www.Balurannationalpark.web.id
- Siswandi, Hendro. 2012. *Kroto: Makanan Si Burung yang Terlarang*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendar. Tanpa tahun. *Partisipasi dalam Pengembangan Masyarakat* dalam Adi Fahrudin (Ed). 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Suprayitno, Adi Riyanto, dkk. 2011. Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 8 (03) : 176-195.
- Suriani, Nur Emma dan Razak, M. Nurdin. 2011. *Pemetaan Potensi Ekowisata di Taman Nasional Baluran*. Universitas Airlangga : 24 (3): 251-260.
- Suwono. 2012. *Bilambe Si Alga Coklat (Sargassum sp)*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Toha, A. 2011. *Gepyok Gebang, Si Pembunuh Api*. Savana Baluran Edisi Mei 2011. www.Balurannationalpark.web.id
- Toha, A. 2012. *Akasia Duri*. Savana Baluran Edisi Januari 2012. www.Balurannationalpark.web.id
- Widiyanto, Mikha Agus. 2013. *Statistika Terapan: Konsep dan aplikasi SPSS dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winara, Aji dan Mukhtar, Abdullah Syarief. 2011. Potensi Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*: 8 (3). Hal 217-226.
- Yogiswari, Prawindukasih. 2006. *Peningkatan Kerjasama Taman Nasional Baluran dengan Stakeholders di Bidang Wisata*. Balai Taman Nasional.
- Yusri. 2009. *Statistika Sosial (Aplikasi dan Interpretasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lampiran A. Identitas Responden Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Nama Responden	HHNK yang dimanfaatkan	Umur	Jumlah Tanggungan Keluarga	Pendidikan (tahun)	Pendapatan (per tahun)	Lama Tinggal	Pengetahuan Kawasan
1	Sukarman	biji akasia	44	4	6	Rp 3,333,333	44	15
2	Pujianto	Kemiri	35	3	6	Rp 1,620,000	35	13
3	Mulyono	biji akasia dan kemiri	51	4	6	Rp 1,500,000	51	13
4	Legiono	Gadung, kayu bakar dan rumput	35	3	6	Rp 1,620,000	35	12
5	Puji	Gadung, kayu bakar dan rumput	35	3	6	Rp 75,000	21	11
6	Parman	Gadung, kayu bakar dan rumput	55	5	5	Rp 1,500,000	55	13
7	Narimo	Madu dan kayu bakar	38	4	6	Rp 80,000	25	11
8	Marsudi	Kelanting	33	2	6	Rp 2,153,333	33	11
9	Ali	Ikan dan Kelanting	49	4	6	Rp 4,080,000	49	14
10	Sugianto	akasia, ikan, madu, rumput	53	3	6	Rp 2,680,000	33	13
11	Hamidi	Madu	34	4	5	Rp 336,667	7	11
12	Marzudi	Madu	20	4	5	Rp 500,000	20	11
13	P. Ida	madu, rumput	40	3	4	Rp 416,667	40	12
14	Bakri	gembilina, jati, mahoni	41	7	5	Rp 2,416,667	41	14
15	Minatun	kayu bakar, rumput	45	5	5	Rp 3,760,000	25	13
16	Sofyan	kayu bakar, rumput	38	4	6	Rp 1,680,000	38	12
17	Sanusi	kayu bakar	35	3	6	Rp 120,000	20	13
18	Wito	kayu bakar	50	4	6	Rp 320,000	50	13
19	Subroto	ikan, kayu bakar, rumput	50	4	6	Rp 1,870,000	50	13
20	Mustapa	Rumput	45	3	4	Rp 80,000	45	13
21	Ramlan	asam, biji akasia, kemiri	62	2	5	Rp 950,000	62	14

Lampiran A. (Lanjutan) Identitas Responden Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Nama Responden	HHNK yang dimanfaatkan	Umur	Jumlah Tanggungan Keluarga	Pendidikan (tahun)	Pendapatan (per tahun)	Lama Tinggal	Pengetahuan Kawasan
22	Asir	asam, biji akasia, kemiri, rumput	55	2	9	Rp 220,000	55	13
23	Sunahmo	asam, gadung, kayu bakar	50	3	4	Rp 676,667	30	12
24	Ari	Asam	22	4	9	Rp 333,333	2	13
25	Suhartini	Kroto, asam, ikan, kayu bakar	30	3	6	Rp 1,325,000	15	13
26	Sunawi	asam, kroto, rumput, kayu bakar	56	3	5	Rp 570,000	7	13
27	Sudiarto	madu, rambanan, kroto	37	2	6	Rp 1,350,000	37	14
28	Sa'i	asam, biji akasia, ikan, kayu bakar	70	3	5	Rp 223,333	70	13
29	Tukirin	asam, biji akasia	40	4	6	Rp 183,333	40	13
30	Sumadi	asam, biji akasia, kayu bakar	53	3	6	Rp 2,500,000	53	15

Lampiran B. Skor Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Nama Responden	Perencanaan					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	Sukarman	1	1	1	1	1	5
2	Pujianto	1	1	1	1	1	5
3	Mulyono	1	1	1	1	1	5
4	Legiono	1	1	1	1	1	5
5	Puji	1	1	1	1	1	5
6	Parman	1	1	1	1	1	5
7	Narimo	1	1	1	1	1	5
8	Marsudi	1	1	1	1	1	5
9	Ali	1	1	1	1	1	5
10	Sugianto	1	1	1	1	1	5
11	Hamidi	1	1	1	1	1	5
12	Marzudi	1	1	1	1	1	5
13	P. Ida	1	1	1	1	1	5
14	Bakri	1	1	1	1	1	5
15	Minatun	1	1	1	1	1	5
16	Sofyan	1	1	1	1	1	5
17	Sanusi	1	1	1	1	1	5
18	Wito	1	1	1	1	1	5
19	Subroto	1	1	1	1	1	5
20	Mustapa	1	1	1	1	1	5
21	Ramlan	1	1	1	1	1	5
22	Asir	1	1	1	1	1	5
23	Sunahmo	1	1	1	1	1	5
24	Ari	1	1	1	1	1	5
25	Suhartini	1	1	1	1	1	5
26	Sunawi	1	1	1	1	1	5
27	Sudiarto	1	1	1	1	1	5
28	Sa'i	1	1	1	1	1	5
29	Tukirin	1	1	1	1	1	5
30	Sumadi	1	1	1	1	1	5
Jumlah							150

**Lampiran B. (Lanjutan) Skor Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil
Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran**

No	Nama Responden	Pelaksanaan									Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sukarman	2	2	2	1	2	3	1	1	3	17
2	Pujianto	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
3	Mulyono	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
4	Legiono	2	1	2	1	1	3	1	1	1	13
5	Puji	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
6	Parman	2	1	2	1	1	1	1	1	1	11
7	Narimo	2	1	2	1	2	1	1	1	1	12
8	Marsudi	2	1	2	1	2	3	2	2	2	17
9	Ali	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
10	Sugianto	2	1	2	1	1	3	1	1	1	13
11	Hamidi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
12	Marzudi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
13	P. Ida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
14	Bakri	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
15	Minatun	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
16	Sofyan	1	1	1	1	1	2	1	1	1	10
17	Sanusi	2	1	2	1	1	2	1	1	1	12
18	Wito	2	1	2	1	1	3	1	1	1	13
19	Subroto	1	1	1	1	1	3	1	1	1	11
20	Mustapa	2	1	2	1	1	3	1	1	1	13
21	Ramlan	2	2	2	1	2	1	1	1	1	13
22	Asir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
23	Sunahmo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
24	Ari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
25	Suhartini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
26	Sunawi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
27	Sudiarto	2	2	2	1	2	3	1	1	1	15
28	Sa'i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
29	Tukirin	1	1	1	1	1	2	1	1	1	10
30	Sumadi	2	2	2	1	2	3	1	1	1	15
Jumlah											342

**Lampiran B. (Lanjutan) Skor Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil
Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran**

No	Nama Responden	Pemanfaatan Hasil				Jumlah
		1	2	3	4	
1	Sukarman	3	3	1	3	10
2	Pujianto	3	3	1	3	10
3	Mulyono	3	3	1	3	10
4	Legiono	3	3	3	3	12
5	Puji	2	3	3	2	10
6	Parman	3	3	3	3	12
7	Narimo	2	3	2	2	9
8	Marsudi	3	3	1	3	10
9	Ali	3	3	1	3	10
10	Sugianto	3	3	3	3	12
11	Hamidi	3	3	1	3	10
12	Marzudi	3	3	3	2	11
13	P. Ida	3	3	3	3	12
14	Bakri	3	3	1	3	10
15	Minatun	3	3	3	3	12
16	Sofyan	2	3	2	2	9
17	Sanusi	3	3	3	3	12
18	Wito	3	3	3	3	12
19	Subroto	3	3	3	3	12
20	Mustapa	2	3	2	2	9
21	Ramlan	3	3	3	3	12
22	Asir	2	3	3	3	11
23	Sunahmo	3	3	3	3	12
24	Ari	2	3	1	2	8
25	Suhartini	3	3	3	3	12
26	Sunawi	3	3	3	3	12
27	Sudiarto	3	3	3	3	12
28	Sa'i	3	3	3	3	12
29	Tukirin	2	3	1	2	8
30	Sumadi	3	3	3	3	12
Jumlah						325

**Lampiran B. (Lanjutan) Skor Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil
Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran**

No	Nama Responden	Evaluasi	Jumlah
		1	
1	Sukarman	1	1
2	Pujianto	1	1
3	Mulyono	1	1
4	Legiono	1	1
5	Puji	1	1
6	Parman	1	1
7	Narimo	1	1
8	Marsudi	1	1
9	Ali	1	1
10	Sugianto	1	1
11	Hamidi	1	1
12	Marzudi	1	1
13	P. Ida	1	1
14	Bakri	1	1
15	Minatun	1	1
16	Sofyan	1	1
17	Sanusi	1	1
18	Wito	1	1
19	Subroto	1	1
20	Mustapa	1	1
21	Ramlan	1	1
22	Asir	1	1
23	Sunahmo	1	1
24	Ari	1	1
25	Suhartini	1	1
26	Sunawi	1	1
27	Sudiarto	1	1
28	Sa'i	1	1
29	Tukirin	1	1
30	Sumadi	1	1
Jumlah			30

Lampiran C. Tingkat Partisipasi Responden Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Nama Responden	Perencanaan		Pelaksanaan		Pemanfaatan Hasil		Evaluasi		Total Skor	Keterangan
		Skor	Keterangan	Skor	Keterangan	Skor	Keterangan	Skor	Keterangan		
1	Sukarman	5	Rendah	17	Sedang	10	Tinggi	1	Rendah	33	Sedang
2	Pujianto	5	Rendah	11	Rendah	10	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
3	Mulyono	5	Rendah	11	Rendah	10	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
4	Legiono	5	Rendah	13	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	31	Rendah
5	Puji	5	Rendah	11	Rendah	10	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
6	Parman	5	Rendah	11	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	29	Rendah
7	Narimo	5	Rendah	12	Rendah	9	Sedang	1	Rendah	27	Rendah
8	Marsudi	5	Rendah	17	Sedang	10	Tinggi	1	Rendah	33	Sedang
9	Ali	5	Rendah	11	Rendah	10	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
10	Sugianto	5	Rendah	13	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	31	Rendah
11	Hamidi	5	Rendah	9	Rendah	10	Tinggi	1	Rendah	25	Rendah
12	Marzudi	5	Rendah	9	Rendah	11	Tinggi	1	Rendah	26	Rendah
13	P. Ida	5	Rendah	9	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
14	Bakri	5	Rendah	11	Rendah	10	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
15	Minatun	5	Rendah	11	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	29	Rendah
16	Sofyan	5	Rendah	10	Rendah	9	Sedang	1	Rendah	25	Rendah
17	Sanusi	5	Rendah	12	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	30	Rendah
18	Wito	5	Rendah	13	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	31	Rendah
19	Subroto	5	Rendah	11	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	29	Rendah

Lampiran C. (Lanjutan) Tingkat Partisipasi Responden Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Nama Responden	Perencanaan		Pelaksanaan		Pemanfaatan Hasil		Evaluasi		Total Skor	Keterangan
		Skor	Keterangan	Skor	Keterangan	Skor	Keterangan	Skor	Keterangan		
20	Mustapa	5	Rendah	13	Rendah	9	Sedang	1	Rendah	28	Rendah
21	Ramlan	5	Rendah	13	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	31	Rendah
22	Asir	5	Rendah	9	Rendah	11	Tinggi	1	Rendah	26	Rendah
23	Sunahmo	5	Rendah	9	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
24	Ari	5	Rendah	9	Rendah	8	Sedang	1	Rendah	23	Rendah
25	Suhartini	5	Rendah	9	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
26	Sunawi	5	Rendah	9	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
27	Sudiarto	5	Rendah	15	Sedang	12	Tinggi	1	Rendah	33	Sedang
28	Sa'i	5	Rendah	9	Rendah	12	Tinggi	1	Rendah	27	Rendah
29	Tukirin	5	Rendah	10	Rendah	8	Sedang	1	Rendah	24	Rendah
30	Sumadi	5	Rendah	15	Sedang	12	Tinggi	1	Rendah	33	Sedang
Keterangan	Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)
	Rendah	30	100	26	86.6667	25	83.3333	30	100	26	86.6667
	Sedang	0	0	4	13.3333	5	16.6667	0	0	4	13.3333
	Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran D. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No.	Sub Indikator Tahap Perencanaan	Pilihan Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Kegiatan survei lapangan	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100
2	Pemberian Informasi kepada masyarakat	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100
3	Pemberian usul,saran, pendapat	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100
4	Pembuatan rencana kegiatan program	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100
5	Penentuan aktivitas program	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100

Lampiran E. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No.	Sub Indikator Tahap Pelaksanaan	Pilihan Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Pelaksanaan kegiatan	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	12	40
		C. Tidak pernah	18	60
2	Sumbangan pikiran	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	4	13.33
		C. Tidak pernah	26	86.67
3	Sumbangan tenaga	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	12	40
		C. Tidak pernah	18	60
4	Sumbangan materi	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100
5	Sumbangan kehadiran	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	6	20
		C. Tidak pernah	24	80
6	Pengawasan TNB dari kebakaran	A. Selalu	15	50
		B. Kadang-kadang	3	10
		C. Tidak pernah	12	40
7	Pengawasan TNB dari perburuan	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	1	3.33
		C. Tidak pernah	29	96.67
8	Pengawasan dari pengambilan/pencurian SDA	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	1	3.33
		C. Tidak pernah	29	96.67
9	Mengatasi bencana alam	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	1	3.33
		C. Tidak pernah	29	96.67

Lampiran F. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No.	Sub Indikator Tahap Pemanfaatan Hasil	Pilihan Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Peningkatan pendapatan keluarga	A. Selalu	23	76.67
		B. Kadang-kadang	7	23.33
		C. Tidak pernah	0	0
2	Manfaat hutan terhadap lingkungan	A. Selalu	30	100
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	0	0
3	Pemanfaatan hasil hutan	A. Selalu	18	60
		B. Kadang-kadang	3	10
		C. Tidak pernah	9	30
4	Ketergantungan terhadap taman nasional	A. Tinggi	23	76.67
		B. Sedang	7	23.33
		C. Rendah	0	0

Lampiran G. Hasil Jawaban Responden pada Tahap Evaluasi Pengelolaan Taman Nasional Baluran

No.	Sub Indikator Tahap Evaluasi	Pilihan Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Monitoring dan evaluasi program	A. Selalu	0	0
		B. Kadang-kadang	0	0
		C. Tidak pernah	30	100



Lampiran H. Variabel Uji Korelasi Rank Spearman Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Partisipasi	Nama Responden	Umur	Tanggungjawab Keluarga	Pendidikan (tahun)	Pendapatan (per tahun)	Lama Tinggal	Pengetahuan Kawasan								Jumlah
								1	2	3	4	5	6	7	8	
1	33	Sukarman	44	4	6	Rp 3,333,333	44	2	2	2	2	2	2	1	2	15
2	27	Pujianto	35	3	6	Rp 1,620,000	35	1	2	2	2	1	2	1	2	13
3	27	Mulyono	51	4	6	Rp 1,500,000	51	1	2	2	2	1	2	1	2	13
4	31	Legiono	35	3	6	Rp 1,620,000	35	1	2	2	2	1	1	1	2	12
5	27	Puji	35	3	6	Rp 75,000	21	1	2	2	2	1	1	1	1	11
6	29	Parman	55	5	5	Rp 1,500,000	55	1	2	2	2	2	1	1	2	13
7	27	Narimo	38	4	6	Rp 80,000	25	1	2	2	2	1	1	1	1	11
8	33	Marsudi	33	2	6	Rp 2,153,333	33	1	2	2	2	1	1	1	1	11
9	27	Ali	49	4	6	Rp 4,080,000	49	1	2	2	2	2	2	1	2	14
10	31	Sugianto	53	3	6	Rp 2,680,000	33	1	2	2	2	1	2	1	2	13
11	25	Hamidi	34	4	5	Rp 336,667	7	1	2	2	2	1	1	1	1	11
12	26	Marzudi	20	4	5	Rp 500,000	20	1	2	2	2	1	1	1	1	11
13	27	P. Ida	40	3	4	Rp 416,667	40	1	2	2	2	1	1	1	2	12
14	27	Bakri	41	7	5	Rp 2,416,667	41	1	2	2	2	2	2	1	2	14
15	29	Minatun	45	5	5	Rp 3,760,000	25	1	2	2	2	2	1	1	2	13
16	25	Sofyan	38	4	6	Rp 1,680,000	38	1	2	2	2	1	2	1	1	12
17	30	Sanusi	35	3	6	Rp 120,000	20	1	2	2	2	2	1	1	2	13
18	31	Wito	50	4	6	Rp 320,000	50	1	2	2	2	2	1	1	2	13
19	29	Subroto	50	4	6	Rp 1,870,000	50	1	2	2	2	2	1	1	2	13
20	28	Mustapa	45	3	4	Rp 80,000	45	1	2	2	2	2	1	1	2	13
21	31	Ramlan	62	2	5	Rp 950,000	62	1	2	2	2	2	2	1	2	14

Lampiran H. (Lanjutan) Variabel Uji Korelasi Rank Spearman Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

No	Partisipasi	Nama Responden	Umur	Tanggung Keluarga	Pendidikan (tahun)	Pendapatan (per tahun)	Lama Tinggal	Pengetahuan Kawasan								Jumlah
								1	2	3	4	5	6	7	8	
22	26	Asir	55	2	9	Rp 220,000	55	1	2	2	2	2	1	1	2	13
23	27	Sunahmo	50	3	4	Rp 676,667	30	1	2	2	2	1	1	1	2	12
24	23	Ari	22	4	9	Rp 333,333	2	1	2	2	2	1	1	2	2	13
25	27	Suhartini	30	3	6	Rp 1,325,000	15	1	2	2	2	2	2	1	1	13
26	27	Sunawi	56	3	5	Rp 570,000	7	1	2	2	2	2	1	1	2	13
27	33	Sudiarto	37	2	6	Rp 1,350,000	37	1	2	2	2	2	2	1	2	14
28	27	Sa'i	70	3	5	Rp 223,333	70	1	2	2	2	1	2	1	2	13
29	24	Tukirin	40	4	6	Rp 183,333	40	1	2	2	2	2	2	1	1	13
30	33	Sumadi	53	3	6	Rp 2,500,000	53	2	2	2	2	2	2	1	2	15

Lampiran I. Hasil Analisis Uji Korelasi Rank Spearman Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran

Correlations

			Partisipasi	Umur	Tanggungans_Keluarga	Pendidikan	Pendapatan	Lama_Tinggal	Pengetahuan_Kawasan
Spearman's rho	Partisipasi	Correlation Coefficient	1.000	.239	-.309	.015	.413	.292	.387*
		Sig. (2-tailed)	.	.204	.097	.937	.023	.118	.035
		N	30	30	30	30	30	30	30
	Umur	Correlation Coefficient	.239	1.000	-.064	-.236	.134	.700**	.471**
		Sig. (2-tailed)	.204	.	.737	.210	.480	.000	.009
		N	30	30	30	30	30	30	30
	Tanggungans_Keluarga	Correlation Coefficient	-.309	-.064	1.000	-.092	.215	-.035	.016
		Sig. (2-tailed)	.097	.737	.	.630	.255	.856	.934
		N	30	30	30	30	30	30	30
	Pendidikan	Correlation Coefficient	.015	-.236	-.092	1.000	.060	-.033	.135
		Sig. (2-tailed)	.937	.210	.630	.	.751	.863	.478
		N	30	30	30	30	30	30	30
	Pendapatan	Correlation Coefficient	.413	.134	.215	.060	1.000	.172	.414
		Sig. (2-tailed)	.023	.480	.255	.751	.	.364	.023
		N	30	30	30	30	30	30	30
	Lama_Tinggal	Correlation Coefficient	.292	.700**	-.035	-.033	.172	1.000	.502**
		Sig. (2-tailed)	.118	.000	.856	.863	.364	.	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30
	Pengetahuan_Kawasan	Correlation Coefficient	.387*	.471**	.016	.135	.414	.502**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.035	.009	.934	.478	.023	.005	.
		N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran J. Data Hasil Wawancara Responden FFA

Nama : Ruswanto

Jabatan : Kepala Resort Wilayah Karangtekok

No	Faktor Pendorong	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					NU
		D1	D2	D3	D4	D5	
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat		5	5	5	5	4
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	5		4	2	3	1
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	5	4		4	4	3
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	5	2	4		3	1
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	5	3	4	3		2
Total Nilai Urgensi							11

No	Faktor Penghambat	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					NU
		H1	H2	H3	H4	H5	
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah		3	3	4	5	2
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	3		2	4	5	1
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	3	2		4	5	1
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	4	4	4		5	3
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	5	5	5	5		4
Total Nilai Urgensi							11

Lampiran J. (Lanjutan) Data Hasil Wawancara Responden FFA

Nama : Hendri Reskiyono
 Jabatan : Kepala Resort Wilayah Perengan

No	Faktor Pendorong	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					
		D1	D2	D3	D4	D5	NU
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat		5	5	5	5	4
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	5		4	4	4	3
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	5	4		2	3	1
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	5	4	2		3	1
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	5	4	3	3		2
Total Nilai Urgensi							11

No	Faktor Penghambat	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					
		H1	H2	H3	H4	H5	NU
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah		2	4	5	3	1
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	2		4	5	3	1
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	4	4		5	4	3
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	5	5	5		5	4
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	3	3	4	5		2
Total Nilai Urgensi							11

Lampiran J. (Lanjutan) Data Hasil Wawancara Responden FFA

Nama : Hardiyono

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Sumberwaru dan Sumberanyar

No	Faktor Pendorong	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					NU
		D1	D2	D3	D4	D5	
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat		5	5	5	5	4
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	5		4	3	3	2
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	5	4		4	4	3
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	5	3	4		2	1
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	5	3	4	2		1
Total Nilai Urgensi							11

No	Faktor Penghambat	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					NU
		H1	H2	H3	H4	H5	
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah		4	4	4	5	3
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	4		3	2	5	1
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	4	3		3	5	2
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	4	2	3		5	1
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	5	5	5	5		4
Total Nilai Urgensi							11

Lampiran J. (Lanjutan) Data Hasil Wawancara Responden FFA

Nama : Siyanto

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Wonorejo

No	Faktor Pendorong	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					NU
		D1	D2	D3	D4	D5	
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	5	5	5	5	5	4
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	5	4	4	4	4	3
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	5	4	3	3	3	2
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	5	4	3	2	2	1
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	5	4	3	2	1	1
Total Nilai Urgensi							11

No	Faktor Penghambat	Tingkat Komparasi Urgensi Faktor					NU
		H1	H2	H3	H4	H5	
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	5	5	5	5	5	4
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	5	3	4	4	2	1
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	5	3	4	4	3	2
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	5	4	4	4	4	3
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	5	2	3	4	1	1
Total Nilai Urgensi							11

Lampiran K. Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (masing-masing responden)
Nama: Ruswanto (Kepala Resort Wilayah Karangtekok)

No	Fakor Pendorong	NU	BF	%	ND	NBD	NK										TNK	NRK	NBK	TNB
			value				D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5				
			D1				Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	4	0.36	36.36	4	1.45	5	5	5	5				
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata	1	0.09	9.09	3	0.27	5	4	4	2	3	4	2	4	3	3	30	3.33	0.30	0.58
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	3	0.27	27.27	4	1.09	5	4	4	4	4	4	2	3	3	4	33	3.67	1.00	2.09
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	1	0.09	9.09	2	0.18	5	2	4	3	3	2	4	3	4	4	30	3.33	0.30	0.48
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	2	0.18	18.18	3	0.55	5	3	4	3	3	2	3	4	4	4	31	3.44	0.63	1.17
		11	1	100.00	Total Nilai Bobot Faktor Pendorong															
Faktor Penghambat																				
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	2	0.18	18.18	3	0.55	3	4	4	3	3	3	3	3	4	5	32	3.56	0.65	1.19
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	1	0.09	9.09	2	0.18	2	2	2	2	2	3	2	2	4	5	24	2.67	0.24	0.42
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	1	0.09	9.09	3	0.27	3	4	3	4	3	3	2	4	4	5	31	3.44	0.31	0.59
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	3	0.27	27.27	4	1.09	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	34	3.78	1.03	2.12
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	4	0.36	36.36	4	1.45	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	39	4.33	1.58	3.03
		11	1	100.00	Total Nilai Bobot Faktor Penghambat															

Lampiran K. (Lanjutan) Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (masing-masing responden)
Nama: Hendri Reskiyono (Kepala Resort Wilayah Perengan)

No	Fakor Pendorong	NU	BF	%	ND	NBD	NK										TNK	NRK	NBK	TNB
			value				D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5				
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	4	0.36	36.36	4	1.45		5	5	5	5	4	2	4	3	4	37	4.11	1.49	2.95
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata	3	0.27	27.27	4	1.09	5		4	4	4	4	2	3	3	4	33	3.67	1.00	2.09
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	1	0.09	9.09	3	0.27	5	4		2	3	3	2	4	3	4	30	3.33	0.30	0.58
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	1	0.09	9.09	2	0.18	5	4	2		3	3	2	3	3	4	29	3.22	0.29	0.47
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	2	0.18	18.18	3	0.55	5	4	3	3		3	3	3	4	4	32	3.56	0.65	1.19
		11	1	100.00	Total Nilai Bobot Faktor Pendorong															
Faktor Penghambat																				
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	1	0.09	9.09	3	0.27	4	4	3	3	3		2	4	5	3	31	3.44	0.31	0.59
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	1	0.09	9.09	2	0.18	2	2	2	2	3	2		4	5	3	25	2.78	0.25	0.43
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	3	0.27	27.27	4	1.09	4	3	4	3	3	4	4		5	4	34	3.78	1.03	2.12
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	4	0.36	36.36	4	1.45	3	3	3	3	4	5	5	5		5	36	4.00	1.45	2.91
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	2	0.18	18.18	3	0.55	4	4	4	4	4	3	3	4	5		35	3.89	0.71	1.25
		11	1	100.00	Total Nilai Bobot Faktor Penghambat															

Lampiran K. (Lanjutan) Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (masing-masing responden)
Nama: Hardiono (Tokoh Masyarakat Desa Sumberwaru dan Sumberanyar)

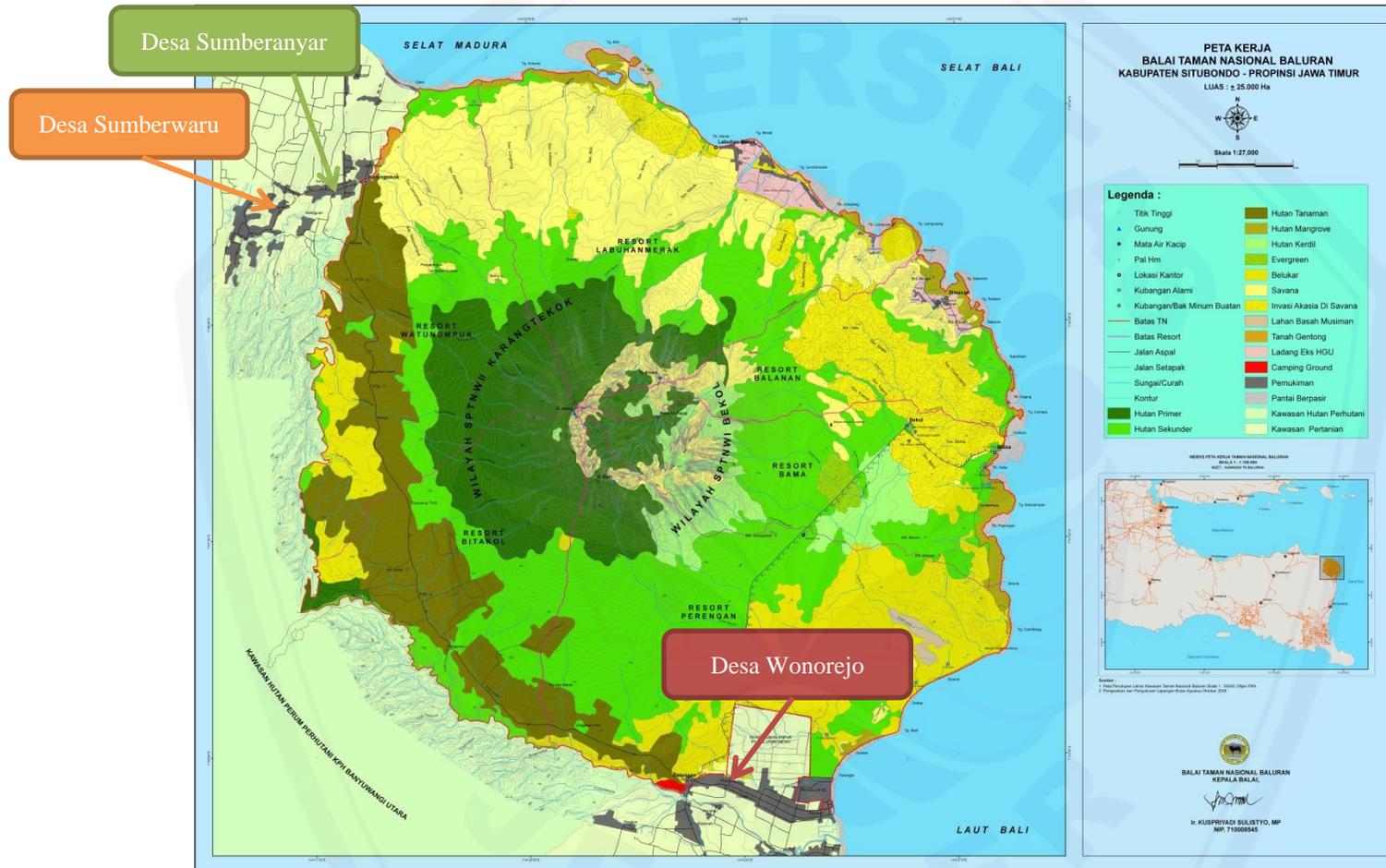
No	Fakor Pendorong	NU	BF	%	ND	NBD	NK										TNK	NRK	NBK	TNB
			value				D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5				
			D1				Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	4	0.36	36.36	4	1.45		5	5	5				
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	2	0.18	18.18	3	0.55	5		4	3	3	4	2	3	4	4	32	3.56	0.65	1.19
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	3	0.27	27.27	4	1.09	5	4		4	4	3	2	4	3	4	33	3.67	1.00	2.09
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	1	0.09	9.09	3	0.27	5	3	4		2	3	2	3	3	4	29	3.22	0.29	0.57
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	1	0.09	9.09	2	0.18	5	3	4	2		3	2	3	4	4	30	3.33	0.30	0.48
		11		100.00	Total Nilai Bobot Faktor Pendorong															
Faktor Penghambat																				
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	3	0.27	27.27	4	1.09	4	4	3	3	3		4	4	4	5	34	3.78	1.03	2.12
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	1	0.09	9.09	2	0.18	2	2	2	2	2	4		3	2	5	24	2.67	0.24	0.42
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	2	0.18	18.18	3	0.55	3	3	4	3	3	4	3		3	5	31	3.44	0.63	1.17
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	1	0.09	9.09	3	0.27	3	4	3	3	4	4	2	3		5	31	3.44	0.31	0.59
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	4	0.36	36.36	4	1.45	4	4	4	4	4	5	5	5	5		40	4.44	1.62	3.07
		11		100.00	Total Nilai Bobot Faktor Penghambat															

**Lampiran K. (Lanjutan) Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (masing-masing responden)
Nama: Siyanto (Tokoh Masyarakat Desa Wonorejo)**

No	Fakor Pendorong	NU	BF	%	ND	NBD	NK										TNK	NRK	NBK	TNB
			value				D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5				
			D1				Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	4	0.36	36.36	4	1.45		5	5	5				
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	3	0.27	27.27	4	1.09	5		4	4	4	4	2	3	3	4	33	3.67	1.00	2.09
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	2	0.18	18.18	3	0.55	5	4		3	3	4	2	4	3	4	32	3.56	0.65	1.19
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	1	0.09	9.09	3	0.27	5	4	3		2	3	2	4	3	4	30	3.33	0.30	0.58
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	1	0.09	9.09	2	0.18	5	4	3	2		3	3	3	4	4	31	3.44	0.31	0.49
		11		100.00	Total Nilai Bobot Faktor Pendorong															
Faktor Penghambat																				
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	4	0.36	36.36	4	1.45	4	4	4	3	3		5	5	5	5	38	4.22	1.54	2.99
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	1	0.09	9.09	3	0.27	2	2	2	2	3	5		3	4	2	25	2.78	0.25	0.53
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB	2	0.18	18.18	3	0.55	3	3	4	4	3	5	3		4	3	32	3.56	0.65	1.19
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	3	0.27	27.27	4	1.09	4	3	3	3	4	5	4	4		4	34	3.78	1.03	2.12
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam	1	0.09	9.09	3	0.27	3	4	4	4	4	5	2	3	4		33	3.67	0.33	0.61
		11		100.00	Total Nilai Bobot Faktor Penghambat															

Lampiran L. Hasil Analisis FFA Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat HHNK dalam Pengelolaan Taman Nasional Baluran (Gabungan)

No	Faktor Pendorong	NU	BF	%	ND	NBD	NK										TNK	NRK	NBK	TNB	FKK
			value				D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5					
D1	Bantuan dari TNB untuk peningkatan perekonomian masyarakat	4	0.36	36.36	4	1.45		5.00	5.00	5.00	5.00	3.75	2.00	3.25	3.50	3.75	36	4.03	1.46	2.92	1
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	2.25	0.20	20.45	3.5	0.72	5.00		4.00	3.25	3.50	4.00	2.00	3.25	3.25	3.75	32	3.56	0.73	1.44	3
D3	Adanya pendampingan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga	2.25	0.20	20.45	3.5	0.72	5.00	4.00		3.25	3.50	3.50	2.00	3.75	3.00	4.00	32	3.56	0.73	1.44	2
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan	1	0.09	9.09	2.5	0.23	5.00	3.25	3.25		2.50	3.00	2.00	3.50	3.00	4.00	30	3.28	0.30	0.53	5
D5	Adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	1.5	0.14	13.64	2.5	0.34	5.00	3.50	3.50	2.50		3.00	2.50	3.00	4.00	4.00	31	3.44	0.47	0.81	4
		11	1	100.00	Total Nilai Bobot Faktor Pendorong															7.14	
	Faktor Penghambat																				
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah	2.5	0.23	22.73	3.5	0.80	3.75	4.00	3.50	3.00	3.00		3.50	4.00	4.50	4.50	34	3.75	0.85	1.65	3
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal	1	0.09	9.09	2.25	0.20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	3.50		3.00	3.75	3.75	25	2.72	0.25	0.45	5
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi	2	0.18	18.18	3.25	0.59	3.25	3.25	3.75	3.50	3.00	4.00	3.00		4.00	4.25	32	3.56	0.65	1.24	4
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	2.75	0.25	25.00	3.75	0.94	3.50	3.25	3.00	3.00	4.00	4.50	3.75	4.00		4.75	34	3.75	0.94	1.88	2
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil	2.75	0.25	25.00	3.5	0.88	3.75	3.75	4.00	4.00	4.00	4.50	3.75	4.25	4.75		37	4.08	1.02	1.90	1
		11	1	100.00	Total Nilai Bobot Faktor Penghambat															7.11	



Lampiran M. Peta Taman Nasional Baluran

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

K1. Masyarakat

KUISIONER

JUDUL : STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMANFAAT HASIL HUTAN NON KAYU DI TAMAN
NASIONAL BALURAN
LOKASI : KECAMATAN BANYU PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

A. IDENTITAS PEWAWANCARA

Nama :
NIM :
Tanggal Wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
Umur : Tahun
Jenis kelamin : pria / wanita
Luas Lahan : m²
Pekerjaan Utama : a. Petani b. Pedagang c. Pegawai
d. Lainnya:
Pendidikan Terakhir : Tahun
Status kependudukan : Penduduk lokal/Pendatang/WargaAsing
Lama Domisili untuk pendatang : Tahun
Jumlah Anggota Keluarga : orang

C. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN Perencanaan Program

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan survei lapangan terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak pernah (1)Keterangan:
2. Apakah Bapak/Ibu pernah ikut serta dalam kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran? Berapa kali dan dalam hal apa?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak pernah (1)Keterangan:
3. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan usul, saran dan pendapat terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran? Berapa kali dan saran dalam hal apa?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak pernah (1)Keterangan:
4. Apakah Bapak/Ibu ikut terlibat dalam pembuatan rencana kegiatan program yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak pernah (1)Keterangan:
5. Apakah Bapak/Ibu ikut menentukan aktifitas program yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional?
 - a. Selalu (3)

- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

Pelaksanaan Program

1. Apakah Bapak/Ibu ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Baluran?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

2. Jika terlibat, apa peran Bapak/ Ibu dalam kegiatan tersebut dan dalam kegiatan apa?

Jawaban:

3. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan sumbangan pikiran terhadap program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

4. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan sumbangan tenaga terhadap program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran? Apa dan mengapa?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

5. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan sumbangan materi terhadap program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran? Apa dan mengapa?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

6. Apakah Bapak/Ibu pernah hadir pada setiap program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran?

No.	Kegiatan	Partisipasi			Keterangan
		Selalu (3)	Kadang-kadang (2)	Tidak pernah (1)	
1.					
2.					
3.					
4.					

7. Apakah bapak/Ibu ikut mengawasi lingkungan konservasi di Taman Nasional Baluran dari kebakaran?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

8. Apakah bapak/Ibu ikut mengawasi lingkungan konservasi di Taman Nasional Baluran dari perburuan?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

9. Apakah bapak/Ibu ikut mengawasi lingkungan konservasi di Taman Nasional Baluran dari pengambilan/pencurian sumber daya alam yang dilindungi?

- a. Selalu (3)
- b. Kadang-kadang (2)
- c. Tidak pernah (1)

Keterangan:

Pemanfaatan Hasil

1. Hasil hutan apa saja yang diambil oleh Bapak/Ibu? Seberapa banyak?
Jawaban:
2. Apakah hasil hutan yang dimanfaatkan atau hasil kegiatan program yang diikuti oleh Bapak/Ibu dapat memberikan tambahan pendapatan ? seberapa banyak (Rp)?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak pernah (1)Keterangan:
3. Apakah hasil hutan di Taman Nasional Baluran bermanfaat bagi Bapak/Ibu (selain uang)?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak Pernah (1)Alasan:
4. Apakah hasil hutan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak/ Ibu?
 - a. Selalu (3)
 - b. Kadang-kadang (2)
 - c. Tidak pernah (1)Keterangan:
5. Jika tidak ada Taman Nasional Baluran, bagaimana perasaan Bapak/Ibu?
Jawaban:
6. Apakah Bapak/Ibu tergantung dari hasil hutan di Taman Nasional Baluran?
 - a. Tinggi (3)
 - b. Sedang (2)
 - c. Rendah (1)Keterangan:

Evaluasi

1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan evaluasi program yang dilaksanakan oleh pihak Taman Nasional Baluran?

No.	Kegiatan	Partisipasi			Keterangan
		Selalu (3)	Kadang- kadang (2)	Tidak pernah (1)	
1.					
2.					
3.					
4.					

D. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Pengetahuan tentang kawasan Hutan Taman Nasional Baluran

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui batas-batas wilayah yang diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hasil hutan yang boleh diambil?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara untuk konservasi hutan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui peran Bapak/Ibu terhadap Taman Nasional Baluran?
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Dalam memanfaatkan hasil hutan di TN Baluran, apakah Bapak/Ibu merasa nyaman bekerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Bila Bapak/Ibu merasa nyaman, apakah terdapat dukungan dan perlindungan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Bila terdapat perlindungan, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan biaya tertentu?
 - a. Ya.
 - b. Tidak
8. Bila "Ya", bagaimana bentuk biaya yang Bapak/Ibu keluarkan?
 - a. Bagi hasil
 - b. Tidak menentu
 - c. Tergantung kebutuhan
 - d. Lainnya :
9. Sejak adanya isu perusakan lingkungan dan pencurian sekitar kawasan TN Baluran, apakah Bapak/Ibu mendengar dan merasakan adanya upaya penertiban dari pihak pemerintah dan keamanan?Apakah ada Sanksi apabila mengambil hasil hutan yang dilindungi?
 - a. Ya
 - b. Tidak

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

K2. FFA

KUISIONER

JUDUL : STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMANFAAT HASIL HUTAN NON KAYU DI TAMAN
NASIONAL BALURAN

LOKASI : KECAMATAN BANYU PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

A. IDENTITAS PEWAWANCARA

Nama :

NIM :

Tanggal Wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Pekerjaan :

3. Alamat : dusun : desa :

Kecamatan : Banyuputih

Kabupaten : Situbondo

4. Pendidikan tertinggi : a. < SD b. SD c. SMP d. SMA e. Diploma
f. sarjana g. lainnya: ...

5. Pekerjaan sampingan :

6. Status kependudukan : Penduduk lokal/Pendatang/WargaAsing

7. Lama Domisili untuk pendatang : Tahun

Jumlah anggota keluarga :orang

Faktor Pendorong dan Penghambat Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TN Baluran

Petunjuk Pengisian Tabel

1. Responden diminta mengisi tabel perbandingan antar sub-faktor dari masing-masing faktor pendorong dan faktor penghambat.
2. Diantara dua faktor yang diperbandingkan, Bapak/Ibu cukup menuliskan nomor dari faktor yang lebih penting pada kolom yang berkesesuaian.

No	FAKTOR PENDORONG	No	FAKTOR PENGHAMBAT
D1.	Bantuan dari TNB untuk Peningkatan Perekonomian masyarakat	H1.	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah
D2.	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB	H2.	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal
D3.	Adanya penyuluhan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga TNB	H3.	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB
D4.	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB	H4.	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah
D5.	adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda	H5.	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam

Jika Bapak/Ibu diminta membandingkan antara faktor-faktor dari **faktor pendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TN Baluran**, mana yang lebih penting antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mendukung **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TN Baluran** ?

Urutannya

No	Faktor Pendorong	Tingkat Komparasi Urgensi						NU
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	
D1	Bantuan dari TNB untuk Peningkatan Perekonomian masyarakat							
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB							
D3	Adanya penyuluhan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga TNB							
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB							
D5	adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda							
Total Urgensi								

Jika Bapak/Ibu diminta membandingkan antara faktor-faktor dari **faktor penghambat Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TN Baluran** , mana yang lebih penting antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mendukung **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TN Baluran** ?

Urutannya

No	Faktor Penghambat	Tingkat Komparasi Urgensi						NU
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah							
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal							
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB							
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah							
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam							
Total Urgensi								

Jika Bapak/Ibu diminta untuk mengisi nilai pada tabel dukungan dan keterikatan antara **faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran**, maka berapakah nilai dukungan dan nilai keterikatan dari faktor-faktor di dalam tabel untuk sama-sama mendukung partisipasi masyarakat pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran.

No	Faktor Pendorong	NU	ND	NK											
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6
D1	Bantuan dari TNB untuk Peningkatan Perekonomian masyarakat			■											
D2	Inisiatif Balai TNB untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata TNB				■										
D3	Adanya penyuluhan dari Balai TNB bagi masyarakat penyangga					■									
D4	Peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan TNB						■								
D5	adanya pendidikan konservasi/lingkungan untuk masyarakat dan pemuda							■							
H1	Tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah								■						
H2	Tidak adanya kelompok adat untuk menjaga kearifan lokal									■					
H3	Kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan TNB										■				
H4	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah											■			
H5	Pola perilaku masyarakat yang terbiasa mengambil (budaya memanen) daripada budaya menanam												■		

Ketentuan Pengisian Tabel:

1. Memberikan Nilai Dukungan (ND) masing-masing faktor.
2. Menganalisa antara dua faktor yang yang diperbandingkan pada nilai keterkaitan (NK).
3. Memberikan nilai keterikatan faktor dalam partisipasi masyarakat.
4. Nilai Skor diisi sama dengan petunjuk sebelumnya.



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan salah satu *Key Informan*



Gambar 2. Salah Satu Hasil Hutan Non Kayu TNB (Kroto)



Gambar 3. Kelompok Ternak Rojokoyo yang membuat biogas



Gambar 4. Foto bersama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan petugas Taman Nasional Baluran



Gambar 5. Tempat penyimpanan biogas yang dihasilkan di peternakan sapi untuk digunakan masyarakat



Gambar 6. Wawancara dengan Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (HHNK)